



## 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan Keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut.



Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo disusun dengan tujuan memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018, sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018;
29. Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrua Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
30. Peraturan Bupati Wajo Nomor 51.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrua Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
31. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018;
32. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penambahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrua Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
33. Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahunberikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan



- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.2. Kebijakan Keuangan
  - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target
    - 2.3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
    - 2.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- III. Kebijakan Akuntansi
  - 3.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
  - 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
    - 3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
    - 3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
    - 3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
    - 3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset
    - 3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
    - 3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi
  - 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- IV. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan
  - 4.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    - 4.1.1 Pendapatan - LRA
    - 4.1.2 Belanja
    - 4.1.3 Transfer
    - 4.1.4 Pembiayaan
    - 4.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
  - 4.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
    - 4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
    - 4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
    - 4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
    - 4.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
    - 4.2.5 Lain-lain
    - 4.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
  - 4.3. Penjelasan Akun-Akun Neraca
    - 4.3.1 Aset
    - 4.3.2 Kewajiban
    - 4.3.3 Ekuitas
  - 4.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
    - 4.4.1 Pendapatan - LO
    - 4.4.2 Beban
    - 4.4.3 Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
    - 4.4.4 Pos Luar Biasa
  - 4.5. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - 4.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
    - 4.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
    - 4.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi



- 4.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- 4.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- V. Pengungkapan Informasi Penting Lainnya.
  - 5.1 Pengungkapan Lainnya
    - 5.1.1. Domisili
    - 5.1.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
    - 5.1.3. Struktur Organisasi
  - 5.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
  - 5.3 Penjelasan atas Dana-dana Non APBD Kabupaten Wajo
  - 5.4 Kewajiban Kontijensi
  - 5.5 Pengungkapan atas pengalihan Urusan dari Pemerintah Kabupaten Wajo ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- VI. Penutup



## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 2.1. Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita

Perekonomian Kabupaten Wajo Tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan Tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2017 tercatat sebesar 5,22 persen per tahun. Angka tersebut lebih tinggi 0,24 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu 4,98 persen per tahun. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang menjadi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Wajo dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya, dimana sektor pertanian sangat dominan atas pembentukan PDRB Kabupaten Wajo dengan menyumbang sebesar 34,90 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Selanjutnya sektor Pertambangan dan penggalian menyumbang sebesar 15,85 persen, disusul sektor perdagangan merupakan andalan berikutnya menyumbang sebesar 15,32 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo, berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 9,69 persen, sedangkan sektor jasa lainnya mempunyai peranan kurang signifikan hanya pada kisaran 0,03 hingga 3,86 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo.

PDRB Perkapita Kabupaten Wajo pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp45,24 juta dibandingkan pada Tahun 2016 PDRB Perkapita Kabupaten Wajo sebesar Rp41,94 juta (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo Tahun 2015– 2017

Tahun	Harga Berlaku (Juta Rp)	PDRB Perkapita (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	15.119.010,29	38,45	7,06
2016*	16.544.735,87	41,94	4,98
2017**	17.897.717,74	45,24	5,22

Sumber: BPS Kabupaten Wajo

Keterangan: \*) Data Sementara

Keterangan: \*\*) Data Sangat Sementara

Sumber pendapatan masyarakat atau sumber mata pencaharian penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi di Kabupaten Wajo dapat digambarkan oleh distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha (sektor-sektor ekonomi). Selain itu dapat juga digambarkan oleh struktur perekonomian atau kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan total PDRB di Kabupaten Wajo.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wajo pada Tahun 2017 masih dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian

Tabel 2.2 Distribusi Tenaga Kerja dan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wajo Tahun 2016– 2017

Sektor Unggulan	Distribusi Tenaga Kerja (%)		Distribusi PDRB (%)	
	2016*)	2017**)	2016*)	2017**)
1. Pertanian	Tidak	42,60	34,54	34,90
2. Industri Pengolahan	diadakan	10,66	3,71	3,86
3. Perdagangan	SAKERNAS	18,81	14,75	15,32
4. Sektor Lainnya	Tahun 2016	27,93	47,00	45,92
<b>Total</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Wajo

Keterangan: \*) Data Sementara

Keterangan: \*\*) Data Sangat Sementara



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun  
 Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kontribusi Sektor Pertanian Tahun 2017 mencapai 34,90 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Kontribusi sebesar itu menyerap tenaga kerja sebesar 42,60 persen dari total tenaga kerja di Kabupaten Wajo.

Selain Sektor Pertanian, terdapat tiga sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB yaitu sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 15,85 persen, sektor Perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,32 persen dan Konstruksi dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 9,69 persen sedangkan industri pengolahan hanya sebesar 3,86 persen

Rendahnya kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Wajo menunjukkan produktifitas tenaga kerja yang ada disektor tersebut relatif masih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal itu dapat dimengerti mengingat industri pengolahan yang ada di Kabupaten Wajo masih berbasis pada industri rumah tangga dan kerajinan yang melakukan pertenunan sarung sutera secara tradisional.

Denyut nadi perekonomian Kabupaten Wajo mempunyai ketergantungan yang besar pada Sektor Pertanian. Kontribusi sektor Pertanian selalu dominan dibandingkan sektor lainnya. (Tabel 2.3)

Tabel 2.3 Kontribusi Sektor Pertanian dan Non Pertanian Terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Wajo Tahun 2013 – 2017

Sektor Produksi	2013	2014	2015*)	2016**)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. Pertanian</b>	<b>32,02</b>	<b>32,53</b>	<b>32,97</b>	<b>34,54</b>	<b>34,90</b>
a. Tanaman Pangan	15,07	14,35	14,19	TIDAK DIRILIS	TIDAK DIRILIS
b. Holtikultura Semusim	0,21	0,20	0,19		
c. Perkebunan Semusim	0,11	0,11	0,11		
d. Holtikultura Tahunan	0,81	0,80	0,83		
e. Perkebunan Tahunan	3,90	4,10	4,22		
f. Peternakan	0,85	0,81	0,82		
g. Jasa Pertanian & Perkebunan	0,38	0,36	0,35		
h. Kehutanan	0,03	0,02	0,02		
i. Perikanan	10,67	11,77	12,24		
<b>II. Non Pertanian</b>	<b>67,98</b>	<b>67,47</b>	<b>67,03</b>		
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Wajo

Keterangan: \*\*) Angka Sangat Sementara

Sektor Pertanian yang menjadi tumpuan dibanding dengan sektor lainnya dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2013 sampai 2017 kontribusinya meningkat, hal ini tidak lepas dari meningkatnya produksi dari setiap sub sektor setiap tahun. Selain itu, juga sektor lain terjadi peningkatan produksi.

Sektor pertanian yang tergolong besar, dibagi menjadi tiga sub sektor:

1. Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian yang meliputi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian perburuan
2. Kehutanan dan penebangan kayu yang meliputi kegiatan penebangan kayu termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan.
3. Perikanan yang meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun  
Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Diantara ketiga sub sektor, (Tabel 2.3), sub sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan di Kabupaten Wajo. Pada Tahun 2017, dari 34,90 persen nilai tambah bruto yang berasal dari sektor pertanian, sedangkan sektor non Pertanian sebesar 65,10 persen.

Pada Tahun 2017 sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang menurun sebesar 5,93 persen dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 8,64 persen (Tabel 2.4)

Tabel 2.4 Pertumbuhan Sektor Pertanian atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Wajo Tahun 2013 – 2017

Sektor Produksi	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Tanaman Pangan	0,04	6,31	3,72	TIDAK DIRILIS	TIDAK DIRILIS
b. Holtikultura Semusim	0,09	3,39	3,19		
c. Perkebunan Semusim	1,44	7,22	4,30		
d. Holtikultura Tahunan	0,06	7,36	6,47		
e. Perkebunan Tahunan	2,12	10,87	5,92		
f. Peternakan	6,59	5,90	5,88		
g. Jasa Pertanian & Perkebunan	4,33	4,88	1,33		
h. Kehutanan	0,16	4,42	-5,40		
i. Perikanan	22,35	16,53	5,72		
<b>Sektor Pertanian</b>	<b>6,82</b>	<b>10,17</b>	<b>4,79</b>		

Sumber: BPS Kabupaten Wajo

### Industri Pengolahan, Pertambangan dan Konstruksi

Usaha di sektor industri pengolahan di Kabupaten Wajo umumnya berbasis pada industri kecil dan industri rumah tangga. Industri rumah tangga tersebut sebagian besar merupakan kegiatan pertenunan kain sutera, disamping kegiatan industri kerajinan lainnya. Selain industri kecil, juga terdapat industri pengolahan yang tergolong besar/ sedang, namun jumlahnya masih sangat terbatas. (Tabel 2.5)

Tabel 2.5 Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Wajo Tahun 2014– 2017

Sektor Industri Pengolahan	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Tambah Bruto (Milyar Rp)	468,86	544,83	614,07	690,04
Kontribusi Terhadap PDRB (%)	3,43	3,60	3,71	3,86
<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>5,20</b>	<b>6,86</b>	<b>7,79</b>	<b>6,30</b>

Sumber: BPS Kabupaten Wajo

Keterangan: \*\*) Data Sangat Sementara

Pada Tahun 2017, sektor industri pengolahan menghasilkan Nilai Tambah Bruto (NTB) senilai sekitar Rp690,04 milyar. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB di Kabupaten Wajo mengalami penurunan dari Tahun 2016 sebesar 7,79 persen dan Tahun 2017 menjadi 6,30 persen.

Perkembangan industri pengolahan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016 mengalami peningkatan dari 5,20 persen menjadi 6,86 dan 7,79 persen di Tahun 2016 sedangkan Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,30 persen.

Peningkatan NTB di sektor industri pengolahan, terlihat baik dari jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, penerimaan pendapatan (*output*), maupun besarnya investasi. (Tabel 2.6)

Tabel 2.6 Perkembangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Wajo Tahun 2014– 2017

Banyaknya	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usaha Industri	10.895	10.948	11.048	12.086
Tenaga Kerja	32.068	32.203	33.283	35.685
Investasi (Milyar Rp)	62,40	63,19	81,59	125,52

Sumber: BPS Kabupaten Wajo

Keterangan: \*\*) Data Sangat Sementara





Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun  
Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Wajo, satu-satunya adalah tambang gas alam di Gilireng yang telah berproduksi mulai Tahun 1998. Di luar itu usaha pertambangan yang ada hanya merupakan usaha penggalian yang dikenal usaha pertambangan golongan C. Kegiatannya melakukan penggalian pasir, tanah, batu, termasuk pasir bercampur kerikil (sirtu) yang biasa digunakan untuk pembangunan, terutama dalam pembangunan jalan raya. (Tabel

Tabel 2.7 Perkembangan Sektor Pertambangan di Kabupaten Wajo Tahun 2014– 2017

Sektor Pertambangan	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Gas Bumi	2.813,41	2.727,89	-	-
b. Penggalian	286,67	349,63	-	-
<b>J u m l a h</b>	<b>3.100,08</b>	<b>3.077,52</b>	<b>2.864,97</b>	<b>2.836,41</b>
Kontribusi Terhadap PDRB (%)	22,70	20,36	17,32	15,85
Pertumbuhan (%)	15,98	9,27	-4,55	-0,07

Sumber: BPS Kabupaten Wajo

Keterangan: \*\*) Data Sangat Sementara

Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah diukur dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Hal ini dimaksud karena pada PDRB ADHK faktor inflasi sudah dihilangkan sehingga angka yang tercipta merupakan peningkatan produksi secara riil. Penggunaan harga konstan 2010 sebagai tahun dasar.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo sepanjang Tahun 2015 – 2017 terlihat berfluktuasi, pada Tahun 2015 misalnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo mencapai 7,06 persen, Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 4,98 persen. Sementara pada Tahun 2017 pertumbuhannya meningkat lagi menjadi 5,22 persen.

### Konstruksi

Sektor konstruksi (bangunan) mempunyai kontribusi terhadap PDRB 9,69 persen Tahun 2017 meningkat dari Tahun 2016 sebesar 9,58 persen. Kontribusi itu setara dengan NTB yang besarnya Rp1.220,54 milyar pada Tahun 2014, kemudian meningkat menjadi Rp1.430,59 milyar pada Tahun 2015. NTB kembali meningkat menjadi Rp1.584,57 milyar pada Tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp1.734,39 Milyar.

Perkembangan sektor Konstruksi Kabupaten Wajo selama kurun waktu 2014– 2017 (Tabel

Tabel 2.8 Perkembangan Sektor Konstruksi di Kabupaten Wajo Tahun 2014 – 2017 (Milyar Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016*)	2017**)
I. NTB (Milyar Rp)	1.220,54	1.430,59	1.584,57	1.734,39
Kontribusi Terhadap PDRB (%)	8,94	9,46	9,58	9,69
Pertumbuhan	5,70	7,75	6,08	6,01

Sumber: BPS Kabupaten Wajo

Keterangan: \*\*) Data Sangat Sementara

Kalau dilihat dari pertumbuhan maka sektor konstruksi hanya mengalami peningkatan pada Tahun 2015 yaitu 7,75 persen jika dibandingkan Tahun 2014 sebesar 5,70 persen, pada Tahun 2016 menurun menjadi 6,08 persen dan di Tahun 2017 menurun lagi hingga 6,01 persen.

### Listrik dan Air Bersih

Penyediaan energi listrik di Kabupaten Wajo terus meningkat. Hal ini terlihat dengan semakin besarnya kapasitas daya listrik yang terpasang seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan listrik.

Sektor air bersih mempunyai kontribusi terhadap PDRB setiap tahun sekitar 0,03 persen dalam periode Tahun 2014 – 2017. Kontribusi tersebut senilai (NTB), yaitu Rp4,25 milyar pada Tahun 2014, Tahun 2015 yaitu Rp4,39 milyar. Kondisi ini meningkat lagi sebesar Rp4,72 milyar di Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar Rp5,24 milyar (Tabel 2.9)



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun  
Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.9 Perkembangan Sektor Air Bersih di Kabupaten Wajo Tahun 2014 – 2017

Kategori	2014	2015	2016*)	2017**)
<b>Air Bersih</b>				
- Pelanggan	8.325	10.554	11.735	13.630
- Pemakaian	1.530.412	1.566.775	2.139.932	2.329.388
<b>NTB (Milyar Rupiah)</b>	4,25	4,39	4,72	5,24
<b>Kontribusi Terhadap PDRB(%)</b>	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Pertumbuhan (%)</b>	4,01	0,82	3,37	6,96

Sumber: BPS Kabupaten Wajo

Keterangan: \*\*) Data Sangat Sementara

## 2.2. Kebijakan Keuangan

**Kebijakan Umum APBD Kabupaten Wajo untuk Tahun Anggaran 2018 adalah:**

- 1) Pengembangan kehidupan religius;
- 2) Reformasi Birokrasi dan Perwujudan Kepemerintahan yang Baik;
- 3) Perbaikan Sistem Pelayanan Umum;
- 4) Pembangunan Pendidikan;
- 5) Pembangunan Kesehatan;
- 6) Pembangunan Infrastruktur;
- 7) Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah;
- 8) Pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- 9) Pembangunan Kebudayaan;
- 10) Penguatan Daya Saing SDM;
- 11) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Hutan.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Wajo mendukung kebijakan Pemerintah Pusat antara lain kebijakan dibidang pendidikan dengan program Indonesia pintar, bidang kesehatan dengan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Wajo juga mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan menetapkan kebijakan:

- 1) Pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 2) Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, Pembangunan kesehatan;
- 3) Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;
- 4) Pengembangan Kawasan Strategis;
- 5) Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;
- 6) Penguatan ketahanan pangan, termasuk pangan hutan dan laut.

## 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target.

### 2.3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada T.A 2018 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

#### I. Pendapatan - LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan



*Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun  
Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo TA 2018 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp1.495.477.075.619,00 dan terealisasi sebesar Rp1.407.603.616.014,33 atau 94,12% yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA dianggarkan sebesar Rp158.486.345.674,00 dan direalisasikan sebesar Rp134.000.960.863,33 atau 84,55%;
2. Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.285.488.910.778,00 dan direalisasi sebesar Rp1.225.595.524.572,00 atau 95,34%; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dianggarkan sebesar Rp51.501.819.167,00 dan direalisasi sebesar Rp48.007.130.579,00 atau 93,21%.

Perincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Wajo TA 2018 sebagai berikut:

**1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA**

Pada Perubahan APBD TA 2018 dianggarkan sebesar Rp158.486.345.674,00 dan direalisasikan sebesar Rp134.000.960.863,33 atau 84,55%;. Menurut jenisnya

- a. Pajak Daerah pada Perubahan APBD TA 2018 ditargetkan sebesar Rp35.154.313.826,00 dan realisasi sebesar Rp34.622.288.206,50 atau 98,49%;
- b. Retribusi Daerah, pada Perubahan APBD TA 2018 ditargetkan sebesar Rp14.772.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.084.758.817,20 atau 75,04%;
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah/BUMD yang dipisahkan, yaitu deviden pada Bank Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp15.384.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.144.241.966,00 atau 91,94%; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada Perubahan APBD TA 2018 dianggarkan sebesar Rp93.175.681.848,00 yang sampai akhir TA 2018 dapat direalisasi sebesar Rp74.149.671.873,63 atau 79,58%.

**2) Pendapatan Transfer - LRA**

Pada Perubahan APBD TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.285.488.910.778,00 dan direalisasi sebesar Rp1.225.595.524.572,00 atau 95,34%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Perimbangan, pada perubahan APBD TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.096.294.232.356,00 yang sampai akhir TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.047.331.470.105,00 atau 95,53% dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Bagi Hasil Pajak - LRA, pada TA 2018 dianggarkan sebesar Rp51.295.512.356,00 dan realisasi sampai akhir Tahun 2018 sebesar Rp29.327.922.838,00 atau 57,17%;
  - (2) Bagi Hasil Bukan Pajak - LRA, pada TA 2018 dianggarkan sebesar Rp38.891.351.000,00 dan realisasi sampai akhir Tahun 2018 sebesar Rp23.349.400.970,00 atau 60,04%;
  - (3) Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA, pada TA 2018 ditargetkan sebesar Rp714.224.148.000,00 dan sampai akhir TA 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp714.224.148.000,00 atau 100%; dan
  - (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA, pada TA 2018 ditargetkan sebesar Rp291.883.221.000,00 dan terealisasi sebesar Rp280.429.998.297,00 atau 96,08% pada akhir TA 2018.
- b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA ditargetkan sebesar Rp122.469.771.000,00 dan terealisasi sebesar Rp122.163.127.626,00 atau 99,75% pada akhir TA 2018;



- c. Transfer Pemerintah Provinsi - LRA, ditargetkan sebesar Rp66.724.907.422,00 dan terealisasi sebesar Rp56.100.926.841,00 atau 84,08% pada akhir TA 2018; dan

**3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA**

Pada Perubahan APBD TA 2018 dianggarkan sebesar Rp51.501.819.167,00 sampai akhir Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp48.007.130.579,00 atau mencapai 93,21%.

**II. Belanja**

Pada Perubahan APBD T.A 2018 ini, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Wajo dianggarkan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, iringasi dan jaringan serta belanja asset tetap lainnya dan yang terakhir adalah belanja tak terduga. Disamping jenis belanja diatas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan. Di dalam Perubahan APBD TA 2018, dialokasikan dana untuk belanja daerah sebesar Rp1.292.330.332.010,50 yang sampai akhir TA 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp1.198.701.815.095,47 atau 92,76%. Dari total belanja tersebut terbagi menjadi belanja operasi yang dianggarkan sebesar Rp1.040.356.707.169,50 dan terealisasi sebesar Rp983.407.147.403,25 atau 94,53%, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp249.715.673.241,00 yang pada akhir TA 2018 dapat direalisasi sebesar Rp213.370.399.448,22 atau 85,45%, belanja tak terduga yang dianggarkan sebesar Rp2.257.951.600,00 pada akhir TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.924.268.244,00 atau 85,22%. Untuk transfer bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp230.198.057.180,00 pada akhir TA 2018 dapat terealisasi sebesar Rp229.884.751.379,09 atau 99,86%.

**III. Pembiayaan**

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Wajo dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada Tahun 2018 setelah perubahan sebesar Rp35.076.313.571,50 dan pada akhir TA 2018 dapat direalisasi sebesar Rp35.081.020.170,50 atau 100,01%.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada Tahun 2018 setelah perubahan sebesar Rp8.025.000.000,00 dan pada akhir TA 2018 dapat direalisasi sebesar Rp7.722.000.000,00 atau 96,22% yang terdiri dari:
  - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada TA 2018 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp7.697.000.000,00 atau 96,21%; dan
  - b. Pembayaran Utang Pihak Ketiga, pada TA 2018 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp25.000.000,00 atau 100%.

**2.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja antara lain :



*Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun  
Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai.
2. Efektifitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurangnya tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali.
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.
4. Adanya kelemahan dalam manajemen pengelolaan keuangan sehingga berdampak timbulnya utang pada akhir tahun anggaran yang juga berakibat pada tahun anggaran berikutnya dan secara langsung mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah
5. Pendapatan transfer dari Pusat dan Provinsi yang tidak maksimal sesuai yang telah dianggarkan mengakibatkan program dan kegiatan banyak yang tidak terealisasi

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program antara lain :

1. Meningkatnya pemahaman dan para panitia pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya.
2. Tersedianya media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrembang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa hingga Tingkat Kabupaten/SKPD, dan
3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.



### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

##### **3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo TA 2018, entitas pelaporan yang dalam hal ini PPKD atau BPKAD pada Kabupaten Wajo menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas
- 6) Laporan Arus Kas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sementara itu, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan entitas akuntansi yang wajib membuat laporan keuangan meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Wajo menyajikan saldo Akun-Akun Tahun 2016 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK-RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif



dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

### 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai berikut:

#### 3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

*Pendapatan LRA* adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Wajo, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan *Pendapatan-LO* adalah hak Pemerintah Kabupaten Wajo yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Pendapatan LO menggunakan basis akrual sehingga pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan proses penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan



ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan-LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

### 3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.





Beban diakui pada saat :

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

### 3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

*Pembiayaan (financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Wajo, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Wajo terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

### 3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

*Aset* adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(1) Kas dan Setara Kas

(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam.



- (2) Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
  - (3) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan
  - (4) Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
    - a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
    - b) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
    - c) Uang tunai di bendahara umum daerah.
  - (5) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:
    - a) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas;
    - b) Kas di Bendahara Penerimaan
  - (6) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (2) Piutang
- (1) Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
  - (2) Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang. Jika piutang bertambah dicatat di sebelah debit, jika berkurang dicatat di sebelah kredit.
  - (3) Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
- Piutang dapat diakui ketika:
- a) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
  - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
  - c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- (4) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - b) jumlah piutang dapat diukur;
  - c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
  - d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



- (5) Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- (6) Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- (7) Kebijakan mengenai penyisihan piutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih.
- (8) Penyisihan Piutang dan perhitungannya
- Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dan cara untuk menyesuaikan yaitu dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang dan perhitungannya didasarkan pada umur piutang yang dapat terdiri atas 4 (empat) klasifikasi umur piutang, yaitu :

No	Umur Piutang	Kategori	% Penyisihan
1	0 s/d 12 Bulan	Lancar	5/mil
2	13 s/d 36 Bulan	Kurang Lancar	10%
3	37 s/d 60 Bulan	Ragu	50%
4	60> Bulan	Macet	100%



Penyisihan piutang ini bukan merupakan beban belanja, tetapi koreksi agar nilai piutang yang tersaji pada Neraca merupakan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan penyajiannya di Neraca merupakan pengurang dari akun piutang.

(3) Persediaan

(1)) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

(2)) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat meliputi:

- a) Barang konsumsi termasuk di dalamnya barang pakai habis.
- b) Amunisi.
- c) Bahan untuk pemeliharaan.
- d) Suku cadang.
- e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
- f) Pita cukai dan leges.
- g) Bahan baku.
- h) Barang dalam proses/setengah jadi.
- i) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- j) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

(3)) Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (*neraca*) tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

(4)) Pengakuan Beban Persediaan

a) Pendekatan Aset

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk



maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

b) Pendekatan Beban

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

(5) Pengakuan Selisih Persediaan

Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

(6) Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Metode penilaian persediaan adalah menggunakan harga pembelian terakhir.

b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

c) Nilai wajar atau didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

(7) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

(8) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir dan Metode First in First Out (FIFO)

(9) Metode Penilaian Harga First In First Out (FIFO) digunakan untuk persediaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) pada kelompok farmasi yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode perpetual.



- (10)) Metode Penilaian Harga Pembelian Terakhir digunakan untuk persediaan selain obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode periodik.
- (11)) Penilaian persediaan untuk barang-barang sejenis alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya dihitung jika dalam segel/kemasan lengkap, terkecuali obat-obatan dan alat kesehatan/reagen yang dapat diidentifikasi harga tiap satuan terkecil, misalnya ampul/vial, tablet, strip, dan benda berharga berupa karcis serta akta-akta.
- (4) Belanja Dibayar Dimuka
- (1) Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian;
- (2) Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan.
- (5) Investasi Jangka Panjang
- (1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi dua:
- ((1)) Investasi Permanen
- Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali Investasi permanen meliputi:
- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- ((2)) Investasi Non Permanen
- Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- Investasi nonpermanen meliputi:
- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;



- d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- (3)) Aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- ((1)) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- ((2)) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- (4)) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- (5)) Pengukuran investasi jangka panjang:
- ((1)) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga
- ((2)) Investasi nonpermanen:
- a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- (6)) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- (7)) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- (6) Aset Tetap
- (1)) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- (2)) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- (3)) Aset Tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun  
Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (4) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- (5) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.
- (6) Kebijakan batas minimum kapitalisasi hanya diberlakukan untuk jenis belanja peralatan/mesin dan aset tetap lainnya sedangkan batasan minimum untuk tanah, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan tidak dibatasi berapapun besarnya.
- (7) Batasan ini hanya untuk perolehan awal aset tetap melalui pembelian aset tetap atau pembangunan baru yang tidak terkait dengan aset yang telah ada. Batas minimum kapitalisasi untuk peralatan dan mesin diatur sebagai berikut:

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	BATASAN KAPITALISASI
1	Alat-Alat Besar	Alat-alat Besar Darat	1.000.000
		Alat-alat Besar Apung	1.000.000
2	Alat-alat angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	500.000
		Alat Angkut Apung Bermotor	500.000
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	500.000
		Alat Angkut Bermotor Udara	500.000
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	300.000
		Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000
4	Alat Pertanian	Alat Ukur	300.000
		Alat Pengolahan	300.000
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	300.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	300.000
		Alat Rumah Tangga	300.000
		Peralatan Komputer	300.000





Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun  
 Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	300.000
		Alat Komunikasi	300.000
7	Alat-alat Kedokteran	Peralatan Pemancar	300.000
		Alat Kedokteran	300.000
8	Alat Laboratorium	Alat Kesehatan	300.000
		Unit-unit Laboratorium	300.000
		Alat Peraga/Peraktek Sekolah	300.000
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	300.000
		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	300.000
		Peralatn Laboratorium Hidrodinamika	300.000
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Senjata Api	300.000
		Persenjataan Non Senjata Api	300.000
		Amunisi	300.000
		Senjata Sinar	300.000
		Alat Keamanan dan Perlindungan	300.000

(8)) Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan dan rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut, maka ditetapkan masa manfaat dari masing-masing kelompok aset sebagai berikut:

NO	OBJEK BELANJA	KELOMPOK	MASA MANFAAT AWAL (TAHUN)
1	Alat-alat Besar	Alat-Alat Besar Darat	10
		Alat-Alat Besar Apung	8
		Alat-alat Bantu	7
2	Alat-alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
		Alat Angkut Apung Bermotor	10
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
		Alat Angkut Bermotor Udara	20
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	10
		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
		Alat Ukur	5
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	4
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	5
		Alat Rumah Tangga	5
		Peralatan Komputer	4
		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	5
		Alat Komunikasi	5
		Peralatan Pemancar	10



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun  
 Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran	5
		Alat Kesehatan	5
8	Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium	8
		Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
		Radiation Aplication and Non Destructive Testing	10
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
9	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	Senjata Api	10
		Persenjataan Non Senjata Api	3
		Amunisi	5
		Senjata Sinar	5
		Alat Keamanan dan Perlindungan	5
10	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
		Bangunan Menara	40
11	Monumen/Bangunan bersejarah	Bangunan Bersejarah	50
		Tugu Peringatan	50
		Candi	50
		Monomen/Bangunan Bersejarah	50
		Tugu Peringatan Lain	50
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
		Rambu-Rambu	50
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
12	Jalan dan Jembatan	Jalan	10
		Jembatan	50
13	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi	50
		Bangunan Air Pasang Surut	50
		Bangunan Air Rawa	25
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan	10
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air	30
		Bangunan Air Bersih/Baku	40
		Bangunan Air Kotor	40
		Bangunan Air	40
14	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
		Instalasi Air Kotor	30
		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
		Instalasi Pembangkit Listrik	40
		Instalasi Gardu Listrik	40
		Instalasi Pertahanan	30
		Instalasi Gas	30
15	Jaringan	Jaringan Air Minum	30
		Jaringan Listrik	40
		Jaringan Telepon	20
		Jaringan Gas	30
16	Buku dan perpustakaan	Buku	5
		Terbitan	5
		Barang-barang perpustakaan	5
17	Barang bercorak kebudayaan	Barang bercorak kebudayaan	5
		Alat olah raga lainnya	5

(9)) Dalam hal penentuan belanja renovasi yang dapat dikapitalisasi, Belanja renovasi /restorasi/overhaul yang dianggarkan dalam Pos Belanja Modal di Kapitalisasi dalam Aset Tetap dengan menambah Nilai Perolehan sesuai tahun



renovasi/restorasi/overhaul dan menambah masa manfaat, namun tidak dapat melebihi masa manfaat awal aset tetap yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Wajo.

- (10)) Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah bulan, maka digunakan pendekatan penyebulanan, yang artinya bulan perolehan aset tetap sebagai dasar perhitungan.
  - (11)) Dalam penerapan penyusutan tidak ditetapkan adanya nilai sisa/ Residu.  
Dalam hal nilai buku aset tetap telah habis dan kondisi aset tetap masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, maka aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tetap tersebut tetap dicatat dalam aset yang bersangkutan dan dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusan bukuan dari pejabat yang berwenang.
  - (12)) Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Suatu aset tetap tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir.
  - (13)) Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah:
    - ((1)) Dihilangkan
    - ((2)) Dipertukarkan dengan aset tetap lainnya
    - ((3)) Dijadikan Penyertaan Modal
    - ((4)) Dijual
    - ((5)) Dimusnahkan
  - (14)) Aset-aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.
- (7) Dana Cadangan
- (1)) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  - (2)) Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
  - (3)) Pembentukan Dana Cadangan



Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan yang diukur sebesar nilai nominal.

(4) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

(5) Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

(8) Aset Lainnya

(1) Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

((1)) Tagihan Jangka Panjang :

- Tagihan Penjualan Angsuran
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

((2)) Kemitraan dengan Pihak Ketiga :

- Sewa

((3)) Kerjasama Pemanfaatan :

- Bangun Guna Serah
- Bangun Serah Guna

((4)) Aset Tidak Berwujud :

- Goodwill
- Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
- Lisensi dan Frenchise
- Hak Cipta (Copyright), Paten dan Hak lainnya
- Aset Tidak Berwujud Lainnya

((5)) Aset Lain-lain :

- Aset Lain-Lain

(2) Tagihan Jangka Panjang

((1)) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat terjadi penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

((2)) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).

((3)) Kemitraan dengan Pihak Ketiga



((1)) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

((2)) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

((3)) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.

((4)) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Serah Guna diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

(4) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari :

((1)) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

((2)) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa

- biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah :

((1)) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.



((2)) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

((3)) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Amortisasi terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode seperti garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok aset tak berwujud.

(5) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai

### 3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Wajo.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Dalam neraca pemerintah kabupaten wajo, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka atas pendapatan pajak daerah, utang belanja atas beban pegawai dan barang jasa serta utang jangka pendek lainnya yang tidak termasuk bagian dari utang tersebut diatas:

(1) Kewajiban Jangka Pendek

(1) Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;

(2) Kewajiban jangka pendek terdiri atas bagian lancar utang jangka panjang dan perhitungan pihak ketiga;



- (3)) Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
  - (4)) Utang perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
  - (5)) Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
  - (6)) Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang perhitungan pihak ketiga yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
  - (7)) Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- (2) Kewajiban Jangka Panjang
- (1)) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
  - (2)) Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
  - (3)) Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;
  - (4)) Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
  - (5)) Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;
  - (6)) Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
  - (7)) Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- (3) Ekuitas

*Ekuitas* adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten wajo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

### 3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

*Entitas pelaporan* adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini BPKD selaku BUD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.



**Entitas akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

**Entitas akuntansi** dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

**Konsolidasi** adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

**Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas

**Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan pemerintah kabupaten wajo, Laporan Keuangan BLUD disusun dengan berbasis SAP.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

#### **3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan secara teknis dibantu dengan penggunaan sistem aplikasi SIMDA.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk TA 2018 telah menerapkan penyusutan dan kapitalisasi aset tetap secara komputerisasi dengan bantuan sistem SIMDA BMD sesuai keadaan aset tetap yang sesungguhnya untuk dapat menyajikan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2018 secara wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk TA 2018.





**BAB IV**  
**PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN**

**4.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

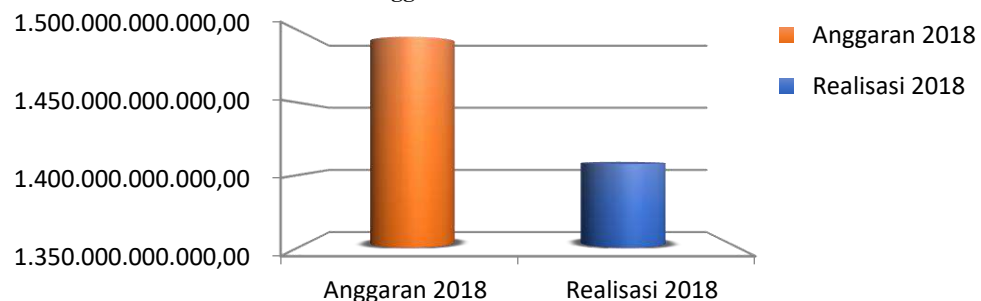
Penjelasan masing-masing Akun Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

**4.1.1 Pendapatan - LRA**

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp1.495.477.075.619,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp1.407.603.616.014,33 atau 94,12% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>158.486.345.674,00</b>	<b>134.000.960.863,33</b>	<b>84,55</b>	<b>177.730.310.816,13</b>
Pendapatan Pajak Daerah	35.154.313.826,00	34.622.288.206,50	98,49	31.992.173.514,75
Pendapatan Retribusi Daerah	14.772.350.000,00	11.084.758.817,20	75,04	14.701.940.129,91
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.384.000.000,00	14.144.241.966,00	91,94	15.383.403.123,82
Lain-lain PAD yang sah	93.175.681.848,00	74.149.671.873,63	79,58	115.652.794.047,65
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.285.488.910.778,00</b>	<b>1.225.595.524.572,00</b>	<b>95,34</b>	<b>1.289.205.525.611,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.096.294.232.356,00	1.047.331.470.105,00	95,53	1.108.701.941.740,00
<i>Dana Bagi Hasil Pajak</i>	51.295.512.356,00	29.327.922.838,00	57,17	75.330.381.088,00
<i>Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</i>	38.891.351.000,00	23.349.400.970,00	60,04	0,00
<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	714.224.148.000,00	714.224.148.000,00	100,00	710.492.759.000,00
<i>Dana Alokasi Khusus</i>	291.883.221.000,00	280.429.998.297,00	96,08	322.878.801.652,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	122.469.771.000,00	122.163.127.626,00	99,75	118.665.440.600,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan	66.724.907.422,00	56.100.926.841,00	84,08	60.735.688.871,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.102.454.400,00
<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>51.501.819.167,00</b>	<b>48.007.130.579,00</b>	<b>93,21</b>	<b>2.789.463.637,00</b>
Pendapatan Hibah	51.501.819.167,00	48.007.130.579,00	93,21	2.789.463.637,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.495.477.075.619,00</b>	<b>1.407.603.616.014,33</b>	<b>94,12</b>	<b>1.469.725.300.064,13</b>

**Grafik 4.1**  
**Perbandingan Komposisi Pendapatan**  
**Tahun Anggaran 2018**





Realisasi pencapaian target pendapatan sebesar Rp1.407.603.616.014,33 atau mengalami penurunan sebesar Rp-62.121.684.049,80 atau 94,12% dari target sebesar Rp1.495.477.075.619,00, hal ini disebabkan antara lain karena:

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp134.000.960.863,33 dari target sebesar Rp158.486.345.674,00 atau sebesar 84,55%;
- Realisasi Pendapatan Transfer Rp1.225.595.524.572,00 dari target sebesar Rp1.285.488.910.778,00 atau sebesar 95,34%
- Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp48.007.130.579,00 dari target pendapatan sebesar Rp51.501.819.167,00 atau sebesar 93,21%.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2017 sebesar Rp1.469.725.300.064,13, realisasi pendapatan TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp-62.121.684.049,80 sehingga realisasi pendapatan TA 2018 mencapai Rp1.407.603.616.014,33. Penurunan ini disebabkan antara lain karena:

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp-43.729.349.952,80 atau -24,60%.
- Realisasi Pendapatan Transfer TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp-63.610.001.039,00 atau -4,93%.
- Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp45.217.666.942,00 atau 1.621,02%.

#### 4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Target Pendapatan Asli Daerah TA 2018 sebesar Rp158.486.345.674,00 dan terealisasi sebesar Rp134.000.960.863,33 atau mencapai 84,55% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp177.730.310.816,13 mengalami penurunan sebesar Rp-43.729.349.952,80. Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Pendapatan Pajak Daerah	35.154.313.826,00	34.622.288.206,50	98,49	31.992.173.514,75
2 Pendapatan Retribusi Daerah	14.772.350.000,00	11.084.758.817,20	75,04	14.701.940.129,91
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.384.000.000,00	14.144.241.966,00	91,94	15.383.403.123,82
4 Lain-lain PAD yang sah	93.175.681.848,00	74.149.671.873,63	79,58	115.652.794.047,65
<b>Jumlah</b>	<b>158.486.345.674,00</b>	<b>134.000.960.863,33</b>	<b>84,55</b>	<b>177.730.310.816,13</b>

#### a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Wajo.

Target Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 sebesar Rp35.154.313.826,00 dan terealisasi sebesar Rp34.622.288.206,50 atau mencapai 98,49% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp31.992.173.514,75 mengalami kenaikan sebesar Rp2.630.114.691,75. Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pajak Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio	Realisasi 2017 ¶
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1 Pajak Hotel - LRA	160.000.000,00	162.508.045,00	101,57	180.154.500,00
2 Pajak Restoran - LRA	3.800.000.000,00	3.776.623.743,00	99,38	3.409.623.578,00
3 Pajak Hiburan - LRA	55.000.000,00	51.769.125,00	94,13	60.787.400,00
4 Pajak Reklame - LRA	1.400.000.000,00	1.493.338.912,00	106,67	1.321.884.274,25
5 Pajak Penerangan Jalan - LRA	14.030.313.826,00	13.256.839.136,00	94,49	11.804.483.552,00
6 Pajak Parkir - LRA	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
7 Pajak Air Tanah - LRA	4.000.000,00	5.069.812,00	126,75	5.126.396,00
8 Pajak Sarang Burung Walet - LRA	5.000.000,00	5.200.000,00	104,00	4.300.000,00
10 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	2.000.000.000,00	1.537.609.616,00	76,88	1.973.630.422,00
11 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	12.000.000.000,00	12.271.842.136,00	102,27	11.737.385.101,00
12 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	1.700.000.000,00	2.061.487.681,50	121,26	1.479.598.291,50
<b>Jumlah</b>	<b>35.154.313.826,00</b>	<b>34.622.288.206,50</b>	<b>98,49</b>	<b>31.992.173.514,75</b>

#### b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Target Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 sebesar Rp14.772.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.084.758.817,20 atau mencapai 75,04% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp14.701.940.129,91 mengalami penurunan sebesar Rp-3.617.181.312,71 Rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Retribusi Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
<b>1 Retribusi Jasa Umum</b>	<b>9.188.100.000,00</b>	<b>8.523.583.450,00</b>	<b>92,77</b>	<b>8.354.068.916,00</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	5.039.200.000,00	4.414.652.050,00	87,61	4.454.245.916,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	110.000.000,00	126.362.000,00	114,87	118.743.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	148.000.000,00	151.625.000,00	102,45	117.130.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	3.500.000.000,00	3.483.417.000,00	99,53	3.316.905.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -	110.000.000,00	110.275.000,00	100,25	99.675.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	50.000.000,00	37.510.000,00	75,02	31.820.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	50.000.000,00	55.242.400,00	110,48	0,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	180.900.000,00	144.500.000,00	79,88	215.550.000,00
<b>2 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.332.950.000,00</b>	<b>1.853.111.400,00</b>	<b>79,43</b>	<b>4.098.682.850,00</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.247.000.000,00	756.394.100,00	60,66	3.128.939.850,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	15.000.000,00	15.010.500,00	100,07	10.006.000,00
Retribusi Terminal - LRA	401.000.000,00	418.443.000,00	104,35	378.301.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	13.000.000,00	13.305.000,00	102,35	13.225.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	86.000.000,00	73.400.000,00	85,35	74.350.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA	501.000.000,00	501.285.800,00	100,06	424.745.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	69.950.000,00	75.273.000,00	107,61	69.116.000,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<b>3 Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>3.251.300.000,00</b>	<b>708.063.967,20</b>	<b>21,78</b>	<b>2.249.188.363,91</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	2.921.300.000,00	422.513.100,20	14,46	1.550.446.171,91
Retribusi Izin Gangguan - LRA	0,00	0,00	0,00	501.669.500,00
Retribusi Izin Trayek - LRA	70.000.000,00	8.050.000,00	11,50	8.400.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	260.000.000,00	277.500.867,00	106,73	188.672.692,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.772.350.000,00</b>	<b>11.084.758.817,20</b>	<b>75,04</b>	<b>14.701.940.129,91</b>

### c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang.

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2018 sebesar Rp15.384.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.144.241.966,00 atau mencapai 91,94% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp15.383.403.123,82 mengalami penurunan sebesar Rp-1.239.161.157,82.

Rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
PT. Bank Sulselbar	15.384.000.000,00	14.144.241.966,00	91,94	15.383.403.123,82
<b>Jumlah</b>	<b>15.384.000.000,00</b>	<b>14.144.241.966,00</b>	<b>91,94</b>	<b>15.383.403.123,82</b>

### d. Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Lamaddukkelleng, RSUD Siwa, Dinas Perikanan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Target Lain-lain PAD yang Sah TA 2018 sebesar Rp93.175.681.848,00 dan terealisasi sebesar Rp74.149.671.873,63 atau mencapai 79,58% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp115.652.794.047,65 mengalami penurunan sebesar Rp-41.503.122.174,02, rincian lain-lain PAD yang sah dapat dilihat sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>1 Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>7.442.064.153,00</b>	<b>3.048.688.508,00</b>	<b>40,97</b>	<b>3.537.881.376,00</b>
<b>2 Pendapatan Bunga Deposito</b>	<b>2.164.000.000,00</b>	<b>725.558.981,00</b>	<b>33,53</b>	<b>2.224.458.622,89</b>
<b>3 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>2.157.299.562,16</b>	<b>331,89</b>	<b>421.538.940,50</b>
<b>4 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>3.100.000.000,00</b>	<b>170.530.676,02</b>	<b>5,50</b>	<b>1.041.143.095,45</b>
<b>5 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan</b>	<b>56.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
a. Angsuran Cicilan/Penjualan Rumah	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Angsuran Cicilan/Penjualan Kendaraan	53.940.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
<b>6 Pendapatan dari BLUD</b>	<b>55.700.000.000,00</b>	<b>55.021.497.108,00</b>	<b>98,78</b>	<b>50.599.247.394,00</b>
<b>7 Lain-lain PAD yang sah lainnya</b>	<b>12.244.697.695,00</b>	<b>1.326.613.767,45</b>	<b>10,83</b>	<b>4.856.330.668,81</b>
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	12.164.697.695,00	1.245.713.767,45	10,24	4.776.256.568,81
Hasil Penjualan Benih Ikan Unggul	80.000.000,00	80.900.000,00	101,13	80.074.100,00
<b>8 Hasil dari pengelolaan dana bergulir</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000.000,00</b>
<b>9 Dana Kapitasi JKN dan FKTP</b>	<b>11.818.000.000,00</b>	<b>11.699.483.271,00</b>	<b>99,00</b>	<b>11.007.558.449,00</b>
<b>10 Pendapatan Dana BOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.930.135.501,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>93.175.681.848,00</b>	<b>74.149.671.873,63</b>	<b>79,58</b>	<b>115.652.794.047,65</b>



#### 4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Pada TA 2018, Pemerintah Kabupaten Wajo menganggarkan pendapatan transfer sebesar Rp1.285.488.910.778,00 dan terealisasi sebesar Rp1.225.595.524.572,00 atau mencapai 95,34% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.289.205.525.611,00 mengalami penurunan sebesar Rp-63.610.001.039,00, dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.096.294.232.356,00</b>	<b>1.047.331.470.105,00</b>	<b>95,53</b>	<b>1.108.701.941.740,00</b>
Bagi Hasil Pajak - LRA	51.295.512.356,00	29.327.922.838,00	57,17	75.330.381.088,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	38.891.351.000,00	23.349.400.970,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	714.224.148.000,00	714.224.148.000,00	100,00	710.492.759.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	291.883.221.000,00	280.429.998.297,00	96,08	322.878.801.652,00
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	<b>122.469.771.000,00</b>	<b>122.163.127.626,00</b>	<b>99,75</b>	<b>118.665.440.600,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	66.724.907.422,00	56.100.926.841,00	84,08	60.735.688.871,00
Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	1.102.454.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.285.488.910.778,00</b>	<b>1.225.595.524.572,00</b>	<b>95,34</b>	<b>1.289.205.525.611,00</b>

Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 87,07% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.407.603.616.014,33.

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pada TA 2018 penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp1.096.294.232.356,00 dan terealisasi sebesar Rp1.047.331.470.105,00 atau 95,53%. Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 74,41% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.407.603.616.014,33. Kelompok penerimaan ini terdiri dari:

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Dana Bagi Hasil Pajak	51.295.512.356,00	29.327.922.838,00	57,17%	75.330.381.088,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	38.891.351.000,00	23.349.400.970,00	60,04%	-
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	714.224.148.000,00	714.224.148.000,00	100,00%	710.492.759.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	291.883.221.000,00	280.429.998.297,00	96,08%	322.878.801.652,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.096.294.232.356,00</b>	<b>1.047.331.470.105,00</b>	<b>95,53%</b>	<b>1.108.701.941.740,00</b>

#### a. Dana Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Pusat

Dana Bagi hasil pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Pada TA 2018, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima dana bagi hasil pajak sebesar Rp29.327.922.838,00 atau 57,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.295.512.356,00.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp75.330.381.088,00 mengalami penurunan sebesar Rp-46.002.458.250,00 dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	28.443.802.232,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal	12.635.068.000,00	6.404.235.737,00	50,69	8.882.992.111,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	220.000.000,00	239.318.000,00	108,78	248.444.685,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dari Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagi Rata - LRA	38.440.444.356,00	22.684.369.101,00	59,01	37.755.142.060,00
<b>Jumlah</b>	<b>51.295.512.356,00</b>	<b>29.327.922.838,00</b>	<b>57,17</b>	<b>75.330.381.088,00</b>

**b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – Pemerintah Pusat**

Bagi hasil bukan pajak merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Pada TA 2018, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima dana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp23.349.400.970,00 atau 60,04% dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.349.400.970,00, rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)</b>				
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Air dan Batu Bara	5.083.258.000,00	2.776.510.783,00	54,62	0,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	2.443.027.000,00	701.234.591,00	28,70	0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan dari Hasil Kehutanan	13.965.000,00	25.990.896,00	186,11	0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	31.351.101.000,00	19.845.664.700,00	63,30	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>38.891.351.000,00</b>	<b>23.349.400.970,00</b>	<b>60,04</b>	<b>0,00</b>

**c. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merupakan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Wajo dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah. Pada TA 2018.

Pada TA 2018, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Alokasi Umum sebesar Rp714.224.148.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp714.224.148.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp710.492.759.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.731.389.000,00, rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU)	714.224.148.000,00	714.224.148.000,00	100,00	710.492.759.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>714.224.148.000,00</b>	<b>714.224.148.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>710.492.759.000,00</b>

**d. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus merupakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk membiayai kebutuhan khusus (specific grant).



*Pemerintah Kabupaten Wajo*  
*Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Pada TA 2018, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Alokasi Khusus Rp280.429.998.297,00 atau 96,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp291.883.221.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp322.878.801.652,00 mengalami penurunan sebesar Rp-42.448.803.355,00, rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>				
Bidang Pendidikan SD (DAK Reguler) - LRA	8.991.000.000,00	8.991.000.000,00	100,00	4.865.600.500,00
Bidang Pendidikan SMP (DAK Reguler) - LRA	9.029.552.000,00	9.029.552.000,00	100,00	2.503.200.000,00
Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	6.481.091.384,00
Bidang Pelayanan Rujukan Prioritas Daerah (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	25.750.000.000,00
Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	4.132.000.000,00
Bidang Keluarga Berencana (DAK Reguler) - LRA	1.049.000.000,00	0,00	0,00	1.266.443.000,00
Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK Reguler) - LRA	6.214.830.000,00	6.214.830.000,00	100,00	8.467.864.596,00
Bidang Pertanian (DAK Reguler) - LRA	5.255.000.000,00	4.811.320.020,00	91,56	6.986.473.000,00
Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Reguler) - LRA	1.546.000.000,00	1.443.298.000,00	93,36	2.437.086.000,00
Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK Reguler) - LRA	2.600.000.000,00	2.561.367.000,00	98,51	1.000.000.000,00
Bidang Penataan Kawasan Pariwisata (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	1.507.098.000,00
Bidang Prioritas Daerah - Jalan (DAK Penugasan) - LRA	0,00	0,00	0,00	90.985.609.000,00
Bidang Pasar (DAK Penugasan) - LRA	645.000.000,00	605.500.000,00	93,88	1.501.788.000,00
Bidang Pendukung Kedaulatan Pangan Irigasi (DAK Penugasan) - LRA	19.935.000.000,00	19.651.762.000,00	98,58	5.960.359.500,00
Penyelesaian DAK Fisik 2016	0,00	0,00	0,00	20.515.924.000,00
Bidang Air Minum dan Sanitasi (DAK Penugasan) - LRA	6.693.000.000,00	6.527.091.000,00	97,52	0,00
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK Penugasan) - LRA	742.000.000,00	708.855.000,00	95,53	0,00
Bidang Kesehatan (DAK Reguler) - LRA	30.568.000.000,00	30.996.983.541,00	101,40	0,00
Bidang Air Minum (DAK Reguler) - LRA	1.147.000.000,00	1.126.940.000,00	98,25	0,00
Bidang Pariwisata (DAK Reguler) - LRA	1.802.000.000,00	1.782.686.900,00	98,93	0,00
Bidang Jalan - Prioritas Daerah (DAK Reguler) - LRA	39.801.000.000,00	36.951.668.165,00	92,84	0,00
<b>2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>				
Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ( Pendidikan) - LRA	7.755.000.000,00	7.134.600.000,00	92,00	7.857.000.000,00
Bidang Tunjangan Profesi Guru (Pendidikan) - LRA	124.231.874.000,00	120.123.660.630,00	96,69	114.144.092.075,00
Bidang Tambahan Penghasilan Guru (Pendidikan) - LRA	1.113.000.000,00	789.900.000,00	70,97	1.364.250.000,00
Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (Bantuan Operasional Kesehatan & Bantuan Operasional KB) - LRA	14.250.012.000,00	12.550.020.601,00	88,07	11.726.364.347,00
Bidang Akreditasi Puskesmas (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LRA	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	100,00	665.695.000,00
Bidang Jaminan Persalinan (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LRA	1.496.145.000,00	1.496.145.000,00	100,00	699.590.250,00



*Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Bidang Bantuan Operasional KB (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LRA	3.877.740.000,00	3.794.527.300,00	97,85	785.757.000,00
Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	1.391.068.000,00	1.388.291.140,00	99,80	1.275.516.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>291.883.221.000,00</b>	<b>280.429.998.297,00</b>	<b>96,08</b>	<b>322.878.801.652,00</b>

**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

Pada TA 2018 penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yaitu Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp122.469.771.000,00 dan terealisasi sebesar Rp122.163.127.626,00 atau 99,75%. Sehingga memberikan kontribusi sebesar 8,68% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.407.603.616.014,33.

**e. Dana Penyesuaian**

Pada TA 2018, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Penyesuaian berupa Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID) yang terealisasi sebesar Rp122.163.127.626,00 atau 99,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp122.469.771.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp118.665.440.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.497.687.026,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan - Dana Penyesuaian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Dana Untuk Desa	122.469.771.000,00	122.163.127.626,00	99,75	118.665.440.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>122.469.771.000,00</b>	<b>122.163.127.626,00</b>	<b>99,75</b>	<b>118.665.440.600,00</b>

**Transfer Pemerintah Provinsi**

Pada TA 2018 penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dianggarkan sebesar Rp66.724.907.422,00 dan terealisasi sebesar Rp56.100.926.841,00 atau 84,08%. Sehingga memberikan kontribusi sebesar 3,99% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.407.603.616.014,33.

**f. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah - Pemerintah Provinsi**

Bagi hasil pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada TA 2018, jumlah bagi hasil pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Wajo seluruhnya sejumlah Rp56.100.926.841,00 atau 84,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.724.907.422,00, Dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp60.735.688.871,00 mengalami penurunan sebesar Rp-4.634.762.030,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil Pajak - Pemerintah Provinsi	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	16.619.334.566,60	12.985.227.194,00	78,13	13.816.765.812,00
2 Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	16.710.009.473,40	9.554.716.342,00	57,18	11.936.246.163,00
3 Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	16.245.563.382,00	16.602.692.555,00	102,20	17.593.435.334,00
4 Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air	150.000.000,00	94.723.814,00	63,15	144.868.567,00
5 Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	17.000.000.000,00	16.863.566.936,00	99,20	17.244.372.995,00
<b>Jumlah</b>	<b>66.724.907.422,00</b>	<b>56.100.926.841,00</b>	<b>84,08</b>	<b>60.735.688.871,00</b>

**Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya**

Penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi





#### g. Bantuan Keuangan - Pemerintah Provinsi

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada TA 2018, Bantuan Keuangan dari Provinsi disajikan sebagai Lain-lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Hibah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Lampiran I.03 PSAP 02 tentang LRA Berbasis Kas. Sedangkan pada TA 2017 disajikan sebagai Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya – Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dengan rincian pada table berikut.

Bantuan Keuangan Dari Provinsi	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Program Kesehatan Gratis	0,00	0,00	0,00	1.102.454.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.454.400,00</b>

#### 4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada TA 2018 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp51.501.819.167,00 dari anggaran sebesar Rp93,21 atau mencapai 48.007.130.579,00% dari anggaran, seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Wajo dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Hibah	APBD-P	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
<b>1. Dari Pemerintah Pusat</b>	<b>48.189.819.167,00</b>	<b>44.052.471.988,00</b>	<b>91,41</b>	<b>2.789.463.637,00</b>
a. Hibah <i>Nationwide Water Program</i> (Air Minum)	7.924.394.000,00	2.697.000.000,00		1.704.000.000,00
b. <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i> (IPDMIP)		382.045.232,00		1.085.463.637,00
c. Pendapatan Hibah Dana BOS Satdik SD	28.462.439.518,00	28.443.276.756,00		0,00
d. Pendapatan Hibah Dana BOS Satdik SMP	11.802.985.649,00	12.530.150.000,00		0,00
<b>2. Dari Pemerintah Provinsi</b>	<b>3.312.000.000,00</b>	<b>3.954.658.591,00</b>	<b>119,40</b>	<b>0,00</b>
a. Kesehatan Gratis		2.954.658.591,00		0,00
b. Penerangan Jalan Umum (PJU)		1.000.000.000,00		0,00
<b>Jumlah</b>	<b>51.501.819.167,00</b>	<b>48.007.130.579,00</b>	<b>93,21</b>	<b>2.789.463.637,00</b>

Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 3,41% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.407.603.616.014,33.

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah sebesar Rp44.052.471.988,00 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat berupa dana IPDMIP dengan Nomor , PDAM, dan Dana BOS berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo untuk Hibah dalam rangka Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu dengan Nomor PHD-078/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018 dan



Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum untuk mendorong percepatan target akses air minum Indonesia 100% pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Wajo Tahun 2018 Nomor 2 Tahun 2018 serta Naskah Perjanjian Hibah BOS dalam rangka membebaskan siswa dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun dan meringankan beban biaya operasional dengan Nomor 903/1435/P.FAS.2/DISDIK dan Nomor 097/585.a/Disdikbud tanggal 21 Februari 2018.

- b. Pendapatan Hibah sebesar Rp3.954.658.591,00 merupakan penerimaan atas Bantuan Keuangan dari Provinsi, dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Dana Kesehatan Grastis sebesar Rp2.954.658.591,00 merupakan bantuan pembayaran iuran BPJS peserta penerima biaya iuran lokal pelayanan kesehatan gratis dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK Gubernur Nomor 1448/IV/Tahun 2018, Nomor 2110/VII/Tahun 2018, Nomor 2739/X/Tahun 2018, dan Nomor 3126/XI/Tahun 2018;
  - 2) Bantuan keuangan sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2962/XI/TAHUN 2018

Pada TA 2018, Bantuan Keuangan dari Provinsi disajikan sebagai Lain-lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Hibah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Lampiran I.03 PSAP 02 tentang LRA Berbasis Kas. Sedangkan pada TA 2017 disajikan sebagai Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya – Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

#### 4.1.2 Belanja

Pada Tahun 2018, Realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp1.198.701.815.095,47 yaitu 92,76% dari anggaran sebesar Rp1.292.330.332.010,50 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Daerah per unit organisasi (OPD) dapat dilihat dibawah ini:

SKPD	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	310.372.223.770,00	298.797.831.003,00	96,27
2 Dinas Kesehatan	112.210.174.685,00	104.031.838.468,64	92,71
3 Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	78.482.105.246,00	75.269.856.786,53	95,91
4 Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	19.464.253.732,00	18.910.503.991,00	97,16
5 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang	121.331.691.122,00	99.003.066.374,00	81,60
6 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	37.348.150.556,00	30.051.540.897,00	80,46
7 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	16.167.753.338,00	13.804.182.802,00	85,38
8 Satuan Polisi Pamong Praja	7.879.767.967,00	7.800.135.033,00	98,99
9 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	5.788.669.191,00	5.602.103.441,00	96,78
10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.560.106.359,00	4.527.480.836,00	99,28
11 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.590.056.488,00	4.515.425.076,00	98,37
12 Dinas Sosial	4.676.991.302,00	4.620.990.669,00	98,80
13 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9.446.620.439,00	8.598.363.943,00	91,02



*Pemerintah Kabupaten Wajo*  
*Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

14 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.123.991.833,00	3.072.496.231,00	98,35
15 Dinas Ketahanan Pangan	6.737.081.724,00	5.423.116.726,00	80,50
16 Dinas Lingkungan Hidup	9.337.220.873,00	9.207.999.062,00	98,62
17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.328.016.807,00	6.261.538.018,00	98,95
18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.786.887.452,00	5.582.681.972,00	96,47
19 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.362.414.848,00	8.575.832.262,00	91,60
20 Dinas Perhubungan	9.785.820.123,00	9.160.912.954,00	93,61
21 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	5.172.623.041,00	5.044.305.939,00	97,52
22 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.789.473.872,00	3.754.854.810,00	99,09
23 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.981.594.466,00	4.429.967.239,00	88,93
24 Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.771.364.947,00	5.669.022.169,00	98,23
25 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.138.115.312,00	3.904.288.039,00	94,35
26 Dinas Perikanan	8.826.054.994,00	7.816.758.805,00	88,56
27 Dinas Pariwisata	6.305.584.749,00	6.246.304.707,00	99,06
28 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	29.491.660.525,00	24.971.017.955,00	84,67
29 Dinas Perkebunan	4.944.033.217,00	4.736.032.651,00	95,79
30 Dinas Perdagangan	16.701.977.970,00	11.415.600.374,00	68,35
31 Dinas Perindustrian	6.765.422.403,00	6.498.359.141,00	96,05
32 Bupati/Wakil Bupati	766.392.680,00	690.624.678,00	90,11
33 Sekretariat Daerah	40.280.228.002,00	39.013.150.828,00	96,85
34 Sekretariat DPRD	44.167.012.818,00	41.199.041.148,00	93,28
35 Kecamatan Tempe	35.228.056.074,00	34.947.826.428,00	99,20
36 Kecamatan Sabbangparu	16.900.401.215,00	16.644.394.907,00	98,49
37 Kecamatan Pammana	17.120.494.828,00	16.810.817.755,00	98,19
38 Kecamatan Bola	9.219.142.540,00	9.093.600.490,00	98,64
39 Kecamatan Takkalalla	9.001.833.295,00	8.795.763.049,00	97,71
40 Kecamatan Sajoanging	9.262.601.403,00	9.174.218.916,00	99,05
41 Kecamatan Majauleng	17.695.340.801,00	17.352.169.245,00	98,06
42 Kecamatan Tanasitolo	19.329.685.461,00	19.195.969.405,00	99,31
43 Kecamatan Belawa	13.311.847.290,00	12.761.650.125,00	95,87
44 Kecamatan Maniangpajo	11.343.633.844,00	11.188.983.007,00	98,64
45 Kecamatan Keera	7.801.007.082,00	7.590.953.194,00	97,31
46 Kecamatan Pitumpanua	14.323.962.188,00	14.018.061.267,00	97,86
47 Kecamatan Penrang	7.647.163.382,00	7.489.670.322,00	97,94
48 Kecamatan Gilireng	7.192.693.281,00	7.055.196.143,00	98,09
49 Inspektorat Daerah	7.953.125.481,00	7.814.316.462,00	98,25
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.562.022.514,00	10.409.980.492,00	90,04
51 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	23.405.797.086,50	22.292.432.495,30	95,24
52 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD)	64.218.032.850,00	54.382.543.044,00	84,68
53 Badan Pendapatan Daerah	12.744.727.983,00	12.087.097.565,00	94,84
54 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.691.727.485,00	8.256.476.812,00	94,99
55 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.495.499.076,00	3.132.468.944,00	89,61
<b>Jumlah</b>	<b>1.292.330.332.010,50</b>	<b>1.198.701.815.095,47</b>	<b>92,76</b>



**Grafik 4.2**  
**Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah**  
**per Unit Organisasi**  
**Tahun 2018**



Berdasarkan realisasi belanja menurut OPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD dengan realisasi belanja tertinggi yaitu sebesar Rp298.797.831.003,00 atau 24,93% dari total realisasi Belanja. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan OPD dengan realisasi terendah yaitu sebesar Rp3.072.496.231,00 atau 0,26% dari total realisasi Belanja TA 2018.

Realisasi Belanja Daerah per fungsi dapat dilihat dibawah ini :

Belanja Per Fungsi	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio
	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>PELAYANAN UMUM</b>			
Pangan	6.689.631.724,00	5.375.666.726,00	80,36
Komunikasi dan Informatika	6.149.223.041,00	5.993.935.599,00	97,47
Statistik	68.500.000,00	65.789.800,00	96,04
Kearsipan	271.220.000,00	268.865.000,00	99,13
Administrasi Pemerintahan	267.126.972.210,00	260.049.362.002,00	97,35
Pengawasan	7.933.125.481,00	7.794.318.462,00	98,25
Perencanaan	14.745.292.814,00	13.412.866.119,00	90,96
Keuangan	100.785.095.619,50	89.162.176.809,30	88,47
Kepegawaian	8.672.152.485,00	8.236.901.812,00	94,98
Penelitian dan Pengembangan	3.435.949.076,00	3.132.468.944,00	91,17
<b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>			
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	21.570.953.505,00	21.212.893.686,00	98,34
<b>EKONOMI</b>			
Tenaga Kerja	5.826.498.039,00	5.626.508.943,00	96,57
Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.679.037.735,00	9.284.531.300,00	95,92
Perhubungan	9.710.620.123,00	9.091.217.454,00	93,62
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.221.740.372,00	4.175.747.110,00	98,91
Penanaman Modal	5.128.044.466,00	4.620.729.660,00	90,11
Kelautan dan Perikanan	8.708.384.994,00	7.699.358.605,00	88,41
Pertanian	34.309.697.242,00	29.581.953.106,00	86,22
Energi dan Sumberdaya Mineral	6.161.018.400,00	4.854.530.685,00	78,79
Perdagangan	16.166.782.970,00	10.880.405.374,00	67,30
Perindustrian	6.735.422.403,00	6.468.359.141,00	96,03
Transmigrasi	3.570.122.400,00	2.923.106.000,00	81,88
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
Pertanahan	2.753.970.000,00	2.443.874.150,00	88,74

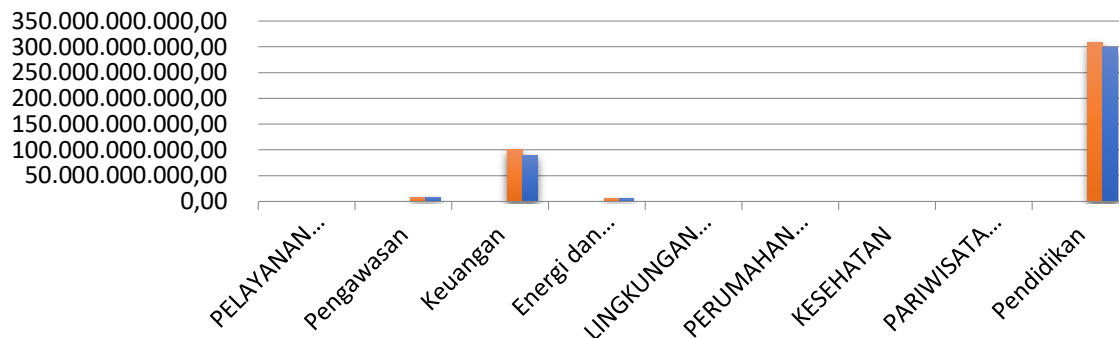


Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lingkungan Hidup	10.526.927.018,00	10.356.250.862,00	98,38
<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>			
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	159.649.224.678,00	129.985.402.747,00	81,42
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.882.044.938,00	8.103.489.967,00	91,23
<b>KESEHATAN</b>			
Kesehatan	210.394.048.663,00	198.428.099.246,17	94,31
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.350.739.848,00	8.564.157.262,00	91,59
<b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>			
Kebudayaan	1.183.700.000,00	932.915.250,00	78,81
Pariwisata	6.290.584.749,00	6.236.304.707,00	99,14
<b>PENDIDIKAN</b>			
Pendidikan	309.132.523.770,00	297.834.241.753,00	96,35
Kepemudaan dan Olah Raga	5.968.177.447,00	5.856.840.169,00	akunt
Perpustakaan	3.854.320.312,00	3.622.848.039,00	93,99
<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>			
Sosial	5.404.736.848,00	5.310.346.765,00	98,25
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.992.281.833,00	3.927.533.823,00	98,38
Administrasi Kependudukan dan Capil	7.281.566.807,00	7.187.818.018,00	98,71
<b>Jumlah</b>	<b>1.292.330.332.010,50</b>	<b>1.198.701.815.095,47</b>	<b>92,76</b>

Grafik 4.3

Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah per Fungsi 2018

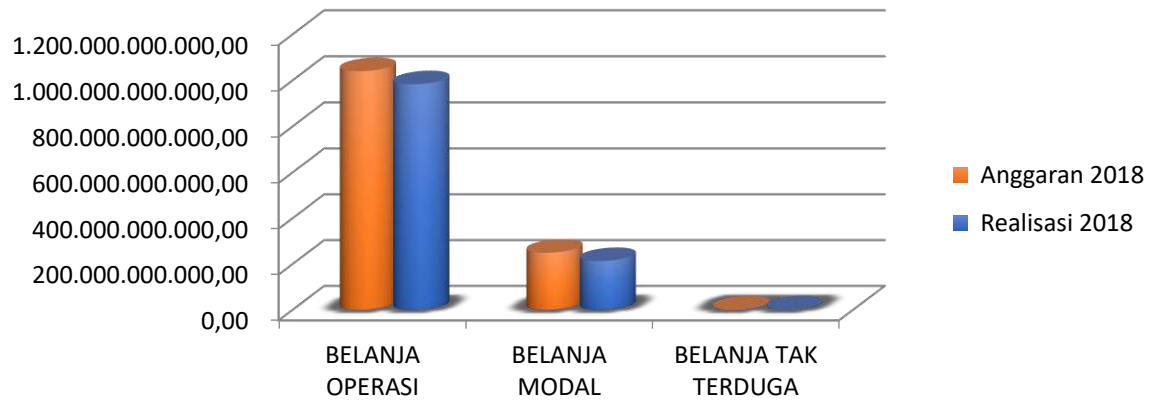


Uraian di bawah ini belanja akan dijelaskan berdasarkan struktur belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

BELANJA	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.040.356.707.169,50</b>	<b>983.407.147.403,25</b>	<b>94,53</b>	<b>956.516.570.042,18</b>
Belanja Pegawai	604.700.544.100,50	588.884.977.023,30	97,38	540.842.389.359,00
Belanja Barang dan Jasa	352.509.125.567,00	326.639.488.005,95	92,66	360.168.263.635,64
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	16.439.758,94
Belanja Hibah	76.987.037.502,00	61.848.682.374,00	80,34	55.449.752.288,60
Belanja Bantuan Sosial	6.160.000.000,00	6.034.000.000,00	97,95	39.725.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>249.715.673.241,00</b>	<b>213.370.399.448,22</b>	<b>85,45</b>	<b>370.850.927.060,90</b>
Belanja Modal Tanah	2.235.000.000,00	2.024.699.450,00	90,59	6.472.251.640,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.553.254.601,00	41.578.959.148,22	93,32	73.783.098.858,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.056.448.650,00	49.438.813.425,00	88,19	65.040.309.120,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.751.824.478,00	110.854.446.191,00	81,06	212.275.029.805,91
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.119.145.512,00	9.473.481.234,00	93,62	13.260.238.636,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.999.000,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>2.257.951.600,00</b>	<b>1.924.268.244,00</b>	<b>85,22</b>	<b>1.674.586.960,90</b>
Belanja Tak Terduga	2.257.951.600,00	1.924.268.244,00	85,22	1.674.586.960,90
<b>Jumlah</b>	<b>1.292.330.332.010,50</b>	<b>1.198.701.815.095,47</b>	<b>92,76</b>	<b>1.329.042.084.063,98</b>



Grafik 4.4  
 Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah



Untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Hibah senilai Rp61.848.682.374,00 terdiri dari belanja hibah berupa uang senilai Rp46.424.274.800,00 (rincian dapat dilihat pada Lampiran 15a) dan berupa barang yang tersebar di beberapa SKPD senilai Rp15.424.407.574,00 (rincian dapat dilihat pada Lampiran 15C)
2. Belanja Bantuan Sosial senilai Rp6.034.000.000,00 terdiri dari belanja Bantuan Sosial berupa uang senilai Rp6.034.000.000,00 (rincian dapat dilihat pada Lampiran 15B) sedangkan belanja bantuan sosial berupa barang pada TA 2018 tidak dianggarkan.

#### 4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang terkait dengan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi pada TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.040.356.707.169,50 dan terealisasi sebesar Rp983.407.147.403,25 atau mencapai 94,53% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp956.516.570.042,18 mengalami kenaikan sebesar Rp26.890.577.361,07, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Operasi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Pegawai	604.700.544.100,50	588.884.977.023,30	97,38	540.842.389.359,00
Belanja Barang dan Jasa	352.509.125.567,00	326.639.488.005,95	92,66	360.168.263.635,64
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	16.439.758,94
Belanja Hibah	76.987.037.502,00	61.848.682.374,00	80,34	55.449.752.288,60
Belanja Bantuan Sosial	6.160.000.000,00	6.034.000.000,00	97,95	39.725.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.040.356.707.169,50</b>	<b>983.407.147.403,25</b>	<b>94,53</b>	<b>956.516.570.042,18</b>

##### a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2018 yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp604.700.544.100,50 dan terealisasi sebesar Rp588.884.977.023,30 atau mencapai 97,38%, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp540.842.389.359,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.042.587.664,30, dengan perincian pada tabel berikut:



*Pemerintah Kabupaten Wajo*  
*Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Belanja Pegawai	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1 Belanja Gaji dan Tunjangan	415.729.383.569,50	410.589.951.545,00	98,76	410.186.531.399,00
2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS	185.938.137.340,00	175.641.890.206,30	94,46	123.952.360.500,00
3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	732.600.050,00	91,39	3.015.760.000,00
4 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.757.715.691,00	1.487.382.422,00	84,62	1.407.570.463,00
5 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	593.873.197,00
6 Belanja Uang Lembur	473.707.500,00	433.152.800,00	91,44	1.686.293.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>604.700.544.100,50</b>	<b>588.884.977.023,30</b>	<b>97,38</b>	<b>540.842.389.359,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 tersebut tidak termasuk realisasi Belanja Honorarium PNS dan Belanja Honorarium Non PNS yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dikonversi ke Belanja Barang dan Jasa.

**b. Belanja Barang Dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2018 yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp352.509.125.567,00 dan terealisasi sebesar Rp326.639.488.005,95 atau mencapai 92,66%, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp360.168.263.635,64 mengalami penurunan Sebesar Rp-33.528.775.629,69, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1 Belanja Bahan Pakai Habis	16.437.611.915,00	15.028.911.524,00	91,43	13.807.375.576,00
2 Belanja Bahan/Material	11.263.538.346,00	10.503.809.963,47	93,25	19.650.059.999,12
3 Belanja Jasa Kantor	21.693.317.941,00	20.627.797.433,00	95,09	20.750.767.667,00
4 Belanja Premi Asuransi	8.703.254.650,00	7.040.293.554,00	80,89	2.909.396.210,00
5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.624.105.757,00	4.923.374.821,00	87,54	5.978.221.122,00
6 Belanja Cetak dan Penggandaan	9.919.580.847,00	9.052.877.049,00	91,26	9.444.211.227,00
7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.083.403.000,00	1.607.015.450,00	77,13	2.362.305.682,00
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	521.795.546,00	445.052.528,00	85,29	548.350.000,00
9 Belanja Sewa Alat Berat	29.500.000,00	28.500.000,00	96,61	25.000.000,00
10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	583.885.000,00	545.148.350,00	93,37	535.380.000,00
11 Belanja Makanan dan Minuman	25.716.509.981,00	24.107.632.810,00	93,74	23.670.331.114,00
12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	697.300.000,00	686.309.000,00	98,42	1.752.695.250,00
13 Belanja Pakaian Kerja	295.106.000,00	211.806.000,00	71,77	514.221.000,00
14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.670.798.700,00	1.519.434.100,00	90,94	2.226.383.200,00
15 Belanja Perjalanan Dinas	73.934.996.199,00	68.644.648.712,00	92,84	76.385.246.316,00
16 Belanja Pemeliharaan	12.396.923.265,00	9.477.752.026,00	76,45	14.163.572.781,00
17 Belanja Jasa Konsultansi	3.441.016.000,00	2.116.939.740,00	61,52	4.800.172.400,00
18 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	198.300.000,00
19 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	13.437.186.185,00	12.952.014.805,00	96,39	14.732.764.000,00
20 Belanja Honorarium Non Pegawai	21.050.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
21 Belanja Honorarium PNS	461.550.000,00	446.950.000,00	96,84	20.751.108.525,00
22 Belanja Honorarium Non PNS	29.235.325.000,00	25.846.851.384,00	88,41	18.463.905.781,00
23 Belanja Honorarium Pengelola Dana Bos	8.996.035.790,00	8.664.288.750,00	96,31	8.016.547.800,00
24 Belanja Barang Dana Bos	22.162.130.435,00	23.246.655.238,00	104,89	23.622.857.758,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	14.410.999.810,00	12.568.954.748,95	87,22	12.197.607.905,10
26 Belanja Jasa Profesi	9.104.647.500,00	8.195.361.000,00	90,01	8.820.986.731,00
27 Belanja Jasa Petugas Persampahan	5.007.792.700,00	4.880.457.000,00	97,46	5.788.353.500,00
28 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Cendramata	1.399.765.000,00	1.203.728.000,00	86,00	1.395.178.500,00
29 Belanja Honorarium Pegawai BLUD	6.950.000.000,00	4.281.928.320,00	61,61	7.717.580.961,00
30 Belanja Barang Jasa BLUD	46.200.000.000,00	47.674.995.699,53	103,19	38.923.782.630,42
<b>Jumlah</b>	<b>352.509.125.567,00</b>	<b>326.639.488.005,95</b>	<b>92,66</b>	<b>360.168.263.635,64</b>

- 1). Termasuk realisasi Belanja Honorarium PNS dan Belanja Honorarium Non PNS yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dikonversi ke Belanja Barang dan Jasa;
- 2). Tidak termasuk realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp15.424.407.574,00 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dikonversi ke Belanja Bantuan Hibah.

#### c. Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk pembayaran bunga pinjaman kepada pemerintah pusat pada TA 2018 yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp,00 terealisasi sebesar Rp,00 atau mencapai ,00%, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp16.439.758,94 mengalami penurunan Sebesar Rp-16.439.758,94, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Bunga	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Bunga Utang Pinjaman	0,00	0,00	0,00	16.439.758,94
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.439.758,94</b>

#### d. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Belanja Hibah dibagi menjadi Hibah berupa uang dan hibah barang dan jasa. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah. Hibah berupa barang dan jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Khusus realisasi hibah barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dengan format konversi dan pengungkapan berpedoman pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2018 dianggarkan sebesar Rp76.987.037.502,00 dan terealisasi sebesar Rp61.848.682.374,00 atau mencapai 80,34%, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp55.449.752.288,60 mengalami kenaikan Sebesar Rp6.398.930.085,40, dengan perincian pada tabel berikut:

Rincian belanja hibah dapat dilihat pada lampiran 15





Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Hibah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	27.022.312.000,00
2 Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.186.956.252,00	15.424.407.574,00	72,80	28.427.440.288,60
3 Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat	2.507.062.000,00	2.478.665.679,00	98,87	0,00
4 Belanja Hibah Keagamaan	3.681.705.000,00	3.536.705.000,00	96,06	0,00
5 Belanja Hibah kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia dini (DAK Non Fisik BOP PAUD)	7.485.600.000,00	7.486.200.000,00	100,01	0,00
6 Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal	42.125.714.250,00	32.922.704.121,00	78,15	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>76.987.037.502,00</b>	<b>61.848.682.374,00</b>	<b>80,34</b>	<b>55.449.752.288,60</b>

**e. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada anggota masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Belanja Bantuan Sosial dibagi menjadi Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dan jasa. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. Khusus realisasi bantuan sosial barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dengan format konversi dan pengungkapan berpedoman pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2018 dianggarkan sebesar Rp6.160.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.034.000.000,00 atau mencapai 97,95%, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp956.516.570.042,18 mengalami kenaikan sebesar Rp5.994.275.000,00, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	6.160.000.000,00	6.034.000.000,00	97,95	39.725.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.160.000.000,00</b>	<b>6.034.000.000,00</b>	<b>97,95</b>	<b>39.725.000,00</b>

**4.1.2.2 Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Modal pada TA 2018 dianggarkan sebesar Rp249.715.673.241,00 dan terealisasi sebesar Rp213.370.399.448,22 atau mencapai 85,45% dari anggaran, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp370.850.927.060,90 mengalami penurunan sebesar Rp-157.480.527.612,68, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikelompokkan kedalam beberapa jenis Belanja Aset yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yang akan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset TA 2018.

Secara sistematis anggaran Belanja Modal TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Belanja Modal Tanah	2.235.000.000,00	2.024.699.450,00	90,59	6.472.251.640,00
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.553.254.601,00	41.578.959.148,22	93,32	73.783.098.858,99
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.056.448.650,00	49.438.813.425,00	88,19	65.040.309.120,00
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan	136.751.824.478,00	110.854.446.191,00	81,06	212.275.029.805,91
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.119.145.512,00	9.473.481.234,00	93,62	13.260.238.636,00
6 Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.999.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>249.715.673.241,00</b>	<b>213.370.399.448,22</b>	<b>85,45</b>	<b>370.850.927.060,90</b>

**a. Belanja Tanah**

Belanja Tanah TA 2018 yang dianggarkan sebesar Rp2.235.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.024.699.450,00 atau mencapai 90,59%, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp6.472.251.640,00 mengalami penurunan sebesar Rp-4.447.552.190,00, Realisasi tersebut berupa belanja tanah untuk Bangunan Gedung dengan rincian pada tabel berikut:

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00	0,00	0,00	398.427.050,00
2 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.235.000.000,00	2.024.699.450,00	90,59	4.302.970.390,00
3 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	1.770.854.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.235.000.000,00</b>	<b>2.024.699.450,00</b>	<b>90,59</b>	<b>6.472.251.640,00</b>

Belanja Modal Tanah TA 2018 tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut:

- 1). Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa sebesar Rp1.524.999.450,00 untuk membiayai ganti rugi / pelepasan hak atas tanah an. Hj. Andi Hasirah dan atau Ahli Warisnya yang berlokasi/terletak di Jalan Rusa, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kab.Wajo dengan luas 1.500 M<sup>2</sup> berdasarkan bukti sertifikat Nomor: 530 untuk pembangunan gedung kantor Badan Pendapatan Daerah Kab.Wajo dengan rincian biaya yang ada pada table berikut:

No	Uraian	Realisasi 2018
1.	Biaya Appraisal	22.900.000,00
2.	Biaya Ganti Rugi / Pelepasan Hak Atas Tanah	1.500.000.000,00
3.	Biaya Administrasi	2.099.450,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.524.999.450,00</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2). Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan jalan dan jembatan sebesar Rp499.700.000,00 untuk membiayai ganti rugi / pelepasan hak atas tanah yang berlokasi/terletak di jalan Bau Munawwarah Kel. Tempe Kec. Tempe Kab.Wajo, untuk pembangunan jalan setapak dengan rincian dan atas nama yang terdapat pada tabel berikut:

No	Uraian	Realisasi 2018
1.	An. Coma Hj. Benawa Luas Tanah : 202 M <sup>2</sup> Nomor Sertipikat : 561	383.800.000,00
2.	An. Heriyadi Umar Luas Tanah : 61 M <sup>2</sup> Nomor Sertipikat : 02138	115.900.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>499.700.000,00</b>

Atas belanja modal tanah tersebut telah dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Tanah pada Laporan BMD per 31 Desember 2018.

**b. Belanja Peralatan Dan Mesin**

Belanja Peralatan dan Mesin TA 2018 dianggarkan sebesar Rp44.553.254.601,00 dan terealisasi sebesar Rp41.578.959.148,22 atau mencapai 93,32% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap peralatan dan mesin, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp73.783.098.858,99 mengalami penurunan Sebesar Rp-32.204.139.710,77 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	41.980.000,00	17.250.000,00	41,09	14.976.500,00
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	2.912.500.000,00	2.905.350.000,00	99,75	0,00
3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat	6.258.325.500,00	5.494.056.520,00	87,79	9.416.271.350,00
4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	212.000.000,00
5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	137.750.000,00	127.999.200,00	92,92	394.568.000,00
7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	162.680.000,00
8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	573.340.000,00	488.367.000,00	85,18	320.082.000,00
9 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	29.465.576,00
10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	128.900.000,00	128.760.000,00	99,89	243.000.000,00
11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.955.246.090,00	2.733.690.969,00	92,50	2.373.563.173,00
12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.508.852.000,00	14.184.524.390,00	97,76	7.400.975.847,00
13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.306.074.700,00	2.805.012.400,00	84,84	7.822.389.708,00



*Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	380.803.000,00	302.641.643,00	79,47	2.092.428.340,00
15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	452.829.500,00	418.215.000,00	92,36	720.214.496,00
16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	418.927.000,00	98.889.000,00	23,61	211.080.000,00
17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	5.551.539.381,00	5.460.385.558,22	98,36	17.083.239.563,99
19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	40.000.000,00	139.546.359,00	348,87	918.635.665,00
20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	4.472.872.000,00	4.150.414.104,00	92,79	3.813.630.000,00
21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	200.000.000,00	0,00	0,00	3.495.129.500,00
22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	14.591.820.000,00
23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	193.365.000,00
24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.740.871.430,00	1.677.205.505,00	96,34	1.567.611.140,00
25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api	0,00	0,00	0,00	236.500.000,00
26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata	0,00	0,00	0,00	113.448.000,00
27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	472.444.000,00	446.651.500,00	94,54	345.925.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>44.553.254.601,00</b>	<b>41.578.959.148,22</b>	<b>93,32</b>	<b>73.783.098.858,99</b>

**c. Belanja Gedung dan Bangunan**

Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp56.056.448.650,00 dan terealisasi sebesar Rp49.438.813.425,00 atau mencapai 88,19% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap gedung dan bangunan, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp65.040.309.120,00 mengalami penurunan sebesar Rp-15.601.495.695,00 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Gedung Dan Bangunan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	53.661.562.300,00	47.063.871.175,00	87,70	59.555.453.170,00
2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	228.886.350,00	228.731.350,00	99,93	3.193.402.950,00
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.802.000.000,00	1.782.686.900,00	98,93	1.917.058.000,00
4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	74.395.000,00
5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	364.000.000,00	363.524.000,00	99,87	300.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>56.056.448.650,00</b>	<b>49.438.813.425,00</b>	<b>88,19</b>	<b>65.040.309.120,00</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp136.751.824.478,00 dan terealisasi sebesar Rp110.854.446.191,00 atau mencapai 81,06% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp212.275.029.805,91 mengalami penurunan sebesar Rp-101.420.583.614,91 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	95.991.534.675,00	77.631.951.803,00	80,87	180.504.077.380,91
2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.494.187.100,00	1.254.327.210,00	83,95	3.672.691.650,00
3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	22.709.503.550,00	18.721.233.720,00	82,44	10.859.114.950,00
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	766.542.000,00
5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	542.100.000,00
6 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan	4.218.155.593,00	3.769.952.298,00	89,37	6.332.333.250,00
7 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air	0,00	0,00	0,00	2.227.850.000,00
8 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	6.440.550.000,00	5.513.869.400,00	85,61	409.927.000,00
9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air	238.249.800,00	184.555.050,00	77,46	2.234.369.075,00
10 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	589.500.800,00	0,00	0,00	0,00
11 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	145.300.000,00
12 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu	24.250.000,00	24.250.000,00	100,00	0,00
13 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	5.045.892.960,00	3.754.306.710,00	74,40	4.580.724.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>136.751.824.478,00</b>	<b>110.854.446.191,00</b>	<b>81,06</b>	<b>212.275.029.805,91</b>

**e. Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 dianggarkan sebesar Rp10.119.145.512,00 dan terealisasi sebesar Rp9.473.481.234,00 atau mencapai 93,62% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap lainnya, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp13.260.238.636,00 mengalami penurunan sebesar Rp-3.786.757.402,00 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	7.499.145.512,00	7.467.724.134,00	99,58	10.931.372.695,00
2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak	50.000.000,00	0,00	0,00	279.844.000,00
3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	2.550.000.000,00	1.985.757.100,00	77,87	2.046.021.941,00
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.119.145.512,00</b>	<b>9.473.481.234,00</b>	<b>93,62</b>	<b>13.260.238.636,00</b>



#### f. Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya merupakan belanja pengadaan software yang menambah aset lainnya. Pada TA 2018 tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp19.999.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.999.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Aset Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Belanja Aset Lainnya - Pengadaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	19.999.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999.000,00</b>

#### 4.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah diterima.

Belanja Tak Terduga TA 2018 dianggarkan sebesar Rp2.257.951.600,00 dan terealisasi sebesar Rp1.924.268.244,00 atau mencapai 85,22% dari anggaran, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.674.586.960,90 mengalami peningkatan sebesar Rp249.681.283,10.

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Bantuan Tak Terduga Kepada Korban Bencana Alam, Dinas Sosial Kab. Wajo T.A 2018	1.537.451.600,00
2.	Belanja Bantuan Tak Terduga dalam rangka Kunjungan Kerja Bapak Presiden RI di Kab. Wajo	384.000.000,00
3.	Belanja Pengembalian kelebihan bayar Pajak PBB -2 kepada Wajib Pajak BAPENDA Kab. Wajo Tahun Anggaran 2018	2.816.644,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.924.268.244,00</b>

#### 4.1.3 Transfer

Pada TA 2018, Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah, sedangkan Transfer Bantuan Keuangan meliputi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dan Transfer Dana Otonomi Khusus. Pada APBD Perubahan TA 2018 Kabupaten Wajo dianggarkan sebesar Rp230.198.057.180,00 dan terealisasi sebesar Rp229.884.751.379,09 atau 99,86%, dengan rincian pada table berikut.

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.654.849.520,00	4.265.467.076,44	91,63	0,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	225.543.207.660,00	225.619.284.302,65	100,03	153.680.732.709,83
<b>Jumlah</b>		<b>230.198.057.180,00</b>	<b>229.884.751.379,09</b>	<b>99,86</b>	<b>153.680.732.709,83</b>

#### 4.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan transfer dari pemerintah pusat atas Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah desa, pada TA 2018 dianggarkan sebesar Rp4.654.849.520,00 dan



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

teralisasi sebesar Rp4.265.467.076,44 atau mencapai 91,63% dari anggaran, dibandingkan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2017 sebesar Rp0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.265.467.076,44.

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.415.321.202,00	3.257.557.277,00	95,38	0,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.239.528.318,00	1.007.909.799,44	81,31	0,00
3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.654.849.520,00</b>	<b>4.265.467.076,44</b>	<b>91,63</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut seluruhnya merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2018 yang diberikan kepada 139 desa.

Terdapat selisih realisasi dengan rincian pada lampiran sebesar Rp66.878.642,65 karena kesalahan pemebanangan rekening pada saat pencairan dua SP2D.

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2018 dengan ikhtisar.

**a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2018 dianggarkan sebesar Rp3.415.321.202,00 dan terealisasi sebesar Rp3.257.557.277,00 atau mencapai 95,38% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut:

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.415.321.202,00	3.257.557.277,00	95,38	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.415.321.202,00</b>	<b>3.257.557.277,00</b>	<b>95,38</b>	<b>0,00</b>

**b. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.239.528.318,00 dan terealisasi sebesar Rp1.007.909.799,44 atau mencapai 81,31% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut:

Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.239.528.318,00	1.007.909.799,44	81,31	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.239.528.318,00</b>	<b>1.007.909.799,44</b>	<b>81,31</b>	<b>0,00</b>

**4.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan**

Realisasi Transfer merupakan belanja bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pemerintah desa dan bantuan keuangan pada partai politik di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2018 sebesar Rp225.619.284.302,65 yaitu 100,03% dari anggaran sebesar Rp225.543.207.660,00 atau terdapat lebih salur pada pemerintah desa sebesar Rp76.076.642,65 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	120.410.157.700,00	120.563.405.042,65	100,13	152.620.080.105,83
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	913.278.960,00	913.278.960,00	100	1.060.652.604,00
3	Transfer Dana Otonomi Khusus	104.219.771.000,00	104.142.600.300,00	99,93	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>225.543.207.660,00</b>	<b>225.619.284.302,65</b>	<b>100,03</b>	<b>153.680.732.709,83</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari pembayaran Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Kepala Lingkungan, Imam Lingkungan dan Imam Kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan dan 142 desa dengan rincian pada tabel berikut.

Uraian	APBD-P	SK	Realisasi	Sisa
1 Alokasi Dana Desa	119.152.557.700,00	119.152.155.700,00	119.296.205.042,65	-143.647.342,65
2 Tunjangan Kepala Lingkungan, Imam Lingkungan dan Imam Kelurahan	1.257.600.000,00	1.267.200.000,00	1.267.200.000,00	-9.600.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>120.410.157.700,00</b>	<b>120.419.355.700,00</b>	<b>120.563.405.042,65</b>	<b>-153.247.342,65</b>

Seluruh Alokasi Dana Desa tersebut diberikan kepada 142 desa. Terdapat selisih realisasi dengan rincian pada lampiran sebesar Rp144.049.342,65 karena kesalahan pembebanan rekening pada saat pencairan dua SP2D.

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2018.

Realisasi transfer bantuan keuangan ke desa dapat dilihat pada Lampiran 16

**b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

b. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan pembayaran bantuan keuangan kepada partai politik, dengan rincian pada tabel berikut.

No	Partai Politik	APBD-P	Realisasi
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	78.310.716	78.310.716,00
2	Partai Demokrat	125.979.150	125.979.150,00
3	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	55.510.686	55.510.686,00
4	Partai Pulan Bintang (PBB)	24.097.755	24.097.755,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA )	81.608.934	81.608.934,00
6	Partai Persatuan Pembangunan ( PPP )	147.373.644	147.373.644,00
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	52.955.166	52.955.166,00
8	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	157.971.066	157.971.066,00
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	73.119.816	73.119.816,00
10	Partai Keadilan Sejahtera	58.030.269	58.030.269,00
11	Partai NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	58.321.758	58.321.758,00
<b>Jumlah</b>		<b>913.278.960,00</b>	<b>913.278.960,00</b>

**c. Transfer Dana Otonomi Khusus**

Realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus sebesar Rp104.142.600.300,00 merupakan pembayaran Dana Desa kepada 142 desa.

Terdapat selisih realisasi dengan rincian pada lampiran sebesar Rp77.170.700,00 karena kesalahan pembebanan rekening pada saat pencairan dua SP2D.

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2018.





#### Surplus/(Defisit) Pendapatan, Belanja, Transfer

Berdasarkan total realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 atas pendapatan sebesar Rp1.407.603.616.014,33, belanja sebesar Rp1.198.701.815.095,47, dan transfer sebesar Rp229.884.751.379,09, maka Pemerintah Kabupaten Wajo mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja) sebesar Rp20.982.950.460,23.

#### 4.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Dalam TA 2018 pada kelompok Pembiayaan dalam Struktur APBD Kabupaten Wajo pada posisi Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp35.076.313.571,50 dan terealisasi sebesar Rp35.081.020.170,50 atau 100,01% yang terdiri dari SiLPA TA 2017.

Sedangkan pada posisi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2018 dianggarkan sebesar Rp8.025.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp7.722.000.000,00 atau 96,22% yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok utang pemda.

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Penerimaan Pembiayaan	35.076.313.571,50	35.081.020.170,50	100,01	55.258.330.732,18
2	Pengeluaran Pembiayaan	8.025.000.000,00	7.722.000.000,00	96,22	7.184.500.451,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.051.313.571,50</b>	<b>27.359.020.170,50</b>	<b>101,14</b>	<b>48.073.830.281,18</b>

#### 4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi sebesar Rp35.081.020.170,50 yaitu 100,01% dari anggaran Rp35.076.313.571,50, dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp55.258.330.732,18 mengalami penurunan sebesar Rp-20.177.310.561,68 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
Penggunaan SiLPA	35.076.313.571,50	35.076.313.571,50	0,00	55.068.418.112,18
Koreksi SiLPA	0,00	4.706.599,00	0,00	189.912.620,00
<b>Jumlah</b>	<b>35.076.313.571,50</b>	<b>35.081.020.170,50</b>	<b>100,01</b>	<b>55.258.330.732,18</b>

Koreksi SiLPA sebesar Rp4.706.599,00 merupakan koreksi atas saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2017.

#### 4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi sebesar Rp7.722.000.000,00 yaitu 96,22% dari anggaran Rp8.025.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari:

Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2017 (Rp)
1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	7.697.000.000,00	96,21	7.000.000.000,00
2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	184.500.451,00
3 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.025.000.000,00</b>	<b>7.722.000.000,00</b>	<b>96,22</b>	<b>7.184.500.451,00</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.697.000.000,00 adalah penyetoran modal Pemerintah Kabupaten Wajo kepada PT Bank Sul-Selbar sebesar Rp6.000.000.000,00 dan PDAM sebesar Rp2.697.000.000,00.
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank merupakan pembayaran pinjaman kepada pemerintah pusat, namun pada TA 2018 tidak terdapat realisasi.
- Pembayaran Utang Pemda sebesar Rp25.000.000,00 adalah pembayaran utang pihak ketiga kepada TVRI atas biaya produksi atau Penyiaran TVRI Sulawesi Selatan berdasarkan hasil negosiasi kerjasama produksi/penyiaran LPP TVRI Stasiun Sulawesi Selatan Nomor 102/II.6/TVRI/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.

#### 4.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.376.069.710,27 mengalami penurunan dari TA 2017 sebesar Rp28.700.243.861,23 atau 81,82%. SiLPA tersebut terdiri dari:

Uraian	Silpa 2018	Silpa 2017	%
1. Kas di Kas Daerah	1.386.168.632,12	31.135.812.094,40	-95,55
2. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	138.119.221,00	-100,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran (setelah dikurangi Utang PFK)	0,00	0,00	0,00
4. Kas di BLUD	4.306.619.927,45	3.430.315.297,98	25,55
5. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	580.159.583,70	205.355.119,12	182,52
6. Kas di Bendahara BOS	103.121.567,00	166.711.839,00	-38,14
<b>Jumlah</b>	<b>6.376.069.710,27</b>	<b>35.076.313.571,50</b>	<b>-81,82</b>

SiLPA TA 2018 berupa Kas di Kas Daerah yang sudah ada peruntukannya mengalami defisit minimal sebesar Rp10.714.495.493,38 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Sisa Dana di Kas Daerah
<b>A. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2018</b>	<b>1.386.168.632,12</b>
<b>B. Dana yang sudah ada peruntukannya per 31 Desember 2018 (setelah dikurangi alokasi untuk pembayaran Kewajiban Jangka Pendek)</b>	
<b><u>(DAK Reguler)</u></b>	
1. Bidang Pendidikan	7.213.000,00
2. Bidang Kesehatan dan KB	35.150.055,00
3. Air Minum	0,00
4. Bidang Pasar	77.500.000,00
5. Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	7.950.000,00
6. Bidang Pertanian	119.738.732,00
7. Kelautan dan Perikanan	0,00
8. Bidang Jalan - Prioritas Daerah	0,00
<b><u>(DAK Penugasan)</u></b>	
9. Bidang Pendukung Kedaulatan Pangan Irigasi	9.347.680,00
10. Bidang Air Minum	724.000,00
11. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.500.000,00
<b><u>DAK Non Fisik</u></b>	
12. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	268.800.000,00
13. Tunjangan Profesi Guru PNSD	7.036.331.640,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	485.750.000,00
15. Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana	3.007.401.499,00
16. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	5.847.400,00
<b><u>Dana JKN</u></b>	
17. Dana Non Kapitasi JKN	37.410.119,50
<b>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</b>	
18. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2018 untuk program Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum dilaksanakan kegiatannya	1.000.000.000,00
<b>Sub Jumlah (1 s.d 18)</b>	<b>12.100.664.125,50</b>
<b>C. Defisit Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 (A-B)</b>	<b>-10.714.495.493,38</b>

**4.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp35.076.313.571,50

**4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2018 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018, sebesar Rp35.081.020.170,50

**4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp6.376.069.710,27 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran	-Rp	20.982.950.460,23
- Pembiayaan Netto	Rp	27.359.020.170,50
- SiLPA Tahun berjalan	Rp	6.376.069.710,27

**4.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

Terdapat Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya di TA 2018 sebesar Rp4.706.599,00. Koreksi tersebut merupakan Koreksi SiLPA Dana Bos Tahun Sebelumnya.

**4.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018 sebesar Rp6.376.069.710,27 atau turun sebesar Rp-28.700.243.861,23 dari tahun 2017.

**4.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca**

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018, sebagai berikut:

- Aset	Rp2.987.182.698.819,09
- Kewajiban	Rp62.569.118.511,89
- Ekuitas	Rp2.924.613.580.307,20

Jumlah aset sebesar Rp2.987.182.698.819,09 terdiri atas aset lancar sebesar Rp66.880.610.054,29; investasi jangka panjang sebesar Rp47.434.489.733,00; aset tetap sebesar Rp2.833.723.648.030,93; dan aset lainnya sebesar Rp39.143.951.000,87.



Jumlah kewajiban sebesar Rp62.569.118.511,89 seluruhnya merupakan kewajiban jangka Total ekuitas sebesar Rp2.924.613.580.307,20.

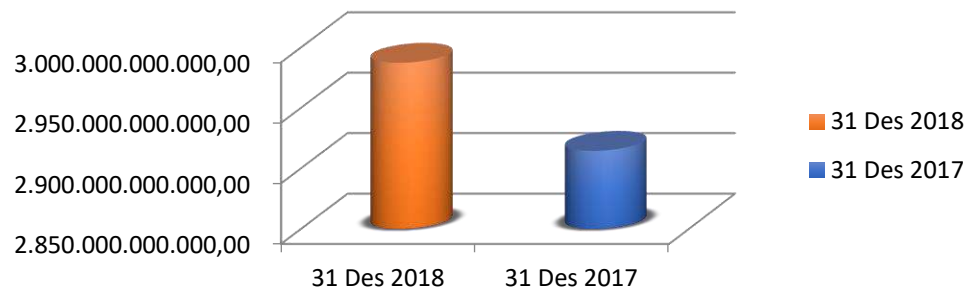
#### 4.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Wajo Per 31 Des 2018 sebesar Rp2.987.182.698.819,09 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2.914.300.417.168,69 mengalami kenaikan sebesar Rp72.882.281.650,40 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Aset	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
Aset Lancar	66.880.610.054,29	81.324.115.975,11	-17,76
Investasi Jangka Panjang	47.434.489.733,00	42.154.189.781,00	12,53
Aset Tetap	2.833.723.648.030,93	2.697.013.751.528,44	5,07
Aset Lainnya	39.143.951.000,87	93.808.359.884,14	-58,27
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2.987.182.698.819,09</b>	<b>2.914.300.417.168,69</b>	<b>0,00</b>

Grafik 4.5  
 Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2018 dan 2017



Berdasarkan rincian pada Tabel rincian aset pemerintah Kabupaten Wajo dan Grafik perbandingan komposisi aset tahun 2018 dan 2017 di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wajo pada Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi belanja modal dan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Hibah.

##### 4.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp66.880.610.054,29 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp81.324.115.975,11 mengalami penurunan sebesar Rp-14.443.505.920,82 atau -17,76%, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Lancar	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
1 Kas di Kas Daerah	1.386.168.632,12	15.135.812.094,40	-90,84
2 Setara Kas	0,00	16.000.000.000,00	-100,00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	214.546,00	0,00	0,00
4 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	138.119.221,00	-100,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	Kas di BLUD	4.306.619.927,45	3.430.315.297,98	25,55
6	Kas Lainnya	230.369.319,00	64.409.951,00	257,66
7	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	580.159.583,70	205.355.119,12	182,52
8	Kas di Bendahara BOS	103.121.567,00	166.711.839,00	-38,14
9	Piutang Pajak	11.054.042.799,71	10.204.443.829,71	8,33
10	Piutang Retribusi	1.115.508.361,00	181.967.118,00	513,03
11	Piutang Transfer	26.729.818.297,00	11.562.233.703,00	131,18
12	Penyisihan Piutang	-8.724.985.991,54	-6.684.059.428,79	30,53
13	Belanja Dibayar Dimuka	136.989.482,50	366.733.685,73	-62,65
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.920.000,00	56.920.000,00	0,00
15	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	18.000.000,00	15.000.000,00	20,00
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	278.290.984,86	272.690.984,86	2,05
17	Piutang Lainnya	14.457.959.077,88	12.307.244.271,88	17,48
18	Persediaan	15.151.413.467,60	17.900.218.288,22	-15,36
<b>Jumlah</b>		<b>66.880.610.054,29</b>	<b>81.324.115.975,11</b>	<b>-17,76</b>

#### 4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 pada PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang, berupa dana di rekening giro bank.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.386.168.632,12 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp15.135.812.094,40 mengalami penurunan sebesar Rp-13.749.643.462,28 atau -90,84% dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Rekening Giro Bank	Bank	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	100-001-000004051-7 PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	1.080.171.000,60	5.807.441.536,04	-81,40
2	100-001-000004054-1 PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	74.391,97	697.979.957,97	-99,99
3	100-001-000003206-9 PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	224.010.721,89	337.514.816,89	-33,63
4	100-001-000023712-4 PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	811.377,91	68.306.036,81	-98,81
5	100-001-000023713-2 PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	249.005,00	198.706.787,50	-99,87
6	100-001-000009738-1 PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	80.301.534,75	7.364.312.359,19	-98,91
7	100-001-0000014689.7 PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	550.600,00	661.550.600,00	-99,92
<b>Jumlah</b>		<b>1.386.168.632,12</b>	<b>15.135.812.094,40</b>	<b>-90,84</b>

Rincian Mutasi Rekening di atas dapat dilihat pada Lampiran 1a.

#### 4.3.1.1.2 Setara Kas

Setara Kas merupakan Rekening Deposito berjangka satu bulan milik Pemerintah Kabupaten Wajo yang ditempatkan pada Bank Sulselbar Cabang Sengkang, Bank BNI Cabang Sengkang dan Bank BRI Cabang Sengkang. Saldo Setara Kas Per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama Bank	Nomor Seri Deposito	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1 PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	A065190	0,00	4.000.000.000,00	-100,00
2 Bank BNI Cabang Sengkang	PAA 0589741	0,00	10.000.000.000,00	-100,00
3 Bank BRI Cabang Sengkang	0195-01-001411-40-9	0,00	2.000.000.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>

Rincian Mutasi Rekening Deposito di atas dapat dilihat pada Lampiran 1b.

Pada tahun 2018, 3 (tiga) *bilyet* Deposito Terdapat pada Bank Sulselbar Cabang Sengkang, Bank BNI Cabang Sengkang dan Bank BNI Cabang Sengkang telah dicairkan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan kas Pemerintah Kabupaten Wajo.

#### 4.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di bendahara penerimaan merupakan kas atas penerimaan di 16 OPD (Lampiran 2C). Namun sampai dengan 31 Desember 2018 tidak terdapat saldo kas pada bendahara penerimaan.

Saldo Kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp138.119.221,00, mengalami penurunan sebesar Rp-138.119.221,00 atau -100,00 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren	
	(Rp)	(Rp)	(%)	
1 Dinas Kesehatan	0,00	127.623.221,00	-100,00	
2 Dinas Perdagangan	0,00	10.496.000,00	-100,00	
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>138.119.221,00</b>	<b>-100,00</b>

#### 4.3.1.1.4 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp0,00, mengalami kenaikan. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada 37 OPD dan 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 1c.

Saldo kas yang terdapat pada bendahara pengeluaran tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan 31 desember 2018 belum disetor oleh bendahara pengeluaran sebagaimana terdapat pada Lampiran 1c.

No	OPD	2018	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	PPH Ps. 23	5.091,00	0,00
2	Kecamatan Belawa		
	PPH Ps. 21	60.000,00	0,00
	PPH Ps. 23	4.000,00	0,00
	PPN	145.455,00	0,00
<b>Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>214.546,00</b>	<b>0,00</b>

Sampai dengan tanggal 5 Mei 2019, utang PFK (PPN dan PPh) telah disetorkan ke kas negara.

#### 4.3.1.1.5 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas yang terdapat pada Rekening maupun Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Lamadukkelleng dan BLUD RSUD Siwa, Kas di BLUD RSUD Lamadukkelleng terdapat pada PT.Bank BRI Cabang Sengkang, sedangkan BLUD RSUD Siwa terdapat pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.306.619.927,45 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp3.430.315.297,98, mengalami kenaikan sebesar Rp876.304.629,47 atau 25,55% dengan rincian sebagai berikut:

<b>Kas BLUD</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>	<b>Tren</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(%)</b>
1 RSUD Lamadukkelleng			
a. Rekening No. 00001711-01-000001-30-3	3.286.393.541,45	3.059.430.723,98	7,42
2 RSUD Siwa			
c. Rekening No. 102-002-000002687-1	1.019.868.140,00	365.987.635,00	178,66
d. Kas di Bendahara BLUD	358.246,00	4.896.939,00	-92,68
<b>Jumlah</b>	<b>4.306.619.927,45</b>	<b>3.430.315.297,98</b>	<b>25,55</b>

Rincian Mutasi Kas BLUD dapat dilihat pada Lampiran 1e

#### 4.3.1.1.6 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp230.369.319,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp64.409.951,00 mengalami kenaikan sebesar Rp165.959.368,00 atau 257,66%.

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp78.569.319,00 adalah uang jaminan pasien yang terdapat pada rekening penampungan BLUD RSUD Lamadukkelleng yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLUD.

Sedangkan Saldo Kas Lainnya sebesar Rp151.800.000,00 adalah saldo kas yang terdapat pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas PSDA, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Keera, dan Kecamatan Penrang, yang merupakan Realisasi Pencairan atas SP2D LS oleh BUD ke rekening bendahara pengeluaran namun s.d 31 Desember 2018 belum ditarik oleh bendahara pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

<b>SKPD</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>	<b>Tren</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(%)</b>
1 RSUD Lamadukkelleng			
- Rekening No. 00001711-01-00007-30-9	78.569.319,00	62.959.951,00	24,79
2 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman			
- Nomor Rekening : 100-002-0000010262-5	14.840.000,00	0,00	0,00
3 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
- Nomor Rekening : 100-002-000023896-9	119.360.000,00	0,00	0,00
4 Dinas PSDA			
- Nomor Rekening : 100-002-000012278-2	13.550.000,00	0,00	0,00
5 Dinas Pemuda dan Olahraga			
- Nomor Rekening : 100-002-000023897-7	0,00	30.000,00	-100,00
6 Kecamatan Keera			
- Nomor Rekening : 100-002-0000112-7	0,00	1.420.000,00	-100,00
7 Kecamatan Penrang			
- Nomor Rekening : 100-002-000012613-3	4.050.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>230.369.319,00</b>	<b>64.409.951,00</b>	<b>257,66</b>

Saldo kas lainnya tersebut diatas bukan merupakan bagian dari SILPA namun dicatat sebagai belanja di tahun berjalan atas pencairan SP2D tersebut yang terdapat pada 4 OPD, Sedangkan Kas lainnya yang terdapat pada RSUD Lamadukkelleng dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya atas Jaminan Pasien yang disetor ke rekening penampungan, Rincian Mutasi Kas Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1f.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 4.3.1.1.7 Kas di Bendahara FKTP

Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas tunai yang terdapat pada bendahara dana kapitasi JKN dan kas di rekening giro bank yang dikelola oleh masing-masing Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2018 sebesar Rp580.159.583,70 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp205.355.119,12 mengalami kenaikan sebesar Rp374.804.464,58 atau 182,52%, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Puskesmas	No.Rekening	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1 Puskesmas Tempe	100-002-000023764-4	16.870.264,59	7.096.652,59	137,72
2 Puskesmas Pattirosompe	100-002-000023755-5	14.917.747,62	3.132.648,12	376,20
3 Puskesmas Tanasitolo	100-002-000023757-1	76.147.151,26	23.710.548,26	221,15
4 Puskesmas Wewangrewu	100-002-000023758-0	12.216.149,00	4.124.100,00	196,21
5 Puskesmas Maniangpajo	100-002-000023753-9	28.486.022,26	9.965.733,26	185,84
6 Puskesmas Gilireng	100-002-000023752-1	14.639.959,32	6.241.626,07	134,55
7 Puskesmas Pammana	100-002-000023765-2	49.564.340,77	6.802.624,27	628,61
8 Puskesmas Lempa	100-002-000023747-4	28.952.425,85	4.856.056,85	496,21
9 Puskesmas Sabbangparu	100-002-000023750-4	19.839.745,76	3.401.871,51	483,20
10 Puskesmas Liu	100-002-000023751-2	1.224.559,28	3.837.891,70	-68,09
11 Puskesmas Belawa	100-002-000023749-1	15.747.750,32	1.515.346,32	939,22
12 Puskesmas Sappa	100-002-000023768-7	16.325.827,28	15.104.410,28	8,09
13 Puskesmas Pitumpanua	102-002-00002691-0	81.225.097,00	19.992.192,00	306,28
14 Puskesmas Keera	100-002-000023760-1	609.295,47	23.514.750,42	-97,41
15 Puskesmas Sajoanging	100-002-000023762-8	1.356.479,13	1.631.645,28	-16,86
16 Puskesmas Salobulo	100-002-000023763-6	4.902.757,41	12.122.820,41	-59,56
17 Puskesmas Majauleng	100-002-000023759-8	40.118.613,57	5.640.655,57	611,24
18 Puskesmas Tosora	100-002-000023745-8	173.635,04	2.175.632,04	-92,02
19 Puskesmas Takkalalla	100-002-000023766-1	9.636.073,75	10.211.721,40	-5,64
20 Puskesmas Parigi	100-002-000023748-2	13.391.788,79	1.821.100,79	635,37
21 Puskesmas Penrang	100-002-000023761-0	37.039.786,59	14.792.056,59	150,40
22 Puskesmas Solo	100-002-000023754-7	46.788.793,35	19.511.666,10	139,80
23 Puskesmas Salewangeng	100-002-000023756-3	49.985.320,29	4.151.369,29	1.104,07
<b>Jumlah</b>		<b>580.159.583,70</b>	<b>205.355.119,12</b>	<b>182,52</b>

Rincian saldo kas pada masing-masing Puskesmas terdapat pada Lampiran 1g

#### 4.3.1.1.8 Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di bendahara Dana BOS merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2018 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara maupun yang berada di Rekening Koran Dana BOS pada sekolah SD dan SLTP Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp103.121.567,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp166.711.839,00 mengalami penurunan sebesar Rp-63.590.272,00 atau -38,14% dengan rincian sebagai berikut:





Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas di Bendahara Dana BOS	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 SD (384 Sekolah)	86.800.185,00	113.120.373,00	-23,27
2 SMP (71 Sekolah)	16.321.382,00	53.591.466,00	-69,54
<b>Jumlah</b>	<b>103.121.567,00</b>	<b>166.711.839,00</b>	<b>-38,14</b>

Rincian Mutasi Kas di Bendahara Dana BOS terdapat pada Lampiran 1h

Pada tahun 2018 terdapat koreksi saldo awal kas dana BOS sebesar Rp4.706.599,00 akibat adanya Koreksi Saldo Awal dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp4.471.134,00 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp235.465,00 sehingga nilai saldo awal yang dicatat pada Laporan Keuangan sebesar Rp166.711.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi Kas Dana BOS	Saldo 2017	Koreksi	Saldo Awal 2018
1 SD (384 Sekolah)	117.591.507,00	4.471.134,00	113.120.373,00
2 SMP (71 Sekolah)	53.826.931,00	235.465,00	53.591.466,00
<b>Jumlah</b>	<b>171.418.438,00</b>	<b>4.706.599,00</b>	<b>166.711.839,00</b>

#### 4.3.1.1.9 Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan uang dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih, maka dilakukan penilaian kualitas piutang dan penyisihan atas piutang yang tak tertagih.

Dalam menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan:

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	0 s.d. 12 bulan	Lancar	5%
2	13 s.d. 36 bulan	Kurang Lancar	10%
3	37 s.d. 60 bulan	Diragukan	50%
4	> 60 bulan	Macet	100%

Saldo Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.985.553.528,92 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp27.916.440.478,66 mengalami kenaikan sebesar Rp17.069.113.050,26 atau 61,14% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017
1	Piutang Pajak	11.054.042.799,71	10.204.443.829,71
	Penyisihan Piutang Pajak	-5.427.589.607,96	-3.485.800.165,82
	Piutang Pajak Netto	5.626.453.191,75	6.718.643.663,89
2	Piutang Retribusi	1.115.508.361,00	181.967.118,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	-15.926.560,13	-909.835,59
	Piutang Retribusi Netto	1.099.581.800,87	181.057.282,41
3	Piutang Transfer	26.729.818.297,00	11.562.233.703,00
	Penyisihan Piutang Transfer	-133.649.091,49	-57.811.168,52



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Piutang Transfer Pemerintah Netto	26.596.169.205,52	11.504.422.534,49
4	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.920.000,00	56.920.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-56.920.000,00	-56.920.000,00
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0	0,00
5	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	18.000.000,00	15.000.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-1.230.000,00	-930.000,00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	16.770.000,00	14.070.000,00
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	278.290.984,86	272.690.984,86
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-236.596.984,86	-237.836.984,86
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	41.694.000,00	34.854.000,00
7	Piutang Lainnya	14.457.959.077,88	12.307.244.271,88
	Penyisihan Piutang Lainnya	-2.853.073.747,10	-2.843.851.274,01
	Piutang Lainnya Netto	11.604.885.330,78	9.463.392.997,88
	<b>Jumlah Piutang</b>	<b>53.710.539.520,45</b>	<b>34.600.499.907,45</b>
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>	<b>-8.724.985.991,54</b>	<b>-6.684.059.428,79</b>
	<b>Jumlah Piutang Bersih</b>	<b>44.985.553.528,92</b>	<b>27.916.440.478,66</b>

Nilai Piutang per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value* /NRV) adalah sebesar Rp44.985.553.528,92 berasal dari nilai bruto sebesar Rp53.710.539.520,45 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp8.724.985.991,54. Uraian lebih lanjut terhadap saldo piutang Pemerintah Kabupaten Wajo dapat dilihat pada uraian berikut ini:

**a. Piutang Pajak Daerah**

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.054.042.799,71

No	Uraian	2018	2017
1	Piutang Pajak Restoran	116.576.258,00	43.085.325,00
2	Piutang Pajak Hiburan	775.075,00	1.125.075,00
3	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	299.904,00	271.920,00
4	Piutang Pajak Reklame	5.000,00	0,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.215.993.305,00	1.144.684.588,00
6	Piutang Mineral Bukan Logam & Batuan	179.283.723,00	0,00
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.541.109.534,71	9.015.276.921,71
	<b>Jumlah Piutang Pajak</b>	<b>11.054.042.799,71</b>	<b>10.204.443.829,71</b>
8	Penyisihan Piutang Pajak	-610.815.871,88	-3.485.800.165,82
	<b>Jumlah Piutang Pajak Bersih</b>	<b>1.210.830.849,46</b>	<b>6.718.643.663,89</b>

1) Piutang Pajak Restoran

Saldo akhir Piutang Pajak Restoran yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp116.576.258,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp43.085.325,00.

2) Piutang Pajak Hiburan

Saldo akhir Piutang Pajak Hiburan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp775.075,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp1.125.075,00.

3) Piutang Pajak Air Bawah Tanah

Saldo akhir Piutang Pajak Air Bawah Tanah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp 299.904,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp271.920,00.

4) Piutang Pajak Reklame

Saldo akhir Piutang Pajak Reklame yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.000,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp00,00.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.215.993.305,00 dari saldo awal sebesar Rp1.144.684.588,00.

6) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo akhir Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp179.283.723,00 dari saldo awal sebesar Rp0,00.

7) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2009-2013 yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini KPP Pratama Watampone kepada Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan BAST SK Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-337/WPJ.15/KP.10/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2014-2018 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.

Saldo akhir Piutang PBB-P2 yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.541.109.534,71 dari saldo awal sebesar Rp9.015.276.921,71, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2018	2017
1	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2009-2013	3.210.193.049,71	3.212.412.975,71
2	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2014	2.269.098.709,00	2.285.064.898,00
3	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2015	1.877.796.229,00	1.897.362.654,00
4	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2016	977.310.878,00	1.027.389.633,00
5	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2017	342.865.988,00	593.046.761,00
6	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2018	863.844.681,00	0,00
<b>Jumlah Piutang PBB-P2</b>		<b>9.541.109.534,71</b>	<b>9.015.276.921,71</b>
7	Penyisihan Piutang Pajak	-5.419.977.428,72	-3.479.806.818,36
<b>Jumlah Piutang PBB-P2 Bersih</b>		<b>4.121.132.106,00</b>	<b>5.535.470.103,35</b>

Rincian masing-masing piutang pajak daerah dapat dilihat pada Lampiran 2.

**b. Piutang Retribusi Daerah**

Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah.

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.115.508.361,00 dan Rp181.967.118,00, dengan rincian pada tabel berikut.

No	Uraian	2018	2017
<b>A</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas JKN Non Kapitasi	1.006.302.300,00	0,00
<b>B</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>		
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.306.061,00	46.067.118,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<b>C</b>	<b>Dinas Perikanan</b>		
3	Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Berair ( <i>Ex-Ornament</i> )	105.900.000,00	135.900.000,00
<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>		<b>1.115.508.361,00</b>	<b>181.967.118,00</b>
4	Penyisihan Piutang Retribusi	-15.926.560,13	-909.835,59
<b>Jumlah Piutang Retribusi Bersih</b>		<b>1.099.581.800,87</b>	<b>181.057.282,41</b>

1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.006.302.300,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp0,00.

2) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Saldo akhir Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.306.061,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp46.067.118,00.

3) Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Berair (*Ex-Ornament*)

Saldo akhir Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Berair (*Ex-Ornament*) yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp105.900.000,00 dari jumlah saldo awal sebesar

**c. Piutang Transfer**

Piutang Transfer diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, Piutang Transfer Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2018 adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan BAKARU/SAWITTO dan Pajak Rokok sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan.

Adapun Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sesuai dengan PMK No 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar & Lebih Bayar DBH Menurut Daerah Prov/Kab/Kota pada Tahun 2018 sampai dengan 31 desember 2018 belum ditransfer ke Pemerintah Kabupaten Wajo.

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp26.729.818.297,00 dan Rp11.562.233.703,00, dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Transfer	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
<b>Pemerintah Provinsi</b>			
Pajak Kendaraan Bermotor	4.767.715.613,00	2.922.493.798,00	63,14
Bea Balik Nama - Kendaraan Bermotor	3.430.128.230,00	2.216.302.120,00	54,77
PBB-KB	4.861.417.306,00	3.065.630.642,00	58,58
Pajak Air Permukaan - PDAM	24.687.753,00	14.677.809,00	68,20
Pajak Air Permukaan - BAKARU/SAWITTO	1.643.123,00	6.034.993,00	-72,77
Pajak Air Permukaan - PLTA Bili-Bili	274.210,00	0,00	0,00
Pajak Rokok	3.633.083.751,00	3.337.094.341,00	8,87
<b>Pemerintah Pusat</b>			
Bagi Hasil Pajak	2.693.489.009,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam	7.317.379.302,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.729.818.297,00</b>	<b>11.562.233.703,00</b>	<b>131,18</b>

Rincian masing-masing piutang transfer dapat dilihat pada Lampiran 4.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**d. Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang sebesar Rp(8.724.985.991,53) dicatat sesuai dengan aging schedule berdasarkan Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih, dengan rincian pada tabel berikut.

No	Uraian	2018	2017
<b>1</b>	<b>Piutang Pajak Daerah</b>		
	a. Piutang Pajak Restoran	-630.381,29	-262.926,63
	b. Piutang Pajak Hiburan	-3.875,38	-5.625,38
	c. Piutang Pajak Air Bawah Tanah	-1.499,52	-1.359,60
	d. Piutang Pajak Reklame	-25	0,00
	e. Piutang Pajak Penerangan Jalan	-6.079.979,45	-5.723.435,86
	f. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-896.418,62	0,00
	g. Piutang PBB-P2	-5.419.977.428,72	-3.479.806.818,36
<b>2</b>	<b>Piutang Retribusi</b>		
	a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - JKN Non Kapitasi	-5.031.511,50	0,00
	b. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-305.048,63	-230.335,59
	c. Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Berair ( <i>Ex-Ornament</i> )	-10.590.000,00	-679.500,00
<b>3</b>	<b>Piutang Transfer</b>		
	a. Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat	-50.054.341,56	0,00
	b. Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi	-83.594.749,93	-57.811.168,52
<b>6</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>	<b>-56.920.000,00</b>	<b>-56.920.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>-236.596.984,86</b>	<b>-237.836.984,86</b>
<b>8</b>	<b>Piutang Lainnya</b>		
	a. Dana Bergulir kepada Kelompok Tani	-65.950.000,00	-65.950.000,00
	b. Dana Bergulir – KOPERWA	-976.314.100,00	-976.314.100,00
	c. Bantuan Modal Kerja Lainnya	-131.032.000,00	-131.032.000,00
	d. Piutang Denda Keterlambatan	-1.617.506.089,08	-1.617.505.505,01
	e. Piutang Askes/JKN dan Jamkesmas	-57.199.369,80	-46.363.909,18
	f. Piutang Lain-Lain	-5.072.188,23	-6.685.759,82
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>	<b>-8.724.985.991,53</b>	<b>-6.684.059.428,79</b>

Rincian atas perhitungan penyisihan piutang berdasarkan umur dapat dilihat pada Lampiran 2, 3, 4, 5 dan 6.

**e. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Bagian Lancar Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang timbul dari penjualan angsuran aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah jatuh tempo. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp56.920.000,00 dan Rp56.920.000,00.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 sebesar Rp56.920.000,00 merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran kepada pegawai yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2018 dan belum diterima pembayarannya.

No	Uraian	2018
1	Bagian Lancar Dum	400.000,00
2	Bagian Lancar Dum Rumah Dinas	2.980.000,00
3	Bagian Lancar Dum Kendaraan Dinas	53.540.000,00
<b>Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>		<b>56.920.000,00</b>
4	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-56.920.000,00
<b>Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bersih</b>		<b>0,00</b>

Rincian atas bagian lancar piutang tagihan penjualan angsuran disajikan pada Lampiran 5a.

**f. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan**

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) s.d. tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp18.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000,00 jika dibandingkan dengan Bagian Lancar TP per 31 Desember 2017 sebesar Rp15.000.000,00.

Penambahan atas saldo Bagian Lancar TP tersebut karena adanya reklasifikasi dari Aset Lainnya – TP yang akan jatuh tempo 12 bulan yang akan datang, dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31-12-2017 ( <i>audited</i> )	15.000.000,00
Mutasi Tahun 2018	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya - TP	3.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.000.000,00</b>
Pengurangan:	
- Pelunasan	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>
Saldo per 31-12-2018	<b>18.000.000,00</b>

Bagian Lancar TP merupakan Tagihan TP yang timbul akibat adanya kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wajo yang telah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang akan datang.

Bagian Lancar TP dilakukan penyisihan atas Bagian Lancar TP tidak tertagih sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih. Adapun Saldo penyisihan Bagian Lancar TP tidak tertagih per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.230.000,00 sehingga nilai Bagian Lancar TP *netto* menjadi sebesar Rp16.770.000,00.

Rincian atas bagian lancar piutang tuntutan perbendaharaan disajikan pada Lampiran 5b.

**g. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) s.d. tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp278.290.984,86 mengalami kenaikan sebesar Rp5.600.000,00 jika dibandingkan dengan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2017 sebesar Rp272.690.984,86.

Penambahan atas saldo Bagian Lancar TGR tersebut karena adanya reklasifikasi dari Aset



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo per 31-12-2017 ( <i>audited</i> )	272.690.984,86
Koreksi Saldo Awal:	
Mutasi Tahun 2018	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya – TGR	8.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>281.090.984,86</b>
Pengurangan:	
- Pelunasan	-2.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>-2.800.000,00</b>
Saldo per 31-12-2018	<b>278.290.984,86</b>

Bagian Lancar TGR merupakan Tagihan TGR yang timbul akibat adanya kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Inspektorat Kabupaten Wajo yang telah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang akan datang.

Bagian Lancar TP dilakukan penyisihan atas Bagian Lancar TP tidak tertagih sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih. Adapun Saldo penyisihan Bagian Lancar TGR tidak tertagih per 31 Desember 2018 sebesar Rp236.596.984,86 sehingga nilai Bagian Lancar TGR *netto* menjadi sebesar Rp41.694.000,00.

Rincian atas bagian lancar piutang disajikan pada Lampiran 5c.

#### h. Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap pihak ketiga, selain piutang pajak dan retribusi, dimana belum direalisasikan pembayarannya per 31 Desember 2018.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp14.457.959.077,88 dan Rp12.307.244.271,88. Jika di bandingkan dengan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2017, maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.150.714.806,00 atau 17,48% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017
1	Dana Bergulir kepada Kelompok Tani	65.950.000,00	65.950.000,00
2	Dana Bergulir – KOPERWA	976.314.100,00	976.314.100,00
3	Bantuan Modal Kerja Lainnya	131.032.000,00	131.032.000,00
4	Piutang Denda Keterlambatan	1.724.301.373,88	1.724.301.373,88
5	Piutang Askes/JKN dan Jamkesmas	11.439.873.959,00	9.272.781.835,00
6	Piutang Lain-Lain	120.487.645,00	136.864.963,00
<b>Jumlah Piutang Lainnya</b>		<b>14.457.959.077,88</b>	<b>12.307.244.271,88</b>
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-2.853.073.747,10	-2.843.851.274,01
<b>Jumlah Piutang Lainnya Bersih</b>		<b>11.604.885.330,78</b>	<b>9.463.392.997,88</b>

##### 1) Dana Bergulir kepada Kelompok Tani

Nilai Dana Bergulir kepada Kelompok Tani sebesar Rp65.950.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2017 dan selama TA 2018 tidak terdapat penysetoran sehingga nilai per 31 Desember 2018 menjadi Rp65.950.000,00.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Dana Bergulir – KOPERWA  
Nilai Dana Bergulir – KOPERWA sebesar Rp976.314.100,00 merupakan saldo per 31 Desember 2017 dan selama TA 2018 tidak terdapat penyetoran sehingga nilai per 31 Desember 2018 menjadi Rp976.314.100,00.
- 3) Bantuan Modal Kerja Lainnya  
Nilai Bantuan Modal Kerja Lainnya sebesar Rp131.032.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2017 dan selama TA 2018 tidak terdapat penyetoran sehingga nilai per 31 Desember 2018 menjadi Rp131.032.000,00.
- 4) Piutang Denda Keterlambatan  
Nilai Piutang Denda Keterlambatan sebesar Rp1.724.301.373,88 merupakan saldo per 31 Desember 2017 dan selama TA 2018 tidak terdapat penyetoran sehingga nilai per 31 Desember 2018 menjadi Rp1.724.301.373,88.
- 5) Piutang Askes/JKN dan Jamkesmas  
Nilai Piutang Askes/JKN dan Jamkesmas sebesar Rp11.439.873.959,00 merupakan piutang Dana Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan untuk susulan bulan Desember 2018 dan piutang Dana Non Kapitasi JKN di RSUD Lamaddukelleng dan RSUD Siwa.
- 6) Piutang Lain-Lain  
Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp120.487.645,00 merupakan jaminan pasien umum dan piutang sewa kantin pada RSUD Lamaddukelleng serta piutang spp mahasiswa Akademi Keperawatan Pemda Wajo pada Dinas Kesehatan.

Rincian atas masing-masing piutang lainnya berdasarkan umur disajikan pada Lampiran 6

#### 4.3.1.1.10) Belanja di Bayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya atas pembayaran jaringan internet, Web Hosting dan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan ditahun 2018 namun belum menjadi beban sepenuhnya pada periode TA 2018 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wajo ditahun berikutnya. Saldo Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp136.989.482,50 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp366.733.685,73 mengalami penurunan sebesar Rp-229.744.203,23 atau -62,65%. Rincian per SKPD dapat dilihat sebagai berikut :

No	Uraian	2018	2017
1	Belanja (Beban) Dibayar Dimuka atas pembayaran <i>web hosting</i>	43.749.640,00	186.996.200,00
2	Belanja (Beban) Dibayar Dimuka atas Surat Tanda Nomor Kendaraan	93.239.842,50	179.737.485,73
<b>Jumlah Belanja (Beban) Dibayar Dimuka</b>		<b>136.989.482,50</b>	<b>366.733.685,73</b>

Rincian Belanja di Bayar dimuka per-SKPD dapat dilihat di table di bawah ini :

Belanja Dibayar Dimuka	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Dinas Kesehatan	10.467.304,58	10.863.695,83	-3,65
2 Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng	9.154.200,00	6.367.977,00	43,75
3 Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	5.485.535,00	5.531.979,00	-0,84
4 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan	1.649.994,17	4.714.850,83	-65,00
5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1.561.108,33	296.435,00	426,63
6 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan	1.612.875,00	2.008.416,67	-19,69
7 Satuan Polisi Pamong Praja	2.478.497,50	1.861.875,00	33,12
8 Dinas Sosial	2.035.793,00	2.037.483,00	-0,08





*Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	998.222,92	-100,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	576.670,83	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	952.728,33	72.192,00	1.219,71
12	Dinas Lingkungan Hidup	530.407,50	3.487.476,67	-84,79
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	171.927,50	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.108.153,33	1.178.215,00	-5,95
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	207.125,00	-100,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	0,00	8.052.925,41	-100,00
17	Dinas Perhubungan	5.812.351,33	59.585.651,42	-90,25
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.507.934,17	2.118.294,17	-28,81
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	0,00	1.526.958,33	-100,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	141.291,67	196.833,00	-28,22
21	Dinas Perikanan	1.127.421,00	1.089.319,17	3,50
22	Dinas Pariwisata	1.701.081,67	1.695.617,00	0,32
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	3.324.769,17	3.681.898,33	-9,70
24	Dinas Perkebunan	938.575,00	1.798.265,50	-47,81
25	Dinas Perdagangan	1.677.475,00	1.533.300,33	9,40
26	Dinas Perindustrian	839.895,83	248.900,00	237,44
27	Sekretariat Daerah	59.908.940,08	224.750.299,75	-73,34
28	Sekretariat DPRD	7.967.842,08	9.701.187,08	-17,87
29	Kecamatan Sabbangparu	1.058.775,00	1.100.375,00	-3,78
30	Kecamatan Bola	788.148,75	0,00	0,00
31	Kecamatan Keera	362.666,67	0,00	0,00
32	Kecamatan Takkalalla	272.000,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Sajoanging	362.666,67	333.333,33	8,80
34	Kecamatan Tanasitolo	292.416,67	291.667,00	0,26
35	Kecamatan Belawa	0,00	991.424,00	-100,00
36	Kecamatan Pitumpanua	2.762.000,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Maniangpajo	250.000,00	577.875,00	-56,74
38	Kecamatan Penrang	0,00	765.858,33	-100,00
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.300.233,33	1.203.910,83	8,00
40	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.690.319,17	2.230.283,00	20,63
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	533.333,33	0,00	0,00
42	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	39.775,00	0,00	0,00
43	Badan Pendapatan Daerah	2.054.139,17	1.891.362,50	8,61
44	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	1.490.236,67	1.742.203,33	-14,46
<b>Jumlah</b>		<b>136.989.482,50</b>	<b>366.733.685,73</b>	<b>-62,65</b>

Rincian Mutasi atas Beban dibayar dimuka terdapat pada Lampiran 7

#### 4.3.1.1.11 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.151.413.467,60 dibandingkan dengan saldo persediaan tahun 2017 sebesar Rp17.900.218.288,23, mengalami penurunan sebesar Rp-2.748.804.820,63 atau -15,36%, Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 berdasarkan hasil stok opname yang dilakukan pada akhir tahun, yang terdapat pada rincian sebagai berikut:

Persediaan	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Persediaan Alat Tulis Kantor	70.095.689,09	62.931.801,28	11,38
2 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.157.420.555,05	1.206.685.948,05	-4,08



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3 Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	7.979.049,90	9.162.849,90	-12,92
4 Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.772.000,00	2.172.000,00	-18,42
5 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	120.000,00	0,00	0,00
6 Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.454.582,00	13.802.450,00	-60,48
7 Persediaan Isi tabung gas	6.462.500,00	3.861.000,00	67,38
8 Persediaan Bahan/bibit tanaman	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
9 Persediaan Bahan obat-obatan	7.032.696.179,68	7.402.686.794,84	-5,00
10 Persediaan Bibit Ternak	5.855.750,00	3.518.000,00	66,45
11 Persediaan Bahan kimia	262.130.971,55	336.191.097,20	-22,03
12 Persediaan Bahan Makanan Pokok	199.104.235,00	491.083.416,00	-59,46
13 Persediaan Bahan Alat Kesehatan	6.226.776.471,66	8.128.703.442,78	-23,40
14 Cinderamata/Logo DPRD	4.050.000,00	0,00	0,00
15 Persediaan Alat Kesehatan	166.745.483,67	231.169.488,17	-27,87
16 Persediaan Benda Berharga Lainnya	0,00	3.500.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.151.413.467,60</b>	<b>17.900.218.288,23</b>	<b>-15,36</b>

Saldo persediaan tersebut tidak termasuk:

- 1) Persediaan obat dan alat kesehatan yang sudah rusak/tidak digunakan kembali/kadaluarsa di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.254.339.108,15 dan di RSUD Lamadukkelleng sebesar Rp252.225.414,64.

Persediaan obat dan alat kesehatan pada RSUD Lamadukkelleng tersebut telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Obat dan BMHP *Expired Date* Nomor 446/611.1/RSUD tanggal 28 Januari 2019;

- 2) Persediaan benda berharga yang sudah tidak digunakan kembali di Bapenda sebesar Rp2.995.796,00.

#### 4.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo dan investasi permanen lainnya.

Saldo Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp47.434.489.733,00 dibandingkan dengan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp42.154.189.781,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.280.299.952,00 atau 12,53% dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Investasi NonPermanen	0,00	0,00	0,00
2 Investasi Permanen	47.434.489.733,00	42.154.189.781,00	12,53
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>47.434.489.733,00</b>	<b>42.154.189.781,00</b>	<b>12,53</b>

##### 4.3.1.2.1 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen yang dilakukan



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan serta berdengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

Penilaian investasu dengan metode biaya (*cost method*) yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penilaian investasu dengan metode ekuitas (*equity method*) yaitu investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak secara proposional dan deviden yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan, sedangkan dengan *cost method* investasi dicatat sebesar harga perolehannya, dividen yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan dividen yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan anak menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktiva.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp47.434.489.733,00 atau bertambah Rp5.280.299.952,00 dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp42.154.189.781,00 seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada perusahaan daerah dengan rincian sebagai berikut.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	%
1 Penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar	44.000.000.000,00	39.000.000.000,00	12,82
2 Penyertaan modal pada PDAM Kab. Wajo	3.434.489.733,00	3.154.189.781,00	8,89
3 Penyertaan modal pada PT Wajo Energi Jaya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>47.434.489.733,00</b>	<b>42.154.189.781,00</b>	<b>12,53</b>

1). Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.000.000.000,00. Atas penyertaan tersebut, PT Bank Sulselbar telah menerbitkan sertifikat saham untuk Pemerintah Kabupaten Wajo sebanyak 18.265 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham, dengan rincian sebagai berikut:

Surat Penerbitan Nomor Sertifikat	Jumlah	Nilai Nominal	Nilai
	(Lembar)	(Lembar)	
1 Surat No. 023/DTR/2005 tgl 30 April 2005 Seri A No. 196.321 s.d. 207.085	10.765	1.000.000,00	10.765.000.000,00
2 Surat No. 049/DTR/2006 tgl 30 Mei 2006 Seri A No. 276.558 s.d. 284.057	7.500	1.000.000,00	7.500.000.000,00
Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No 313/GTR/2018 tgl 2 November 2018 Seri A No. 934.661 s.d. 939.660	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>Jumlah saham s.d. 31 Desember 2018</b>	<b>23.265</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>23.265.000.000,00</b>
<b>Jumlah Penyertaan Modal s.d. 31 Desember 2017</b>			<b>39.000.000.000,00</b>
<b>Tambahan Penyertaan Modal TA 2018</b>			<b>5.000.000.000,00</b>
<b>Jumlah Penyertaan Modal yang Belum Bersertifikat Saham</b>			<b>20.735.000.000,00</b>



Tambahan penyertaan modal modal pada tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar dan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulselbar Tahun 2018.

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2018 adalah sebesar 4,56%, sehingga metode yang digunakan dalam penilaian investasi menggunakan Metode Biaya. Bagi hasil berupa dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Wajo untuk Laba Tahun Buku 2018 adalah sebesar Rp14.144.241.966,00 atau turun dibandingkan Tahun Buku 2017 sebesar Rp15.383.403.123,82

2). Penyertaan Modal pada PDAM

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.434.489.733,00 berupa Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih (PSPAB) Tahun 2000 s.d. 2001 terdiri dari:

- a. Pemasangan pipa GIP 200mm dan accesories;
- b. Pembangunan bak prasedimentasi;
- c. Pengadaan sambungan rumah dan meter air; dan
- d. Pengadaan meter air.

Adapun Modal Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo Per 31 Des 2018 sebesar Rp1.767.975.400,00 dari tahun 2006 s.d 2008 yang terdiri dari:

- a. Pembayaran dan penambahan daya listrik
- b. Rehabilitasi IPA I, II, III
- c. Pengadaan/Pemasangan pompa dan meter air

Selain hal tersebut diatas terdapat pula Modal Hibah tahun 2017 berupa Instalasi Pengolahan Air dan Perpipaian untuk peningkatan kapasitas produksi PDAM Sebesar Rp5.375.759.485,00.

Berdasarkan Lembar Konfirmasi Nilai Piutang Negara pada PDAM Kabupaten Wajo pada tanggal 29 april 2017, telah melakukan Perjanjian Pinjaman dengan Pemerintah Nomor : SLA-985/DP3/1997 dan RDA-176/DP3/1994. Terhadap selisih antara Hak Tagih Pemerintah Per Cod 30 Juni 2016 setelah disesuaikan dengan Nilai Utang pada Neraca PDAM Per 31 Desember 2016 akan ditindaklanjuti oleh PDAM dengan melakukan penyesuaian/koreksi pada Neraca PDAM dan Penyesuaian pada Laporan Keuangan Pemrintah Daerah Kabupaten Wajo dengan menambah Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Wajo Tahun 2017 berupa hibah Non Kas sebesar Rp10.614.986.440,81.

Terdapat Penyertaan Modal pada PDAM dari Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.022.178.620,00 dari tahun 2000 s.d 2013 terdiri dari:

- a. Penambahan Pipa PVC
- b. Pembuatan instalasi pengolahan air
- c. Pengadaan Pipa GIP
- d. Penambahan dan pengadaan mobil tangki
- e. Pengadaan Pompa dan Pemasangan meter air
- f. Penambahan IPA 30 Lt/dtk

Pada Tahun 2018 terdapat tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo dalam bentuk uang tunai Sebesar Rp2.697.000.000,00 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten



*Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Wajo Nomor 11 Tahun 2016, sehingga jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp23.101.100.665,00.

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo adalah 100% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah pengakuan laba/rugi bersih sesuai dengan prosentase kepemilikan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 (Audited) diketahui bahwa akumulasi kerugian PDAM Kabupaten Wajo mencapai Rp-19.666.610.932,00 yang terdiri dari akumulasi kerugian s.d. 2017 sebesar Rp-17.249.910.884,00 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp-2.416.700.048,00. Seluruh kerugian tersebut disesuaikan terhadap kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo sehingga penyertaan modal pada PDAM per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp3.434.489.733,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo**

Penyertaan Modal Pemda Wajo pada PDAM s.d 2017		Rp20.404.100.665,00
Penyertaan Modal Tahun 2018		Rp2.697.000.000,00
Akumulasi kerugian s.d. 2017	(Rp17.249.910.884,00)	
Rugi TA 2018	<u>(Rp2.416.700.048,00)</u>	
Akumulasi kerugian s.d. 2018		<u>(Rp19.666.610.932,00)</u>
Nilai Penyertaan Modal		Rp3.434.489.733,00

Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Wajo pada Lampiran 9b.

3). Penyertaan Modal Investasi Pada PT Wajo Energi Jaya

PT Wajo Energi Jaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT Wajo Energi dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PTWajo Energi Jaya dilakukan pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi sebesar Rp900.000.000,00. Atas penyertaan modal tersebut diterbitkan saham untuk Pemerintah Kabupaten Wajo sebanyak 9.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000,00 per lembar sahamnya.

Presentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT.Wajo Energi Jaya adalah 90% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah pengakuan laba/rugi bersih sesuai dengan presentase kepemilikan. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya per 31 Desember 2017 yang belum di audit oleh auditor independen sampai dengan tahun 2018 diketahui bahwa akumulasi kerugian PT Wajo Energi Jaya mencapai Rp-6.201.999.599,09 yang terdiri dari akumulasi kerugian s.d. 2017 sebesar Rp-5.615.449.778,71 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp-586.549.820,38. Seluruh kerugian tersebut disesuaikan terhadap kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo sehingga penyertaan modal pada PT Wajo Energi Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar negatif Rp-5.301.999.599,09 yang disajikan di neraca sebesar Rp0,00 dengan perhitungan pada berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi**

Penyertaan Modal Pemda Wajo pada PT Wajo Energi		Rp900.000.000,00
Akumulasi kerugian TA 2012 s/d 2017	(Rp5.615.449.778,71)	
Rugi TA 2018	(Rp586.549.820,38)	
Akumulasi kerugian s/d 2018		(Rp6.201.999.599,09)
Nilai Penyertaan Modal		(Rp5.301.999.599,09)

Sejak Tahun 2017, PT Wajo Energi Jaya tidak menyampaikan Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya yang telah diaudit oleh auditor independen karena tidak adanya biaya pelaksanaan audit.

Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya Kabupaten Wajo per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 9c.

**4.3.1.3 Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp2.833.723.648.030,93 dan Rp2.697.013.751.528,44. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan Capitalization Threshold telah diterapkan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2018. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

ASET TETAP	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Tanah	713.653.770.103,80	668.247.053.900,80	6,79
2 Peralatan dan Mesin	484.033.332.935,37	435.222.477.244,70	11,22
3 Gedung dan Bangunan	841.201.555.436,80	773.905.768.694,33	8,70
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.208.500.541.907,37	2.043.381.256.195,71	8,08
5 Aset Tetap Lainnya	82.068.245.800,48	74.940.626.869,48	9,51
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	60.742.372.873,16	71.772.545.222,29	-15,37
<b>Nilai Perolehan Aset Tetap</b>	<b>4.390.199.819.056,98</b>	<b>4.067.469.728.127,31</b>	<b>7,93</b>
7 Akumulasi Penyusutan	- 1.556.476.171.026	- 1.370.455.976.599	13,57
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>2.833.723.648.030,93</b>	<b>2.697.013.751.528,44</b>	<b>5,07</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sehubungan dengan penerapan *Capitalization Threshold* maka terdapat daftar *Extracomptable* sebagai daftar yang memuat aset tetap dibawah nilai *Capitalization Threshold*. Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 ini terdapat sejumlah Rp20.012.629.705,89 aset tetap dalam daftar *Extracomptable* yang menjadi pengurang aset tetap. Walaupun aset tetap kategori *Extracomptable* tidak terdaftar dalam Neraca Kabupaten Wajo namun tetap terpelihara dengan baik sebagaimana aset tetap lainnya yang terdaftar dalam neraca. Rincian Mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran 10'

Penjelasan masing-masing aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

#### 4.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 des 2018 sebesar Rp713.653.770.103,80 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp668.247.053.900,80 mengalami kenaikan sebesar Rp45.406.716.203,00 atau 6,79%.

Mutasi tambah kurang aset tetap tanah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2017 ( <i>audited</i> )	668.247.053.900,80
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2018	668.247.053.900,80
Mutasi Tahun 2018	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
Realisasi BM-Tanah	2.024.699.450,00
- Penetapan nilai tanah di bawah jalan	45.259.696.703,00
<b>Jumlah</b>	<b>47.284.396.153,00</b>
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	-1.877.679.950,00
<b>Jumlah</b>	<b>-1.877.679.950,00</b>
Saldo per 31-12-2018	713.653.770.103,80

Mutasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2018 sebesar Rp2.024.699.450,00,00 merupakan biaya ganti rugi/pelepasan hak atas tanah untuk lokasi pembangunan Kantor Bapenda dan bangunan jalan dan jembatan dengan rincian pada tabel berikut.

No	Uraian	Nilai
<b>A</b>	<b>Pengadaan tanah lokasi pembangunan Kantor Bapenda Kabupaten Wajo</b>	
1	Biaya Apraisal	22.900.000,00
2	Biaya ganti rugi/pelepasan hak atas tanah seluas 1.500 m <sup>2</sup> kepada Hj. Andi Hasirah dan atau Ahli Warisnya berdasarkan Sertifikat Nomor 530 lokasi di Jalan Rusa, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kab.Wajo	1.500.000.000,00
3	Biaya administrasi	2.099.450,00
	<b>Sub Jumlah A</b>	<b>1.524.999.450,00</b>
<b>B</b>	<b>Pengadaan tanah lokasi pembangunan Kantor Bapenda Kabupaten Wajo</b>	
1	Biaya ganti rugi/pelepasan hak atas tanah seluas 202m <sup>2</sup> kepada Coma Hj. Benawa berdasarkan Sertifikat Nomor 561 lokasi di jalan Bau Munawwarah Kel. Tempe Kec. Tempe Kab.Wajo	383.800.000,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	Biaya ganti rugi/pelepasan hak atas tanah seluas 61m <sup>2</sup> kepada Heriyadi Umar berdasarkan Sertifikat Nomor 02138 lokasi di jalan Bau Munawwarah Kel. Tempe Kec. Tempe Kab.Wajo	115.900.000,00
<b>Sub Jumlah B</b>		<b>499.700.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>2.024.699.450,00</b>

2) Penetapan nilai tanah di bawah jalan sebesar Rp45.259.696.703,00 merupakan penetapan nilai tanah di bawah jalan berdasarkan SK Bupati Nomor 727 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang menetapkan nilai tanah di bawah jalan sebesar Rp45.259.696.703,00 pada lima kecamatan yaitu Kecamatan Majauleng, Kecamatan Sabangparu, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Gilireng, dan Kecamatan Keera.

3) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp1.877.679.950,00 merupakan satu bidang tanah pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.377.679.950,00 yang akan dihibahkan ke Kodim dan satu bidang tanah pada Dinas Perikanan senilai Rp500.000.000,00 yang dobel pencatatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Saldo Tanah per 31 Desember 2018 tersebut, belum termasuk biaya pensertifikatan tanah yang direalisasikan dari Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemda pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan untuk 36 bidang tanah sebesar Rp92.570.560,00. Biaya pensertifikatan ini belum dikapitalisasikan ke nilai Tanah karena proses dan penerbitan sertifikat belum selesai.

Terdapat perkara perdata sengketa tanah Rumah Jabatan Bupati Wajo yang terletak di Sengkang antara Made Ali Bin Tangnga; dkk sebagai Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Pembanding) dengan Pemerintah Kab. Wajo sebagai Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding), Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Hukum Nomor 957K/PDT/2013 yang menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

Adapun perkara perdata sengketa tanah SDN 287 Caleko Ugi Kecamatan Sabbangparu antara Kepala Desa Wage dan Dinas Pendidikan Kab.Wajo sebagai Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Para Terbanding) dengan Hj. Suriani Binti Lanurung sebagai Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding)., Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Hukum Nomor 3006K/PDT/2011 yang mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

Per 31 Desember 2018 terdapat 1.757 bidang tanah yang terdiri dari:

- 1) 1.229 bidang tanah telah bersertifikat a.n. Pemkab Wajo;
- 2) 528 bidang tanah tidak didukung dokumen kepemilikan.

No	Dokumen	2017	Mutasi 2018		2018
			Tambah	Kurang	
1	Sertifikat	1.241	0	12	1.229
2	Tanpa Dokumen	526	2	0	528
<b>Jumlah</b>		<b>1.767</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1.757</b>

#### 4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 des 2018 sebesar Rp484.033.332.935,37 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp435.222.477.244,70 mengalami kenaikan sebesar Rp48.810.855.690,67 atau 11,22%.

Mutasi tambah kurang aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:





Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo per 31-12-2017 ( <i>audited</i> )	435.222.477.244,70
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2018	435.222.477.244,70
Mutasi Tahun 2018	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
Realisasi BM-Peralatan dan Mesin	41.578.959.148,22
Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2017	-963.012.000,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2018 atas retensi	1.526.486.138,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	11.397.356.753,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap lain	1.702.461.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.242.251.789,22</b>
Pengurangan:	
- Hibah ke Masyarakat	
- Penjualan ( <i>dum</i> )	
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	-389.825.000,00
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	-3.305.976.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	-2.002.094.585,78
- Reklasifikasi ke <i>Extracomptable</i>	-449.038.212,77
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	-284.462.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>-6.431.396.098,55</b>
Saldo per 31-12-2018	484.033.332.935,37
Akumulasi Penyusutan	-288.697.438.472,20
Nilai Buku per 31-12-2018	195.335.894.463,17

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp11.397.356.753,00 merupakan hibah dari:
  - a) Kementerian Kesehatan berupa alat kesehatan sebanyak 266 unit senilai Rp9.982.163.598,00 pada RSUD Siwa;
  - b) Kementerian Transmigrasi berupa Hand Tractor sebanyak satu unit senilai Rp199.969.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c) Kementerian Pendidikan berupa peralatan laboratorium sebanyak 23 unit senilai Rp1.215.224.155,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

No	Uraian	2018	2017
1	Alat-Alat Besar Darat	16.417.101.546,00	15.185.568.294,00
2	Alat-alat Bantu	3.206.031.750,00	1.972.875.775,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	112.406.176.097,95	109.172.284.815,56
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	410.825.850,00	610.816.080,00
5	Alat Angkut Apung Bermotor	568.906.000,00	739.406.000,00
6	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	49.480.000,00	98.480.000,00
7	Alat Bengkel Bermesin	831.359.945,06	719.894.445,07
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	252.746.734,58	395.507.409,57
9	Alat Ukur	3.195.762.895,95	2.833.263.588,39
10	Alat Pengolahan	14.145.707.444,00	673.748.526,00
11	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.032.839.550,40	1.204.810.649,40
12	Alat Kantor	25.155.826.463,45	19.972.508.373,54



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13 Alat Rumah Tangga	79.232.333.093,83	73.401.575.086,24
14 Komputer	40.640.765.884,28	38.651.499.781,78
15 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.136.155.470,14	9.648.057.211,06
16 Alat Studio	5.931.397.850,00	5.032.475.549,00
17 Alat Komunikasi	1.962.628.221,33	1.934.805.250,00
18 Peralatan Pemancar	379.245.500,00	404.173.000,00
19 Alat Kedokteran	61.059.037.359,64	58.954.534.764,19
20 Alat Kesehatan	34.327.939.816,98	24.201.129.859,98
21 Unit-Unit Laboratorium	17.063.009.722,48	11.935.003.702,83
22 Alat Peraga/Praktek Sekolah	32.908.306.091,72	37.758.381.057,51
23 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	304.105.992,00	42.174.600,00
24 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	76.430.000,00	62.147.500,00
25 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	16.012.208.046,00	16.011.448.046,00
26 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	91.987.700,00	92.631.700,00
27 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.311.174.504,58	1.294.193.979,58
28 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	3.592.529.955,00	809.134.000,00
29 Senjata Api	90.921.200,00	327.607.200,00
30 Persenjataan Non Senjata Api	15.450.000,00	181.648.000,00
31 Alat Keamanan dan Perlindungan	1.224.942.250,00	900.693.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>484.033.332.935,37</b>	<b>435.222.477.244,70</b>

Sampai dengan 31 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Wajo telah memiliki aset berupa kendaraan sebanyak 2.294 unit. Dari 2.294 unit kendaraan sebanyak 1.863 unit telah didukung dengan bukti kepemilikan dan 431 unit yang tidak didukung bukti kepemilikan dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah Aset	Bukti Kepemilikan			
		Ada	Nilai (Rp)	Tidak Ada	Nilai (Rp)
1 Kendaraan Bermotor Roda 6	33	16	6.547.952.450,00	17	2.885.495.000,00
2 Kendaraan Bermotor Roda 4	319	247	54.122.013.978,00	72	13.357.097.431,00
3 Kendaraan Bermotor Roda 3	32	23	705.213.499,00	9	266.542.000,00
4 Kendaraan Bermotor Roda 2	1.910	1.577	23.278.265.064,00	333	3.264.666.220,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.294</b>	<b>1.863</b>	<b>84.653.444.991,00</b>	<b>431</b>	<b>19.773.800.651,00</b>

Dalam aset peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Wajo terdapat aset yang digunakan/dipinjam pakai oleh instansi vertikal yaitu 13 kendaraan bermotor roda empat dan 28 kendaraan bermotor roda dua.

#### 4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 des 2018 sebesar Rp841.201.555.436,80 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp773.905.768.694,33 mengalami kenaikan sebesar Rp67.295.786.742,47 atau 8,70%. Mutasi tambah kurang aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2017 (audited) 773.905.768.694,33  
 Koreksi Saldo Awal:



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2018	<u>773.905.768.694,33</u>
Mutasi Tahun 2018	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
Realisasi BM-Gedung dan Bangunan	49.438.813.425,00
Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2017	-1.082.163.450,00
- Kapitalisasi dari Belanja Hibah	10.000.000,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2018	5.968.037.550,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	10.129.914.920,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	389.825.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.810.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Lainnya	398.681.800,00
- Reklasifikasi dari AT-KDP	4.149.211.967,47
<b>Jumlah</b>	<u><b>69.442.131.212,47</b></u>
Pengurangan:	
- Hibah ke Masyarakat	-8.361.050,00
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	-178.622.550,00
- Reklasifikasi ke AT-KDP	-359.810.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	-1.182.830.870,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	-416.720.000,00
<b>Jumlah</b>	<u><b>-2.146.344.470,00</b></u>
Saldo per 31-12-2018	<u>841.201.555.436,80</u>
Akumulasi Penyusutan	<u>-138.900.043.842,86</u>
Nilai Buku per 31-12-2018	<u><u>702.301.511.593,94</u></u>

Mutasi tersebut antara lain berupa:

- 1) Kapitalisasi Belanja sebesar Rp10.000.000,00 merupakan penambahan nilai aset Mushala SMP Negeri 2 Sajoanging dari Belanja Hibah;
- 2) Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp10.129.914.920,00 merupakan hibah dari:
  - a) Kementerian Kesehatan berupa Gedung Kesehatan sebanyak tiga unit senilai Rp3.126.651.000,00 pada Dinas Kesehatan dan Gedung Kesehatan sebanyak satu unit senilai Rp1.982.533.920,00 pada RSUD Siwa;
  - b) Kementerian Transmigrasi berupa Gedung Box Culvert sebanyak empat unit senilai Rp708.190.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c) Kementerian Pendidikan berupa Gedung Pendidikan sebanyak 28 unit senilai Rp4.244.069.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d) Swadaya Masyarakat (IKA) berupa Gedung Mushollah sebanyak satu unit senilai Rp68.471.000,00 pada UPT SMPN 1 Sajoanging;
- 3) Hibah ke sekolah swasta sebesar Rp8.361.050,00 merupakan hibah ke UPT SMP Tafidz Al-Quran berupa Gedung Perpustakaan senilai Rp5.866.250,00 dan hibah ke UPT SMP Muhammadiyah Belawa berupa Gedung Jamban senilai Rp2.494.800,00;



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp1.182.830.870,00 merupakan aset gedung kesehatan yang rusak berat sebanyak tujuh unit senilai Rp1.054.530.870,00 pada RSUD Siwa dan aset gedung BBI Tempe sebanyak 1 unit senilai Rp128.300.000,00.

Aset Gedung dan Bangunan	2018	2017
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja	784.858.596.887,80	719.910.035.294,33
2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal	41.000.660.057,00	41.074.289.958,00
3 Bangunan Bersejarah	9.335.187.205,00	7.846.460.155,00
4 Tugu Peringatan	1.038.508.450,00	442.084.000,00
5 Monumen/Bangunan Bersejarah	1.638.171.837,00	1.492.131.837,00
6 Tugu Titik Kontrol/Pasti	228.370.000,00	397.080.450,00
7 Rambu-Rambu	3.102.061.000,00	2.743.687.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>841.201.555.436,80</b>	<b>773.905.768.694,33</b>

#### 4.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 des 2018 sebesar Rp2.208.500.541.907,37 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2.043.381.256.195,71 mengalami kenaikan sebesar Rp165.119.285.711,66 atau 8,08%.

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan tersebut tidak termasuk tanah di bawah jalan sesuai dengan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mutasi tambah kurang aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut

Saldo per 31-12-2017 ( <i>audited</i> )	2.043.381.256.195,71
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2018	<b>2.043.381.256.195,71</b>
Mutasi Tahun 2018	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
Realisasi BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.854.446.191,00
Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2017	-3.457.329.250,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	459.941.000,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2018	18.783.161.989,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	26.781.815.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	3.305.976.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan	178.622.550,00
- Reklasifikasi dari AT-KDP	11.348.219.881,66
<b>Jumlah</b>	<b>168.254.853.361,66</b>
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	-39.810.000,00
- Reklasifikasi ke AT-Lainnya	-2.901.720.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	-1.004.037.650,00
<b>Jumlah</b>	<b>-3.135.567.650,00</b>
Saldo per 31-12-2018	2.208.500.541.907,37
Akumulasi Penyusutan	-1.128.878.688.710,99
Nilai Buku per 31-12-2018	<b>1.079.621.853.196,38</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapitalisasi Belanja sebesar Rp459.941.000,00 merupakan Jalan lingkungan transmigrasi sebanyak 1 unit senilai Rp459.941.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- 2) Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp26.781.815.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Transmigrasi berupa Jalan Desa transmigrasi sebanyak delapan unit senilai Rp24.685.297.000,00 dan berupa Jembatan sebanyak tiga unit senilai Rp1.857.850.000,00 serta jaringan air bersih sebanyak dua unit senilai Rp238.668.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp1.004.037.650,00 merupakan Jaringan pembuangan limbah medis sebanyak 1 unit senilai Rp18.300.000,00 dan Jaringan instalasi air limbah-RS sebanyak satu unit senilai Rp985.737.650,00 pada RSUD Lamadukkelleng;

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2018	2017
1 Jalan dan Jembatan	1.931.726.436.563,17	1.835.334.989.322,75
2 Bangunan Air/Irigasi	225.744.008.767,51	159.798.913.656,27
3 Instalasi	29.848.412.645,17	30.950.441.245,17
4 Jaringan	21.181.683.931,52	17.296.911.971,52
<b>Jumlah</b>	<b>2.208.500.541.907,37</b>	<b>2.043.381.256.195,71</b>

#### 4.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp82.068.245.800,48 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp74.940.626.869,48 mengalami kenaikan sebesar Rp7.127.618.931,00 atau 9,51%.

Mutasi tambah kurang aset tetap lainnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2017 ( <i>audited</i> )	74.940.626.869,48
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2018	74.940.626.869,48
Mutasi Tahun 2018	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
Realisasi BM-AT Lainnya	9.473.481.234,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	19.964.000,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2018	363.462.500,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	32.961.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.889.868.984,00</b>
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	-1.702.461.750,00
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	-398.681.800,00
- Reklasifikasi ke <i>Extracomtable</i>	-20.000.000,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	-641.106.503,00
<b>Jumlah</b>	<b>-2.762.250.053,00</b>
Saldo per 31-12-2018	82.068.245.800,48



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku per 31-12-2018	82.068.245.800,48

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapitalisasi Belanja sebesar Rp19.964.000,00 merupakan Induk ikan pada Dinas Perikanan;
- 2) Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp32.961.250,00 merupakan hibah dari Kementerian Pendidikan berupa Peta, Atlas dan Carta sebanyak 693 unit senilai Rp32.961.250,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Aset Tetap Lainnya	2018	2017
1 Buku dan Perpustakaan	77.696.222.496,44	70.589.512.565,44
2 Barang Bercorak Kebudayaan	2.068.322.803,56	2.037.302.168,56
3 Hewan Dan Ternak Serta Tanaman	319.495.804,00	299.531.804,00
4 Alat Olah Raga Lainnya	1.801.095.696,48	1.831.171.331,48
5 Aset Tetap Renovasi	183.109.000,00	183.109.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>82.068.245.800,48</b>	<b>74.940.626.869,48</b>

#### 4.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp60.742.372.873,16 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp71.772.545.222,29 mengalami penurunan sebesar Rp-11.030.172.349,13 atau -15,37%.

Pengakuan aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dari KDP, apabila aset tersebut sudah di selesaikan 100% dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO, dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Mutasi tambah kurang konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada rincian sebagai

Saldo per 31-12-2017 ( <i>audited</i> )	71.772.545.222,29
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2018	71.772.545.222,29
Mutasi Tahun 2018	
Penambahan:	
- Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2018	2.015.729.500,00
- Reklasifikasi dari BM-Gedung dan Bangunan	359.810.000,00
- Reklasifikasi dari BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.091.720.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.467.259.500,00</b>
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	-4.149.211.967,47
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	-11.348.219.881,66
<b>Jumlah</b>	<b>-15.497.431.849,13</b>
Saldo per 31-12-2018	60.742.372.873,16

Konstruksi Dalam Pengerjaan	2018	2017
1 Gedung dan Bangunan	26.356.781.066,31	27.627.620.432,51
2 Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.385.591.806,86	44.144.924.789,78
<b>Jumlah</b>	<b>60.742.372.873,16</b>	<b>71.772.545.222,29</b>



Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 11.

#### 4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Wajo telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah bulan, maka digunakan pendekatan penyebulanan, yang artinya bulan perolehan aset tetap sebagai dasar perhitungan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.556.475.150.347,05 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.370.455.976.598,87 mengalami penurunan sebesar Rp-186.019.173.748,18 atau -13,57 % dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2017	Koreksi Akibat Reklasifikasi / Mutasi	Beban Penyusutan tahun 2018	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2018
1 Peralatan dan Mesin	237.622.059.470,02	-1.685.418.500,07	52.760.797.502,25	288.697.438.472,20
2 Gedung dan Bangunan	124.154.625.256,86	-32.599.252,00	14.777.933.610,00	138.899.959.614,86
3 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.008.679.291.871,99	-404.404.054,00	120.602.864.442,00	1.128.877.752.259,99
<b>Jumlah</b>	<b>1.370.455.976.598,87</b>	<b>-2.122.421.806,07</b>	<b>188.141.595.554,25</b>	<b>1.556.475.150.347,05</b>

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka nilai buku aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan	2018	2017
1 Tanah	713.653.770.103,80	668.668.685.000,80
2 Peralatan dan Mesin	195.335.894.463,17	196.295.829.284,68
3 Gedung dan Bangunan	702.301.511.593,94	649.422.191.758,53
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.079.621.853.196,38	1.079.250.028.641,85
5 Aset Tetap Lainnya	82.068.245.800,48	74.686.856.865,48
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	60.742.372.873,16	71.772.545.222,29
<b>Jumlah</b>	<b>2.833.723.648.030,93</b>	<b>2.740.096.136.773,63</b>

#### 4.3.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Wajo yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai Bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp39.143.951.000,87 rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp39.143.951.000,87 dan Rp93.808.359.884,14. Saldo Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp54.664.408.883,26 dibandingkan tahun sebelumnya.

No	Uraian	2018	2017
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	4.550.000,00	7.550.000,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Tuntutan Ganti Rugi	31.620.000,00	40.020.000,00
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	234.371.000,00	234.371.000,00
5	Aset Tak Berwujud	1.980.802.295,95	1.960.802.295,95
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-1.142.891.877,20	-805.707.266,67
	Aset Tak Berwujud Netto	837.910.418,75	1.155.095.029,28
6	Aset Lain-lain	47.119.686.366,89	0,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-9.084.186.784,77	0,00
	Aset Tak Berwujud Netto	38.035.499.582,12	92.371.323.854,86
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>39.143.951.000,87</b>	<b>93.808.359.884,14</b>

Adapun rincian aset lainnya sebagai berikut:

**a. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan**

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp0,00 Saldo tersebut berasal dari saldo kerugian daerah yang telah ditetapkan pembebanannya (SKTJM) per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.550.000,00 dikurangi dengan saldo Piutang-Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp 18.000.000,00.

Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah per 30 November 2018 sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor ....LHPt/XIX.MKS/12/2018 tanggal, Desember 2018 menunjukkan saldo tuntutan perbendaharaan yang telah ditetapkan pembebanannya sebesar Rp22.550.000,00

Rincian tagihan tuntutan perbendaharaan dapat dilihat pada lampiran 12a

**b. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi**

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp31.620.000,00 Saldo tersebut berasal dari saldo kerugian daerah yang telah ditetapkan pembebanannya (SKTJM) per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dikurangi dengan saldo Piutang-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp278.290.984,86

Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah per 30 November 2018 sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor ....LHPt/XIX.MKS/12/2017 tanggal, Desember 2018 menunjukkan saldo tuntutan ganti rugi yang telah ditetapkan pembebanannya sebesar Rp309.910.984,86.

Laporan Hasil Pemantauan tersebut juga mengungkapkan beberapa kasus tuntutan ganti kerugian yang belum ditetapkan melalui SKTJM dan Surat Penetapan lainnya. Kasus tersebut meliputi kerugian negara/daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebesar Rp1.738.119.701,21 dan berupa informasi kerugian negara/daerah dan belum ditindaklanjuti ganti kerugiannya sebesar Rp3.940.260.230,60 Atas kasus tuntutan ganti kerugian tersebut terdapat pembayaran angsuran dan pelunasan yang dilakukan pada bulan Desember 2018.

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 12b

**c. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga/Tagihan Pelelangan Ex Ornament**

Tagihan Pelelangan Ex Ornament per 31 Desember 2018 sebesar Rp234.371.000,00. Tagihan tersebut merupakan piutang yang timbul akibat adanya pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat pelelangan yang dikelola





Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten pada Tahun 2003.

Piutang ini menurut Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat ditagih, namun Pemerintah Kabupaten Wajo belum memiliki kebijakan penyisihan atas piutang tak tertagih pada Tahun 2009 sehingga piutang ini belum dapat dihapuskan dari Neraca Pemerintah Kabupaten Wajo. Berdasarkan catatan BPKD, diketahui s.d. akhir Tahun 2009 tidak terdapat mutasi. Pada Tahun 2010, Tagihan Pelelangan Ex Ornament ini di reklasifikasi ke Aset Lainnya - Tagihan Pelelangan Ex Ornament.

**d. Aset Tak Berwujud**

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan aset dalam bentuk perangkat lunak (*software*) atau aplikasi yang digunakan oleh masing-masing OPD untuk menunjang kelancaran dalam mengoptimalkan dan mempermudah kerja untuk menghindari *trouble error*.

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan aset dalam bentuk sistem komputer/software yang digunakan oleh masing-masing SKPD. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 des 2018 sebesar Rp1.980.802.295,95 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.960.802.295,95 mengalami kenaikan sebesar Rp20.000.000,00 atau 1,02% dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tidak Berwujud	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Aset Tak Berwujud-Oracle	138.158.891,00	138.158.891,00	0,00
2 SIMDIK dan SIMBOS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
3 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
4 Aset Tak Berwujud-SIMPADU	263.850.000,00	263.850.000,00	0,00
5 Aset Tak Berwujud-Software PERPUSTAKAAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6 SIM RS Lamadukkelleng	250.295.910,00	250.295.910,00	0,00
7 SIM RS Lamadukkelleng	349.800.000,00	349.800.000,00	0,00
8 Aset Tak Berwujud - System Parkir	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00
9 Media Pendidikan Content Modul	714.697.494,95	714.697.494,95	0,00
10 System Antrian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
11 Aplikasi e-SPPD	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud</b>	<b>1.980.802.295,95</b>	<b>1.960.802.295,95</b>	<b>1,02</b>
12 Akumulasi Amortisasi	-1.142.891.877,20	-805.707.266,67	41,85
<b>Nilai Buku Aset Tak Berwujud</b>	<b>837.910.418,75</b>	<b>1.155.095.029,28</b>	<b>(27,46)</b>

Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok aset tak berwujud.

Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.247.285.149,00 dan Rp1.166.449.347,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Akumulasi Amortisasi 31/12/2017	Beban Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi 31/12/2018
1	Aset Tak Berwujud-Oracle	85.197.982,78	27.631.778,20	112.829.760,98
2	SIMDIK dan SIMBOS	11.716.666,66	3.800.000,00	15.516.666,66
3	Sistem Informasi Pelayanan Periz	26.250.000,00	0	26.250.000,00
4	Aset Tak Berwujud-SIMPADU	88.833.083,33	52.770.000,00	141.603.083,33
5	Aset Tak Berwujud-Software PER	12.500.000,00	6.000.000,00	18.500.000,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6	SIM RS Lamaddukkelleng	250.295.910,00	0	250.295.910,00
7	SIM RS Lamaddukkelleng	145.750.000,00	69.960.000,00	215.710.000,00
8	Aset Tak Berwujud - System Park	28.645.833,33	13.750.000,00	42.395.833,33
9	Media Pendidikan Content Modul	154.851.123,91	142.939.498,99	297.790.622,90
10	System Antrian	1.666.666,67	20.000.000,00	21.666.666,67
11	Aplikasi e-SPPD	0	333.333,33	333.333,33
<b>Jumlah Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>		<b>805.707.266,67</b>	<b>337.184.610,52</b>	<b>1.142.891.877,20</b>

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 12e

**e. Aset lain-Lain**

Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 dan 2017 setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar Rp38.035.499.582,12 dan Rp92.371.323.854,86, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2018	2017
1	Aset Non Operasional	40.441.561.931,17	112.207.721.120,13
	Akumulasi Penyusutan Aset Non Operasional	-9.084.186.784,77	-25.514.777.197,08
	Aset Non Operasional Netto	31.357.375.146,40	86.692.943.923,05
2	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (Dalam Proses Penetapan Pembebanan)	1.738.119.701,21	1.738.119.701,21
3	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (Informasi Daerah)	4.940.004.734,51	3.940.260.230,60
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>38.035.499.582,12</b>	<b>92.371.323.854,86</b>

Aset Non Operasional merupakan kumpulan aset tetap yang direklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang telah rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk operasional Pemerintah Kabupaten Wajo serta aset yang di serahkan ke provinsi dan masyarakat.

Nilai perolehan Aset Lain-Lain - Non Operasional milik Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.441.561.931,17 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp112.207.721.120,13 mengalami penurunan sebesar Rp71.766.159.188,96 atau 63,96%.

Perhitungan mutasi Aset Lain-Lain - Non Operasional adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2017 ( <i>audited</i> )	112.207.721.120,13
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2018	112.207.721.120,13
Mutasi Tahun 2018	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari AT-Tanah	1.877.679.950,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	2.276.094.585,78
- Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan	1.182.830.870,00
- Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.004.037.650,00
- Mutasi antar OPD	274.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.614.643.055,78</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengurangan:

- Hibah ke Instansi Vertikal	-1.377.679.950,00
- Hibah ke Pemerintah Provinsi	-1.826.804.991,67
- Hibah ke Masyarakat	-63.432.202.364,09
- Penghapusan Aset Rusak Berat	-11.470.114.938,99
- Mutasi antar OPD	-274.000.000,00

**Jumlah** -78.380.802.244,75

Saldo per 31-12-2018	40.441.561.931,17
Akumulasi Penyusutan	-9.084.186.784,77
Nilai Buku per 31-12-2018	<u><u>31.357.375.146,40</u></u>

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi dari AT-Tanah merupakan reklasifikasi sembilan bidang tanah pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.377.679.950,00 yang akan dihibahkan ke Kodim dan satu bidang tanah pada Dinas Perikanan senilai Rp500.000.000,00 yang dobel pencatatan dengan Pemerintah Provinsi;
- 2) Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin merupakan reklasifikasi senjata api sebanyak 4 unit senilai Rp247.300.000,00 yang akan diserahkan ke Perbakin, aset yang rusak berat senilai Rp1.754.794.585,78, dan mutasi aset berupa bulldoser sebanyak 1 unit senilai Rp250.000.000,00 dan kendaraan bermotor roda 3 sebanyak 1 unit senilai Rp24.000.000,00 dari Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan ke Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan merupakan aset rusak berat senilai Rp1.054.530.870,00 dan AT-Gedung BBI Tempe pada Dinas Perikanan senilai Rp128.300.000,00 yang dobel pencatatan dengan Pemerintah Provinsi;
- 4) Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset rusak berat senilai Rp1.004.037.650,00;
- 5) Hibah ke Instansi Vertikal merupakan hibah satu bidang tanah pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.377.679.950,00 ke Kodim berdasarkan NPHD No 2/PK/II/2018;
- 6) Hibah ke Pemerintah Provinsi merupakan hibah ke P3D Perkebunan berdasarkan BAST Nomor 027/1467.1/XII/2017/Dishut dan Nomor 522.3/8795/DISHUT berupa peralatan dan mesin senilai Rp1.217.789.991,67, gedung dan bangunan senilai Rp498.015.000,00, serta jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp111.000.000,00;
- 7) Hibah ke Masyarakat merupakan jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp63.432.202.364,09;
- 8) Penghapusan Aset Rusak Berat merupakan penghapusan aset berdasarkan SK Bupati Nomor 841 dan Nomor 842 Tahun 2018 berupa peralatan dan mesin senilai Rp6.992.504.437,99, gedung dan bangunan senilai Rp1.362.030.870,00, serta jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp159.864.000,00.

Rincian mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada lampiran 12g.

#### 4.3.2 Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2018 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain



karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wajo juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Wajo atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp62.569.118.511,89 dan Rp29.152.394.238,58 yang terdiri dari:

No	Uraian	2018	2017
1	Kewajiban Jangka Pendek	62.569.118.511,89	29.152.394.238,58
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>62.569.118.511,89</b>	<b>29.152.394.238,58</b>

#### 4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp62.569.118.511,89 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp29.152.394.238,58 mengalami kenaikan sebesar Rp33.416.724.273,30 atau 114,63% dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	214.546,00	0,00	0,00
2 Utang Bunga, Komitmen dan Denda	0,00	0,00	0,00
3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
4 Pendapatan Diterima Dimuka	1.536.627.932,79	3.209.646.511,87	-52,12
5 Utang Belanja	12.832.514.679,08	811.466.242,00	1.481,40
6 Utang Jangka Pendek Lainnya	48.199.761.354,02	25.131.281.484,71	91,79
<b>Jumlah</b>	<b>62.569.118.511,89</b>	<b>29.152.394.238,58</b>	<b>114,63</b>

Pada Tahun 2018 terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pihak ketiga/rekanan, utang retensi, utang beban pegawai, utang beban barang dan jasa serta utang transfer bagi hasil pajak ke desa di setiap OPD untuk dibayarkan pada Tahun 2019.

Untuk mempercepat pembayaran kewajiban/utang kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Wajo menerbitkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wajo TA 2019 dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wajo TA 2019.

Sesuai dengan SPM Tahun 2018 yang belum diterbitkan SP2D adalah sebesar Rp43.748.893.322,08. Namun yang disajikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 hanya sebesar Rp40.430.834.681,08, sedangkan sisanya sebesar sebesar



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp3.318.058.641,00 berupa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa kepada PNS Pemerintah Kabupaten Wajo tidak disajikan sebagai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 karena tidak ada dasar hukum untuk mengakui biaya pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai kewajiban Pemkab Wajo meskipun secara riil telah dilaksanakan.

Rincian kewajiban tersebut per OPD disajikan pada tabel berikut.

SKPD	SPM TA 2018 yang Belum Diterbitkan SP2D pada TA 2018		
	Disajikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek pada LK TA 2018	Tidak Disajikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek pada LK TA 2018	Jumlah
1 Dinas Pendidikan	4.467.629.400,00	443.988.000,00	4.911.617.400,00
2 Dinas Kesehatan	918.525.663,00	0,00	918.525.663,00
3 RSUD Siwa	2.400.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
4 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa	15.712.970.389,00	1.558.645.689,00	17.271.616.078,00
5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	5.695.534.350,00	83.152.800,00	5.778.687.150,00
6 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman &	867.049.750,00	212.979.860,00	1.080.029.610,00
7 Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan	34.200.000,00	133.428.538,00	167.628.538,00
8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	613.675.800,00	7.890.000,00	621.565.800,00
9 Dinas Ketahanan Pangan	1.208.757.000,00	0,00	1.208.757.000,00
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	108.640.000,00	0,00	108.640.000,00
11 Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga	117.538.589,00	45.235.000,00	162.773.589,00
12 Dinas Perhubungan	314.016.500,00	11.795.000,00	325.811.500,00
13 Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	20.000.000,00	2.000.000,00	22.000.000,00
14 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan	42.651.000,00	0,00	42.651.000,00
15 Dinas Pemuda dan Olahraga	42.665.000,00	23.291.000,00	65.956.000,00
16 Dinas Perpustakaan & Kearsipan	47.308.000,00	104.245.000,00	151.553.000,00
17 Dinas Perikanan	853.212.650,00	0,00	853.212.650,00
18 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura &	2.523.127.564,00	0,00	2.523.127.564,00
19 Sekretariat DPRD	315.223.158,00	0,00	315.223.158,00
20 Kecamatan Sabbangparu	136.472.150,00	0,00	136.472.150,00
21 Kecamatan Pammana	25.000.000,00	2.235.000,00	27.235.000,00
22 Kecamatan Bola	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
23 Kecamatan Majauleng	224.574.000,00	0,00	224.574.000,00
24 Kecamatan Belawa	275.677.791,00	131.607.930,00	407.285.721,00
25 Kecamatan Maniangpajo	1.000.000,00	19.510.252,00	20.510.252,00
26 Kecamatan Keera	11.000.000,00	46.020.000,00	57.020.000,00
27 Kecamatan Pitumpanua	192.188.500,00	2.541.000,00	194.729.500,00
28 Kecamatan Penrang	15.000.000,00	64.525.080,00	79.525.080,00
29 Inspektora Daerah	0,00	24.380.000,00	24.380.000,00
30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	258.183.030,00	152.027.000,00	410.210.030,00
31 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	225.490.271,08	0,00	225.490.271,08
32 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	204.555.250,00	88.376.492,00	292.931.742,00
33 Dinas Perdagangan	4.753.475.475,00	139.350.000,00	4.892.825.475,00
34 Dinas Perindustrian	5.475.000,00	0,00	5.475.000,00
35 Sekretariat Daerah	197.618.401,00	3.835.000,00	201.453.401,00
<b>JUMLAH</b>	<b>40.430.834.681,08</b>	<b>3.318.058.641,00</b>	<b>43.748.893.322,08</b>



#### 4.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah Kabupaten Wajo kepada negara atas pemotongan pajak atau pungutan lainnya yang dipungut oleh bendahara pengeluaran namun belum disetor ke kas negara. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2018 sebesar Rp214.546,00, Dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp,00 mengalami kenaikan sebesar Rp214.546,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
1 PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	0,00
2 PPh Pasal 23	9.091,00	0,00	0,00
3 PPN	145.455,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>214.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian Per OPD dapat dilihat di table di bawah ini :

No	OPD	2018	2017
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.091,00	0,00
2	Kecamatan Belawa	209.455,00	0,00
<b>Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>		<b>214.546,00</b>	<b>0,00</b>

Penyetoran ke Kas Negara dan Kas Daerah atas Utang PFK tersebut telah dilakukan pada Tahun 2019.

Rincian mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dapat dilihat pada Lampiran 13a

#### 4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka dari pendapatan pajak reklame, pajak retribusi izin gangguan dan pendapatan dari sewa gedung serta Pendapatan Sewa Lahan atas Pelelangan Ex-Ornament yang diterima lebih dari tanggal pelaporan. Pendapatan diterima dimuka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.536.627.932,79 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp3.209.646.511,87 mengalami penurunan sebesar Rp-1.673.018.579,09 atau -52,12% dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
<b>1 RSUD Lamadukkelleng</b>			
Sewa Gedung (Alfa Mart)	153.333.333,33	233.333.333,33	-34,29
Sewa Lahan (ATM BRI)	30.000.000,00	60.000.000,00	-50,00
Sewa Lahan (ATM Bank Sulselbar)	19.000.000,00	0,00	0,00
<b>2 BPKAD</b>			
Sewa Lahan (ATM Bank Sulsebar)	24.916.666,67	0,00	0,00
<b>3 Badan Pendapatan Daerah</b>			
Pajak Reklame	614.149.796,67	604.770.425,75	1,55
<b>4 Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu</b>			
Izin Gangguan - HO	322.216.944,45	784.714.986,12	-58,94
Izin Trayek	7.625.000,00	0,00	0,00
<b>5 Dinas Perikanan</b>			
Ex-Ornament	365.386.191,67	1.526.827.766,67	-76,07
<b>Jumlah</b>	<b>1.536.627.932,79</b>	<b>3.209.646.511,87</b>	<b>-52,12</b>

Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 13d



#### 4.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja timbul karena Pemerintah Kabupaten Wajo menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, Utang belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.832.514.679,08 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp811.466.242,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.021.048.437,08 atau 1.481,40%, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
1 Belanja Pegawai	2.478.713.374,00	9.013.596,00	27.399,72
2 Belanja Barang dan Jasa	9.594.385.063,00	495.526.675,00	1.836,20
3 Belanja Transfer	532.416.242,08	306.925.971,00	73,47
4 Belanja Hibah	227.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.832.514.679,08</b>	<b>811.466.242,00</b>	<b>1.481,40</b>

Rincian mutasi Utang Beban dapat dilihat pada Lampiran 13e

#### 4.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang di atas, Utang Jangka Pendek lainnya berupa Klaim Jamkesda, Klaim JKN Kapitasi dan Non Kapitasi. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp48.199.761.354,02 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp25.131.281.484,71 mengalami kenaikan sebesar Rp23.068.479.869,31 atau 91,79% dengan rincian sebagai berikut:

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp48.199.761.354,02 merupakan utang kepada pihak ketiga antara lain utang dari perhitungan pelaksanaan proyek yang fisiknya sudah mencapai 100%, namun realisasi keuangan belum mencapai 100%, Klaim Jamkesda, Klaim JKN Kapitasi dan Non Kapitasi. Dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp25.131.281.484,71 mengalami kenaikan sebesar Rp23.068.479.869,31 atau 91,79% dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2017 ( <i>audited</i> )	25.131.281.484,71
Koreksi Saldo:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2018	25.131.281.484,71
Penambahan:	
- Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2018	45.695.573.426,32
Pengurangan:	
- Pembayaran kepada pihak ketiga	-22.627.093.557,01
Saldo per 31-12-2018	48.199.761.354,02

Rincian Per OPD dapat dilihat di table di bawah ini :

No	OPD	2018	2017
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	741.309.016,40	94.438.016,40
2	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi Dan Penataan Ruang	17.649.550.819,00	5.701.895.230,00
3	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3.537.858.200,00	10.050.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	15.020.559.663,97	17.143.534.353,41



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	Sekretariat Daerah	19.213.750,00	8.263.750,00
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	123.565.500,00	115.465.500,00
7	Dinas Perikanan	632.554.650,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	949.344.978,00	718.581.623,90
9	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	1.010.980.000,00	0,00
10	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	9.595.000,00	48.348.200,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	589.500.800,00	507.641.400,00
12	Badan Pendapatan Daerah	0,00	8.366.850,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	74.586.900,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	4.500.000,00
15	Kecamatan Pitumpanua	188.255.500,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	239.298.500,00	0,00
17	Sekretariat DPRD	303.269.588,00	0,00
18	Kecamatan Pammana	25.000.000,00	0,00
19	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	1.784.051.763,65	694.159.661,00
20	Kecamatan Sabbangparu	124.272.150,00	0,00
21	Kecamatan Belawa	175.684.000,00	0,00
22	Kecamatan Majauleng	224.574.000,00	0,00
23	Dinas Perdagangan	4.649.675.475,00	0,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38.058.000,00	0,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.000.000,00	0,00
26	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	36.180.000,00	0,00
27	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	30.000,00
28	Kecamatan Keera	0,00	1.420.000,00
29	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	119.360.000,00	0,00
30	Kecamatan Penrang	4.050.000,00	0,00
<b>Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya</b>		<b>48.199.761.354,02</b>	<b>25.131.281.484,71</b>

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 13f.

#### 4.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.924.613.580.307,20 dibanding dengan ekuitas akhir di tahun 2017 sebesar Rp2.885.148.022.930,11, mengalami kenaikan sebesar Rp39.465.557.377,10 atau 1,37% dengan rincian sebagai berikut:

Ekuitas	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
<b>A. EKUITAS AWAL</b>	<b>2.885.148.022.930,11</b>	<b>2.749.099.142.433,47</b>	<b>4,95</b>
<b>B. SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>-3.983.787.378,37</b>	<b>131.195.848.687,85</b>	<b>-103,04</b>
<b>C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>			
Koreksi Nilai Persediaan	99.217.513,16	8.986.757,10	1.004,04
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	43.350.127.242,31	4.844.045.051,68	794,92
<b>Sub Jumlah C</b>	<b>43.449.344.755,47</b>	<b>4.853.031.808,78</b>	<b>795,30</b>
<b>Jumlah A + B + C</b>	<b>2.924.613.580.307,20</b>	<b>2.885.148.022.930,11</b>	<b>1,37</b>





#### 4.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten wajo untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

##### 4.4.1 Pendapatan – LO

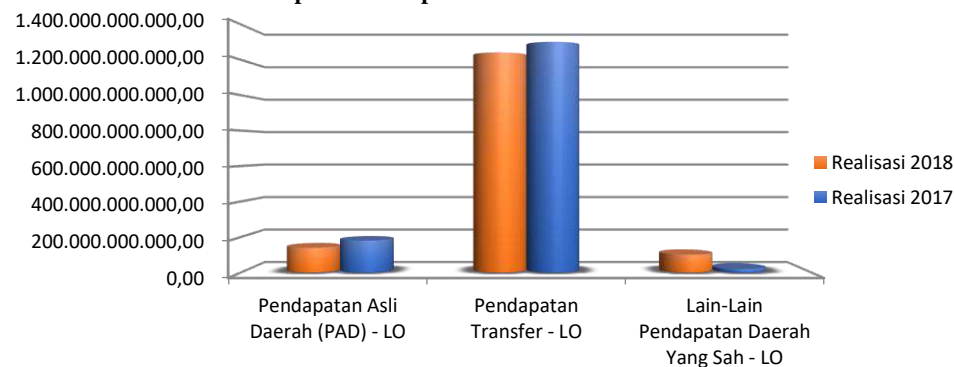
Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Wajo dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan-LO Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.481.986.659.929,68 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.501.347.667.780,31, mengalami penurunan sebesar Rp-19.361.007.850,63 atau -1,29%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan – LO	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	139.762.789.284,32	180.481.176.630,23	-22,56
2 Pendapatan Transfer - LO	1.240.763.109.166,00	1.300.767.759.314,00	-4,61
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	101.460.761.479,36	20.098.731.836,08	404,81
<b>Jumlah</b>	<b>1.481.986.659.929,68</b>	<b>1.501.347.667.780,31</b>	<b>-1,29</b>

Grafik 4.6

Komposisi Pendapatan - LO Tahun 2018



##### 4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp139.762.789.284,32 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp180.481.176.630,23, mengalami penurunan sebesar Rp -40.718.387.345,90 atau -22,56% , dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah - LO	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (Rp)
1 Pendapatan Pajak Daerah - LO	35.462.507.805,58	32.321.111.564,92	9,72
2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	12.797.799.126,87	13.483.047.744,68	-5,08
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	14.144.241.966,00	15.383.403.123,82	-8,06
4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO	77.358.240.385,87	119.293.614.196,81	-35,15
<b>Jumlah</b>	<b>139.762.789.284,32</b>	<b>180.481.176.630,23</b>	<b>-22,56</b>



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah PAD yang dipungut dan dikelola oleh Bapenda Kabupaten Wajo. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2018, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang diterbitkan pada Tahun 2018 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp35.462.507.805,58 mengalami kenaikan sebesar Rp3.141.396.240,66 dibandingkan dengan tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp32.321.111.564,92 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah - LO	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (Rp)
1 Pajak Hotel - LO	162.508.045,00	179.154.500,00	-9,29
2 Pajak Restoran - LO	3.850.114.676,00	3.452.208.903,00	11,53
3 Pajak Hiburan - LO	51.419.125,00	60.587.475,00	-15,13
4 Pajak Reklame - LO	1.483.964.541,08	1.237.563.873,42	19,91
5 Pajak Penerangan Jalan - LO	13.328.147.853,00	11.983.692.402,00	11,22
6 Pajak Parkir - LO	0,00	15.200.000,00	-100,00
7 Pajak Air Tanah - LO	5.097.796,00	5.398.316,00	-5,57
8 Pajak Sarang Burung Walet - LO	5.200.000,00	4.300.000,00	20,93
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.716.893.339,00	1.973.630.422,00	-13,01
10 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	12.797.674.749,00	11.929.777.382,00	7,28
11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	2.061.487.681,50	1.479.598.291,50	39,33
<b>Jumlah</b>	<b>35.462.507.805,58</b>	<b>32.321.111.564,92</b>	<b>9,72</b>

4.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 12 SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Wajo didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah ditetapkan melalui Perda.

Pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp12.797.799.126,87 mengalami penurunan sebesar Rp-685.248.617,81 dibandingkan dengan tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp13.483.047.744,68 dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan Retribusi Daerah- LO	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (Rp)
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	4.584.138.800,00	4.454.245.916,00	2,92
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	126.362.000,00	118.743.000,00	6,42
3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	151.625.000,00	117.130.000,00	29,45
4 Retribusi Pelayanan Pasar - LO	3.483.417.000,00	3.316.905.000,00	5,02
5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	110.275.000,00	99.675.000,00	10,63
6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	37.510.000,00	31.820.000,00	17,88
7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	55.242.400,00	0,00	0,00
8 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	0,00	0,00	0,00
9 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	144.500.000,00	215.550.000,00	-32,96
10 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	234.739.810,00	234.739.810,00	0,00
11 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.887.835.675,00	1.738.012.083,33	8,62



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12 Retribusi Tempat Pelelangan - LO	15.010.500,00	10.006.000,00	50,01
13 Retribusi Terminal - LO	418.443.000,00	378.301.000,00	10,61
14 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	13.305.000,00	13.225.000,00	0,60
15 Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	73.400.000,00	74.350.000,00	-1,28
16 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	501.285.800,00	424.745.000,00	18,02
17 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	75.273.000,00	69.116.000,00	8,91
18 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	422.513.100,20	1.550.446.171,91	-72,75
19 Retribusi Izin Gangguan - LO	462.498.041,67	627.637.763,43	-26,31
20 Retribusi Izin Trayek - LO	425.000,00	8.400.000,00	-94,94
<b>Jumlah</b>	<b>12.797.799.126,87</b>	<b>13.483.047.744,68</b>	<b>-5,08</b>

#### 4.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp14.144.241.966,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp-1.239.161.157,82 dibandingkan dengan TA 2017 yang terealisasi sebesar Rp15.383.403.123,82.

#### 4.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode Per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017 Sebesar Rp77.358.240.385,87 mengalami penurunan sebesar Rp-41.935.373.810,94 atau -35,15 rincian sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (Rp)
1 Penerimaan Jasa Giro - LO	3.048.688.508,00	3.537.868.003,00	-13,83
2 Pendapatan Bunga - LO	725.558.981,00	2.224.458.622,89	-67,38
3 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	3.154.244.066,07	386.259.549,66	716,61
4 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	170.530.676,02	1.041.143.095,45	-83,62
5 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	0,00	0,00	0,00
6 Pendapatan BLUD - LO	57.303.544.167,00	54.247.610.307,00	5,63
7 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	1.258.197.100,78	4.887.580.668,81	-74,26
8 Hasil dari pengelolaan dana bergulir	0,00	31.000.000,00	-100,00
9 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	11.697.476.887,00	11.007.558.449,00	6,27
10 Dana Bos - LO	0,00	41.930.135.501,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>77.358.240.385,87</b>	<b>119.293.614.196,81</b>	<b>-35,15</b>

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan realisasi penerimaan jasa giro kas daerah yang terdapat pada rekening Bank Sulselbar Cabang Sengkang sebesar Rp3.048.674.176,00 dan giro kas bendahara terdapat pada rekening giro BNI Cabang Sengkang yang dikelola dinas kesehatan untuk penampungan dana BPJS/Askes sebesar Rp14.332,00.

Realisasi pendapatan bunga merupakan realisasi penerimaan atas bunga deposito Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT. Bank Sulselbar, PT. BNI (Persero) dan PT. BRI (Persero) Cabang Sengkang.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan realisasi atas pengembalian belanja dari tahun-tahun sebelumnya serta penerimaan lain-lain yang bukan penerimaan tahun berjalan sebesar Rp1.279.969.267,45 dan Penerimaan atas hasil penjualan benih ikan unggul sebesar Rp80.900.000.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk pendapatan dana BOS tahun 2018, tidak lagi di catat pada Pendapatan Asli Daerah Lainnya, namun dicatat di pendapatan hibah dana bos untuk satuan pendidikan negeri pada

#### 4.4.1.2 Pendapatan Transfer— LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh BPKAD Kabupaten Wajo. Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.240.763.109.166,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.300.767.759.314,00, mengalami penurunan sebesar Rp-60.004.650.148,00 atau -4,61%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017
1	<b>Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>	<b>1.057.342.338.416,00</b>	<b>1.108.701.941.740,00</b>
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	32.021.411.847,00	75.330.381.088,00
	b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	30.666.780.272,00	0,00
	c. Dana Alokasi Umum	714.224.148.000,00	710.492.759.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus	280.429.998.297,00	322.878.801.652,00
2	<b>Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>	<b>122.163.127.626,00</b>	<b>118.665.440.600,00</b>
	a. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
	b. Dana Penyesuaian	122.163.127.626,00	118.665.440.600,00
3	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>61.257.643.124,00</b>	<b>72.297.922.574,00</b>
	a. Bagi Hasil Pajak	61.257.643.124,00	72.297.922.574,00
	b. Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
4	<b>Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.454.400,00</b>
	a. Bantuan Keuangan	0,00	1.102.454.400,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer - LO</b>		<b>1.240.763.109.166,00</b>	<b>1.300.767.759.314,00</b>

Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Transfer TA 2018 dapat dijelaskan sebagai

#### 4.4.1.2.1 Bagi Hasil Pajak - LO

Bagi Hasil Pajak – LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp32.021.411.847,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp75.330.381.088,00, mengalami penurunan sebesar Rp-43.308.969.241,00 atau -57,49%, dengan rincian sebagai berikut:

Bagi Hasil Pajak – LO	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	0,00	28.435.366.286,00	-100,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	0,00	8.435.946,00	-100,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	6.986.509.477,00	8.882.992.111,00	-21,35
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	239.555.074,00	248.444.685,00	-3,58
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dari Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagi Rata - LO	24.795.347.296,00	37.755.142.060,00	-34,33
<b>Jumlah</b>	<b>32.021.411.847,00</b>	<b>75.330.381.088,00</b>	<b>-57,49</b>

#### 4.4.1.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.666.780.272,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp0,00, mengalami kenaikan sebesar Rp30.666.780.272,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:



*Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>	<b>Tren</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(%)</b>
Bagi Hasil Sektor Pertambangan dari Sumber Daya Air dan Batu Bara - LO	3.791.904.256,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Sektor Pertambangan dari Hasil Perikanan - LO	800.419.262,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Sektor Pertambangan dari Hasil Kehutanan - LO	43.614.607,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Sektor Pertambangan Gas Bumi - LO	26.030.842.147,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>30.666.780.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **4.4.1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO**

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp714.224.148.000,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp710.492.759.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.731.389.000,00 atau 0,53%.

#### **4.4.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO**

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp280.429.998.297,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp322.878.801.652,00, mengalami penurunan sebesar Rp-42.448.803.355,00 atau -13,15%, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>	<b>Tren</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO</b>			
DAK Bidang Pendidikan - LO	18.020.552.000,00	7.368.800.500,00	144,55
Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler) - LO	0,00	6.481.091.384,00	-100,00
Bidang Pelayanan Rujukan Prioritas Daerah (DAK Reguler) - LO	0,00	25.750.000.000,00	-100,00
Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian (DAK Reguler) - LO	0,00	4.132.000.000,00	-100,00
Bidang Keluarga Berencana (DAK Reguler) - LO	0,00	1.266.443.000,00	-100,00
Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK Reguler) - LO	6.214.830.000,00	8.467.864.596,00	-26,61
Bidang Pertanian (DAK Reguler) - LO	4.811.320.020,00	6.986.473.000,00	-31,13
Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Reguler) - LO	1.443.298.000,00	2.437.086.000,00	-40,78
Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK Reguler) - LO	2.561.367.000,00	1.000.000.000,00	156,14
Bidang Penataan Kawasan Pariwisata (DAK Reguler) - LO	0,00	1.507.098.000,00	-100,00
Bidang Prioritas Daerah - Jalan (DAK Penugasan) - LO	0,00	90.985.609.000,00	-100,00
Bidang Pasar (DAK Penugasan) - LO	605.500.000,00	1.501.788.000,00	-59,68
Bidang Pendukung Kedaulatan Pangan Irigasi (DAK Penugasan) - LO	19.651.762.000,00	5.960.359.500,00	229,71
Bidang Air Minum dan Sanitasi (DAK Penugasan) - LO	6.527.091.000,00	0,00	0,00
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK Penugasan) - LO	708.855.000,00	0,00	0,00
Bidang Kesehatan (DAK Reguler) - LO	30.996.983.541,00	0,00	0,00
Bidang Air Minum (DAK Reguler) - LO	1.126.940.000,00	0,00	0,00
Bidang Pariwisata (DAK Reguler) - LO	1.782.686.900,00	0,00	0,00
Bidang Jalan - Proritas Daerah (DAK Reguler) - LO	36.951.668.165,00	0,00	0,00
Penyelesaian DAK 2016 - LO	0,00	20.515.924.000,00	-100,00
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO</b>			
Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ( Pendidikan) - LO	7.134.600.000,00	7.857.000.000,00	-9,19
Bidang Tunjangan Profesi Guru (Pendidikan) - LO	120.123.660.630,00	114.144.092.075,00	5,24
Bidang Tambahan Penghasilan Guru (Pendidikan) - LO	789.900.000,00	1.364.250.000,00	-42,10
Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LO	12.550.020.601,00	11.726.364.347,00	7,02



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bidang Akreditasi Puskesmas (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LO	1.750.000.000,00	665.695.000,00	162,88
Bidang Jaminan Persalinan (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LO	1.496.145.000,00	699.590.250,00	113,86
Bidang Bantuan Operasional KB (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LO	3.794.527.300,00	785.757.000,00	382,91
Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	1.388.291.140,00	1.275.516.000,00	8,84
<b>Jumlah</b>	<b>280.429.998.297,00</b>	<b>322.878.801.652,00</b>	<b>-13,15</b>

**4.4.1.2.5 Dana Penyesuaian - LO**

Dana Penyesuaian - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp122.163.127.626,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp118.665.440.600,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.497.687.026,00 atau 2,95%, dengan rincian sebagai berikut:

**4.4.1.2.6 Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi- LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp61.257.643.124,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp72.297.922.574,00, mengalami penurunan sebesar Rp-11.040.279.450,00 atau -15,27%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	14.830.449.009,00	16.739.259.610,00	-11,40
Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	10.768.542.452,00	14.152.548.283,00	-23,91
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	18.398.479.219,00	20.659.065.976,00	-10,94
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	100.616.098,00	165.581.369,00	-39,23
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok - LO	17.159.556.346,00	20.581.467.336,00	-16,63
<b>Jumlah</b>	<b>61.257.643.124,00</b>	<b>72.297.922.574,00</b>	<b>-15,27</b>

**4.4.1.2.7 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LO**

Bantuan Keuangan - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.102.454.400,00, mengalami penurunan sebesar Rp-1.102.454.400,00 atau -100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Bantuan Keuangan - LO	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
Program Kesehatan Gratis	0,00	1.102.454.400,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.454.400,00</b>	<b>-100,00</b>

**4.4.1.3 Lain Lain Pendapatan yang Sah- LO**

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Wajo adalah Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017
1	Pendapatan Hibah – LO	101.460.761.479,36	20.098.731.836,08
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO</b>		<b>101.460.761.479,36</b>	<b>20.098.731.836,08</b>

Realisasi Pendapatan Hibah – LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp101.460.761.479,36 dibanding dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp20.098.731.836,08 mengalami kenaikan sebesar Rp81.362.029.643,28 atau 200,61% dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	2018	2017
1	Dana IPDMIP	382.045.232,00	1.085.463.637,00
2	Hibah Ke PDAM	2.697.000.000,00	1.704.000.000,00
3	Hibah Persediaan Obat	3.382.694.902,00	669.703.725,30
4	Hibah Persediaan Alat Kesehatan	1.628.624.607,36	1.202.272.659,78
5	Hibah Aset dari Kementerian Kesehatan	15.091.348.518,00	0,00
6	Hibah Aset dari Pemerintah Provinsi	0,00	956.050.870,00
7	Hibah Aset dari Kementerian Pendidikan	5.592.517.873,00	11.990.457.000,00
8	Hibah Aset dari Kementerian Transmigrasi	27.689.974.000,00	0,00
9	Hibah Aset dari Kementerian PU	0,00	2.490.783.944,00
10	Hibah Dana BOS	40.973.426.756,00	0,00
11	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	68.471.000,00	0,00
10	Program Kesehatan Gratis	2.954.658.591,00	0,00
11	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.000.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Hibah - LO</b>		<b>101.460.761.479,36</b>	<b>20.098.731.836,08</b>

Pendapatan Hibah berupa uang untuk kegiatan IPDMIP diperuntukkan kepada Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Dinas Pertanian dan ke PDAM. Hibah berupa barang persediaan obat dan alat kesehatan dari Pemerintah Provinsi diperuntukkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hibah berupa Aset Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Provinsi diperuntukkan kepada RSUD Siwa dan Dinas Pendidikan, serta Aset Peralatan Mesin dari Kementerian PU diperuntukkan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Pendapatan Hibah Dana BOS – LO Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 40.973.426.756,00 dibanding dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp per 31 Desember atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017
1	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan SD		
	a. Transfer Dana BOS dari Pemerintah Provinsi	28.443.040.000,00	0,00
	b. Lain-lain Pendapatan Dana BOS	236.756,00	0,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan SMP		
	a. Transfer Dana BOS dari Pemerintah Provinsi	12.530.000.000,00	0,00
	b. Lain-lain Pendapatan Dana BOS	150.000,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Hibah Dana BOS - LO</b>		<b>40.973.426.756,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.4.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jumlah Beban untuk periode s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp1.425.392.142.257,70 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.277.811.545.191,60 mengalami kenaikan sebesar Rp147.580.597.066,10 atau 11,55%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
1 Beban Pegawai	591.354.676.801,30	540.821.043.084,00	9,34
2 Beban Persediaan	102.413.551.528,40	65.151.663.898,64	57,19
3 Beban Jasa	146.079.225.732,01	198.475.766.505,30	-26,40
4 Beban Perjalanan Dinas	72.957.858.377,00	80.546.940.156,00	-9,42



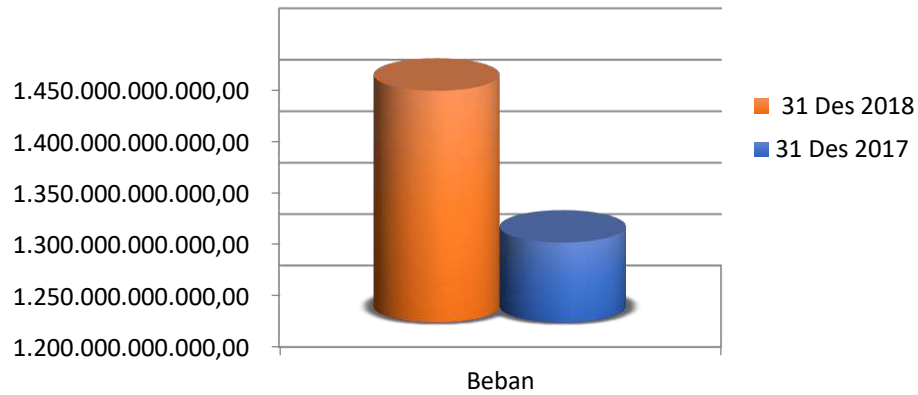
Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	Beban Pemeliharaan	18.193.854.324,23	11.076.936.622,04	64,25
6	Beban Bunga	0,00	13.428.814,08	-100,00
7	Beban Hibah	66.442.686.988,00	54.588.144.188,60	21,72
8	Beban Bantuan Sosial	6.034.000.000,00	39.725.000,00	15.089,43
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	188.605.554.063,77	171.786.993.090,30	9,79
10	Beban Penyisihan	2.113.862.062,05	1.323.527.351,82	59,71
11	Beban Transfer	230.110.241.650,17	153.987.376.480,83	49,43
12	Beban Lain-lain	1.086.630.730,77	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.425.392.142.257,70</b>	<b>1.277.811.545.191,60</b>	<b>11,55</b>

Komposisi Realisasi Beban Kabupaten Wajo sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik 4.7

Komposisi Beban Tahun 2018



Sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010, beban dapat diungkapkan per SKPD. Rincian Beban per SKPD adalah sebagai berikut:

SKPD	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	283.125.730.921,69	264.469.252.577,85	7,05
2 Dinas Kesehatan	98.714.967.722,14	79.660.020.920,14	23,92
3 Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	80.156.704.551,78	75.713.897.945,79	5,87
4 Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	17.493.068.661,08	13.839.737.414,20	26,40
5 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi Dan Penataan Ruang	120.324.460.247,66	105.932.303.565,21	13,59
6 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	18.416.977.942,67	15.355.896.834,00	19,93
7 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	7.105.334.421,67	15.641.488.563,66	-54,57
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.685.101.197,50	12.484.269.176,84	-14,41
9 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.384.648.259,00	2.971.811.841,00	13,89
10 Dinas Perhubungan	8.972.259.534,09	9.430.863.647,58	-4,86
11 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	5.022.548.631,37	4.341.258.388,59	15,69
12 Dinas Lingkungan Hidup	9.266.876.511,17	10.019.756.925,33	-7,51
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.559.688.651,67	6.479.178.103,67	1,24
14 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.093.226.261,17	2.752.268.591,00	12,39
15 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.329.778.969,41	13.472.424.046,59	-30,75
16 Dinas Sosial	4.733.229.231,00	4.502.514.990,00	5,12
17 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	11.678.318.920,92	8.522.868.794,08	37,02
18 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	3.679.603.651,00	4.142.155.330,83	-11,17
19 Dinas Perindustrian	4.035.357.638,17	4.108.663.961,00	-1,78
20 Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.395.728.461,50	5.235.489.838,00	3,06
21 Dinas Pariwisata	4.689.929.665,33	4.197.134.068,33	11,74
22 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.607.925.138,00	5.431.573.339,00	-15,16
23 DPRD	0,00	10.102.695.059,00	-100,00
24 Bupati/Wakil Bupati	690.624.678,00	557.684.290,00	23,84





*Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

25	Sekretariat Daerah	43.403.857.418,67	51.961.781.557,50	-16,47
26	Sekretariat DPRD	41.493.546.461,00	24.524.659.466,93	69,19
27	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	22.770.981.403,20	23.761.232.273,28	-4,17
28	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD)	282.644.354.373,14	181.120.653.463,43	56,05
29	Inspektorat Daerah	7.916.784.211,00	7.794.622.768,42	1,57
30	Badan Pendapatan Daerah	14.140.170.892,49	14.200.122.670,73	-0,42
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.722.744.995,66	11.650.076.331,34	-25,13
32	Satuan Polisi Pamong Praja	7.985.219.529,50	7.974.185.765,67	0,14
33	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.627.849.959,33	4.521.076.611,34	2,36
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.685.310.602,67	7.524.368.600,00	-11,15
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	5.710.304.441,00	4.398.885.848,00	29,81
36	Kecamatan Tempe	35.048.327.603,00	34.254.527.693,00	2,32
37	Kecamatan Sabbangparu	16.599.830.171,00	16.080.915.140,00	3,23
38	Kecamatan Pammana	16.628.339.614,00	16.736.504.405,00	-0,65
39	Kecamatan Bola	9.059.285.197,25	8.902.612.602,00	1,76
40	Kecamatan Takkalalla	8.802.718.014,00	8.266.777.391,67	6,48
41	Kecamatan Sajoanging	9.099.430.333,66	8.560.813.217,67	6,29
42	Kecamatan Majauleng	17.388.364.441,00	16.958.057.691,00	2,54
43	Kecamatan Tanasitolo	19.117.279.979,33	18.661.125.333,00	2,44
44	Kecamatan Belawa	12.885.066.063,00	12.649.581.498,67	1,86
45	Kecamatan Maniangpajo	11.034.373.214,00	10.826.260.588,00	1,92
46	Kecamatan Keera	7.612.616.369,33	7.285.903.217,00	4,48
47	Kecamatan Pitumpanua	14.064.442.695,00	13.356.884.344,00	5,30
48	Kecamatan Penrang	7.542.406.689,33	6.931.919.428,34	8,81
49	Kecamatan Gilireng	6.930.557.542,00	6.537.569.528,00	6,01
50	Dinas Ketahanan Pangan	7.087.701.328,67	8.427.310.988,00	-15,90
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.778.836.585,00	8.368.255.354,00	-30,94
52	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.774.043.832,33	2.963.936.054,67	27,33
53	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	29.446.553.830,16	32.533.832.279,34	-9,49
54	Dinas Perkebunan	4.984.169.506,50	5.573.018.078,43	-10,57
55	Dinas Perikanan	7.934.171.793,17	8.257.025.502,83	-3,91
56	Dinas Perdagangan	7.310.413.300,33	6.881.841.288,67	6,23
<b>Jumlah</b>		<b>1.425.392.142.257,70</b>	<b>1.277.811.545.191,61</b>	<b>11,55</b>

Masing-masing akun Beban - LO dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 4.4.2.1 **Beban Pegawai**

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2018 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2018.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp591.354.676.801,30 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp540.821.043.084,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.533.633.717,30 atau 9,34%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	309.003.860.816,00	317.782.296.917,00	-2,76
Beban Tunjangan Keluarga - LO	26.130.269.913,00	25.181.210.270,00	3,77
Beban Tunjangan Jabatan - LO	11.832.900.500,00	11.156.571.850,00	6,06
Beban Tunjangan Fungsional - LO	22.242.923.000,00	21.466.216.000,00	3,62
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	3.482.349.000,00	3.561.631.000,00	-2,23
Beban Tunjangan Beras - LO	14.230.766.820,00	14.890.808.370,00	-4,43



**Pemerintah Kabupaten Wajo**  
**Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017**  
**(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	608.539.593,00	570.721.230,00	6,63
Beban Pembulatan Gaji - LO	3.879.007,00	3.783.382,00	2,53
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	8.586.799.044,00	8.905.285.303,00	-3,58
Beban Uang Paket - LO	76.482.000,00	76.482.000,00	0,00
Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	26.491.500,00	26.491.500,00	0,00
Beban Tunjangan Komisi - LO	51.521.400,00	51.521.400,00	0,00
Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	26.491.500,00	26.491.500,00	0,00
Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	8.708.700,00	9.317.700,00	-6,54
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	0,00	32.109.525,00	-100,00
Beban Tunjangan Perumahan - LO	3.066.000.000,00	2.598.000.000,00	18,01
Beban Tunjangan Pengamanan Persandian - LO	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Beban Bahaya Radiasi - LO	76.100.000,00	96.950.000,00	-21,51
Belanja Iuran Asuransi Ketenagakerjaan - LO	3.084.472.455,00	1.463.465.977,00	110,76
Tunjangan Transportasi - LO	4.173.600.000,00	1.406.000.000,00	196,84
Tunjangan Badan Legislasi - LO	14.798.700,00	2.466.450,00	500,00
Tunjangan Panitia Khusus - LO	25.197.375,00	7.764.750,00	224,51
Tunjangan Komunikasi Intensif - LO	5.040.000.000,00	579.600.000,00	769,57
Tunjangan Reses - LO	1.249.500.000,00	252.000.000,00	395,83
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	56.201.171.406,30	122.669.310.500,00	-54,18
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	1.653.300.000,00	1.283.050.000,00	28,86
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	117.787.418.800,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	0,00	2.615.760.000,00	-100,00
Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	732.600.050,00	400.000.000,00	83,15
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	1.487.382.422,00	1.407.570.463,00	5,67
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	0,00	593.873.197,00	-100,00
Beban Uang Lembur PNS - LO	0,00	1.174.888.000,00	-100,00
Beban Uang Lembur Non PNS - LO	433.152.800,00	511.405.800,00	-15,30
<b>Jumlah</b>	<b>591.354.676.801,30</b>	<b>540.821.043.084,00</b>	<b>9,34</b>

#### 4.4.2.2 **Beban Persediaan**

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Jumlah Beban Persediaan untuk periode s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp102.413.551.528,40 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp65.151.663.898,64 mengalami kenaikan sebesar Rp37.261.887.629,77 atau 57,19%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Persediaan	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	13.139.908.382,00	10.667.449.052,75	23,18
Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	78.000.000,00	-100,00
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	454.683.100,00	833.010.809,00	-45,42
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	493.386.000,00	413.782.000,00	19,24
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	556.084.950,00	703.383.444,00	-20,94
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	911.523.637,00	1.235.329.378,00	-26,21
Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	11.090.000,00	13.639.800,00	-18,69
Beban Perlengkapan Medis	3.315.000,00	0,00	0,00
Beban Alat Rumah Tangga Kantor	1.126.366.903,00	0,00	0,00



*Pemerintah Kabupaten Wajo*  
*Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	1.375.512.240,00	2.345.895.473,00	-41,37
Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	516.312.500,00	1.688.081.500,00	-69,41
Beban Persediaan Bibit Ternak	177.704.750,00	125.212.000,00	41,92
Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	6.730.227.548,79	3.760.060.048,72	78,99
Beban Persediaan Bahan Kimia	33.580.500,00	40.361.000,00	-16,80
Beban Persediaan Makanan Pokok	1.270.003.800,00	764.560.000,00	66,11
Beban Bahan Praktik/Demonstrasi	244.472.000,00	439.015.562,00	-44,31
Beban Bahan Pameran	126.099.500,00	311.255.000,00	-59,49
Beban Bahan Alat Kesehatan	6.019.960.430,40	4.997.826.839,50	20,45
Beban Kelengkapan Komputer	6.150.000,00	25.400.000,00	-75,79
Beban Kelengkapan Alat Olahraga	37.020.000,00	36.675.000,00	0,94
Beban Asesoris Kendaraan	4.973.000,00	59.966.800,00	-91,71
Beban Bahan/Material Lainnya	1.132.142.680,00	1.921.476.400,00	-41,08
Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	2.626.771.599,00	-100,00
Beban Cetak	4.847.613.978,00	4.719.766.544,00	2,71
Beban Penggandaan	4.658.482.079,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.583.222.250,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	9.266.725.800,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Tamu	5.365.943.660,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	981.412.100,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Pasien	209.535.000,00	0,00	0,00
Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	164.771.000,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	140.536.000,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	199.790.000,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	99.944.000,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	81.268.000,00	0,00	0,00
Beban Pakaian kerja lapangan	271.951.000,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Adat Daerah	94.767.000,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	278.987.000,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Olahraga	702.850.000,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Khusus	574.580.100,00	0,00	0,00
Beban Hadiah Lomba/Penghargaan/Cendramata	0,00	1.401.478.500,00	-100,00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	299.885.000,00	-100,00
Beban Persediaan BLUD	18.542.900.321,21	19.010.060.472,66	-2,46
Beban Persediaan BOS	12.977.755.319,00	6.633.321.676,00	95,64
<b>Jumlah</b>	<b>102.413.551.528,40</b>	<b>65.151.663.898,64</b>	<b>57,19</b>

#### 4.4.2.3 **Beban Jasa**

Jumlah Beban Jasa untuk periode s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp146.079.225.732,01 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp198.475.766.505,30 mengalami penurunan sebesar Rp-52.396.540.773,29 atau -26,40%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Jasa	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
Beban Jasa telepon	1.207.593.420,00	1.012.367.031,00	19,28
Beban Jasa air	287.235.004,00	326.626.619,00	-12,06
Beban Jasa listrik	12.443.788.870,00	11.261.344.695,00	10,50
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	2.799.042.000,00	3.556.532.400,00	-21,30
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1.388.963.310,00	1.240.372.789,00	11,98
Beban Jasa Paket/Pengiriman	6.900.000,00	279.981.336,00	-97,54
Beban Jasa Sertifikasi	109.500.000,00	4.000.000,00	2.637,50
Beban Jasa Penjaga Kantor	87.600.000,00	63.900.000,00	37,09



*Pemerintah Kabupaten Wajo*  
*Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018*  
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017*  
*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Beban Jasa Penyiaran/Publikasi Berita	1.420.212.000,00	1.746.825.000,00	-18,70
Beban Jasa Kerjasama	12.000.000,00	47.000.000,00	-74,47
Beban Jasa Kantor Lainnya	894.072.600,00	1.433.577.416,00	-37,63
Beban Tunggakan PBB	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	7.046.174.874,00	2.909.396.210,00	142,19
Beban Jasa Service	0,00	665.662.784,00	-100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.269.712.094,00	-100,00
Beban Jasa KIR	0,00	1.328.500,00	-100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	1.491.850,00	-100,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	326.947.904,72	-100,00
Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	3.150.000,00	-100,00
Beban Penggandaan	0,00	4.216.625.302,00	-100,00
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	7.567.872.300,00	-100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	9.946.923.400,00	-100,00
Beban Makanan dan Minuman Tamu	0,00	4.994.399.084,00	-100,00
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	967.246.330,00	-100,00
Beban Makanan dan Minuman Pasien	0,00	193.890.000,00	-100,00
Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	243.950.000,00	-100,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	215.948.000,00	-100,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	69.000.000,00	-100,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	1.085.073.250,00	-100,00
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	138.724.000,00	-100,00
Beban Pakaian kerja lapangan	0,00	514.221.000,00	-100,00
Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	269.358.000,00	-100,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	336.481.700,00	-100,00
Beban Pakaian Olahraga	0,00	1.070.953.500,00	-100,00
Beban Pakaian Khusus	0,00	549.590.000,00	-100,00
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.427.592.450,00	2.050.505.682,00	-30,38
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	100.475.000,00	99.000.000,00	1,49
Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	0,00	20.000.000,00	-100,00
Beban Sewa Stand Pameran	120.448.000,00	192.800.000,00	-37,53
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	445.052.528,00	548.350.000,00	-18,84
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Buldoser	28.500.000,00	25.000.000,00	14,00
Beban Sewa Meja Kursi	73.950.000,00	103.075.000,00	-28,26
Beban Sewa Komputer dan Printer	84.700.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa Proyektor	45.390.350,00	500.000,00	8.978,07
Beban Sewa Generator	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Tenda	236.023.000,00	295.510.000,00	-20,13
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.250.000,00	22.800.000,00	-15,57
Beban Sewa Sound Sistem	75.500.000,00	89.750.000,00	-15,88
Beban Sewa Peralatan Kesenian	7.500.000,00	15.575.000,00	-51,85
Beban Sewa Perlengkapan Lainnya	19.395.000,00	8.170.000,00	137,39
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	389.494.250,00	110.742.000,00	251,71
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	2.590.898.540,00	4.427.265.400,00	-41,48
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	45.495.000,00	-45,05
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	110.000.000,00	115.000.000,00	-4,35
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	83.300.000,00	-100,00
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	3.309.516.115,00	4.079.024.000,00	-18,87
Beban Sosialisasi	219.105.000,00	1.142.150.000,00	-80,82
Beban Bimbingan Teknis	9.336.893.690,00	9.511.590.000,00	-1,84



*Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Beban Moderator	0,00	15.600.000,00	-100,00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	446.950.000,00	20.679.908.525,00	-97,84
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	0,00	71.200.000,00	-100,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,00	7.800.000,00	-100,00
Beban Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap - LO	25.846.851.384,00	18.456.105.781,00	40,04
Beban Jasa Pelayanan Medis	11.466.639.171,05	12.351.020.365,10	-7,16
Belanja Jasa Sarana Kesehatan	999.392.601,00	267.990.794,90	272,92
Beban Jasa Tenaga Ahli	2.315.605.000,00	2.475.440.731,00	-6,46
Beban Jasa Narasumber/Instruktur	4.673.646.000,00	4.798.465.000,00	-2,60
Beban Jasa Moderator/MC	220.127.500,00	520.516.000,00	-57,71
Beban Jasa Profesi Lainnya	1.054.722.500,00	929.160.000,00	13,51
Beban Jasa Petugas Persampahan	807.350.000,00	985.225.000,00	-18,05
Beban Jasa Cleaning Service	2.259.620.000,00	1.450.244.000,00	55,81
Beban Jasa Sopir	1.300.890.000,00	1.354.770.000,00	-3,98
Beban Jasa Tenaga Kerja Lainnya	512.597.000,00	1.998.114.500,00	-74,35
Beban Hadiah Lomba/Penghargaan/Cendramata	1.292.623.000,00	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	4.414.403.320,00	6.653.805.961,00	-33,66
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	8.664.288.750,00	8.016.547.800,00	8,08
Beban Jasa BLUD	28.890.245.895,96	24.322.157.768,58	18,78
Beban Jasa BOS	4.545.507.609,00	10.605.619.702,00	-57,14
<b>Jumlah</b>	<b>146.079.225.732,01</b>	<b>198.475.766.505,30</b>	<b>-26,40</b>

#### 4.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp18.193.854.324,23 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp11.076.936.622,04 mengalami kenaikan sebesar Rp7.116.917.702,19 atau 64,25%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
Beban Penggantian Suku Cadang	2.174.366.168,00	0,00	0,00
Beban Jasa Service	513.302.147,00	0,00	0,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.024.051.686,00	0,00	0,00
Beban Jasa KIR	3.319.000,00	0,00	0,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	7.126.881,67	0,00	0,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	372.298.896,56	0,00	0,00
Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	3.900.000,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.097.560.170,00	1.352.892.601,00	-18,87
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.379.867.006,00	2.249.105.730,00	5,81
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.185.568.650,00	835.829.714,04	281,13
Beban Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Sungai	3.245.258.350,00	2.566.725.000,00	26,44
Beban Pemeliharaan Drainase, Duiker dan Talud	641.325.000,00	762.489.500,00	-15,89
Beban Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Ruang Terbuka Hijau	100.000.000,00	220.000.000,00	-54,55
Beban Pemeliharaan BLUD	816.137.724,00	667.671.537,00	22,24
Beban Pemeliharaan BOS	1.429.772.645,00	2.222.222.540,00	-35,66
<b>Jumlah</b>	<b>18.193.854.324,23</b>	<b>11.076.936.622,04</b>	<b>64,25</b>

#### 4.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp72.957.858.377,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp80.546.940.156,00 mengalami penurunan sebesar Rp-7.589.081.779,00 atau -9,42%, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Perjalanan Dinas	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.365.617.500,00	19.480.344.300,00	-5,72
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.218.627.712,00	56.904.902.016,00	-11,75
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	79.993.500,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas BOS	4.293.619.665,00	4.161.693.840,00	3,17
<b>Jumlah</b>	<b>72.957.858.377,00</b>	<b>80.546.940.156,00</b>	<b>-9,42</b>

#### 4.4.2.6 Beban Bunga

Beban Bunga untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp13.428.814,08 mengalami penurunan sebesar Rp13.428.814,08 atau 100,00%. Beban Bunga per 31 Desember 2017 merupakan beban bunga utang kepada pemerintah.

#### 4.4.2.7 Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah untuk periode s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp66.442.686.988,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp54.588.144.188,60 mengalami kenaikan sebesar Rp11.854.542.799,40 atau 21,72%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017
<b>A</b>	<b>Beban Hibah Barang</b>		
1	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	14.979.353.174,00	27.022.312.000,00
2	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	4.683.059.564,00	27.218.753.188,60
3	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	365.999.450,00	347.079.000,00
<b>B</b>	<b>Beban Hibah Uang</b>		
4	Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat	2.478.665.679,00	0,00
5	Belanja Hibah Keagamaan	3.526.705.000,00	0,00
6	Belanja Hibah kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik BOP PAUD)	7.486.200.000,00	0,00
7	Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal	32.922.704.121,00	0,00
<b>Jumlah Beban Hibah – LO</b>		<b>66.442.686.988,00</b>	<b>54.588.144.188,60</b>

#### 4.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp6.034.000.000,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp39.725.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.994.275.000,00 atau 15.089,43%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	6.034.000.000,00	39.725.000,00	15.089,43
<b>Jumlah</b>	<b>6.034.000.000,00</b>	<b>39.725.000,00</b>	<b>15.089,43</b>

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2018 sebesar Rp6.034.000.000,00, terdiri dari:

- Beban Bantuan sosial dalam bentuk uang	Rp 6.034.000.000,00
- Beban bantuan sosial dalam bentuk barang	Rp -
- Jumlah Beban bantuan sosial	Rp 6.034.000.000,00

#### 4.4.2.9 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi untuk periode s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp188.605.554.063,77 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp171.786.993.090,30 mengalami kenaikan sebesar Rp16.818.560.973,48 atau 9,79%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2018	2017
<b>A</b>	<b>Beban Penyusutan</b>		
1	Beban Penyusutan Alat Kantor	24.386.738.535,00	46.696.055.681,58
2	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	17.749.624.057,55	0,00
3	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	10.702.816.271,70	0,00
4	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.794.710.768,00	14.295.097.423,86
5	Beban Penyusutan Jalan	115.552.630.664,00	110.472.509.541,00
6	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	4.576.429.134,00	0,00
7	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	345.022.195,00	0,00
8	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.722.672,00	0,00
9	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	156.675.156,00	0,00
<b>B</b>	<b>Beban Amortisasi</b>		
10	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	337.184.610,52	323.330.443,86
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO</b>		<b>188.605.554.063,77</b>	<b>171.786.993.090,30</b>

#### 4.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang Kabupaten Wajo terhadap piutang pajak daerah, retribusi daerah, dan piutang lainnya ditahun 2018 sebesar Rp2.113.862.062,05 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.323.527.351,82 mengalami kenaikan sebesar Rp790.334.710,24 atau 59,71%. Rinciannya sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.965.041.255,96	1.114.960.350,86	76,24
2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi	15.016.724,54	909.835,59	1.550,49
3 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	58.906.158,58	24.241.749,57	142,99
4 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	50.054.341,56	0,00	0,00
5 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	25.783.581,41	57.811.168,52	-55,40
6 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-940.000,00	0,00	0,00
7 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	125.604.247,29	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.113.862.062,05</b>	<b>1.323.527.351,82</b>	<b>59,71</b>

#### 4.4.2.11 Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk periode s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp230.110.241.650,17 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp153.987.376.480,83 mengalami kenaikan sebesar Rp76.122.865.169,34 atau 49,43%, dengan perincian sebagai berikut :

Beban Transfer	31 Des 2018	31 Des 2017	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.288.221.229,40	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.044.124.489,69	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
 Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	120.644.845.971,08	152.926.723.876,83	-21,11
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	913.278.960,00	1.060.652.604,00	-13,89
Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	104.219.771.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>230.110.241.650,17</b>	<b>153.987.376.480,83</b>	<b>49,43</b>

#### 4.4.2.12 Beban Lain - Lain

Beban Lain - Lain untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp1.086.630.730,77 dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.086.630.730,77 atau 0,00%.

Beban lain - lain merupakan beban atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait dengan batas kapitalisasi aset (*ekstracompatible*) dan aset tetap yang dihibahkan ke sekolah swasta, serta pengurangan aset tetap karena kondisi barang rusak berat dan dihapuskan.

Rincian Beban Lain-lain per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Beban Lain - Lain	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)	Tren (%)
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	792.426.018,00	0,00	0,00
2 Dinas Kesehatan	260.382.662,77	0,00	0,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	6.332.650,00	0,00	0,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	314.900,00	0,00	0,00
5 Dinas Lingkungan Hidup	2.997.500,00	0,00	0,00
6 Kecamatan Sabbangparu	9.000.000,00	0,00	0,00
7 Kecamatan Bola	6.250.000,00	0,00	0,00
8 Kecamatan Sajoanging	6.000.000,00	0,00	0,00
9 Kecamatan Belawa	450.000,00	0,00	0,00
10 Kecamatan Penrang	2.250.000,00	0,00	0,00
11 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	227.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.086.630.730,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban lain - lain merupakan beban atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait dengan batas kapitalisasi aset (*ekstracompatible*), dan berupa aset tetap yang dihibahkan ke sekolah swasta, serta pengurangan aset tetap di sebabkan kondisi barang rusak berat dan akan dihapuskan.

#### Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2018	2017
1	Pendapatan	1.481.986.659.929,68	1.501.347.667.780,31
2	Beban	1.425.392.142.257,70	1.277.811.545.191,60
<b>Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO</b>		<b>56.594.517.671,98</b>	<b>223.536.122.588,70</b>

#### 4.4.3 Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional tahun 2018 sebesar Rp-58.654.036.806,36 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp-90.714.786.939,95 mengalami kenaikan sebesar Rp32.060.750.133,59 atau -35,34%.

##### 4.4.3.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan aset non operasional Pemerintah Kabupaten Wajo yang tidak lagi difungsikan dan telah dihapus di tahun berjalan. Defisit





penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp58.654.036.806,36 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp90.714.786.939,95 mengalami penurunan sebesar Rp-32.060.750.133,59 atau -35,34%.

#### 4.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2018 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Rincian Pos Luar Biasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
-----------------------	-----	------

##### 2. Beban Luar Biasa

Beban Bencana Alam	Rp	1.537.451.600,00
Beban Luar Biasa Lainnya	Rp	2.816.644,00
Beban Tak Terduga tanggap Darurat	Rp	384.000.000,00
<b>Beban Luar Biasa</b>	<b>Rp</b>	<b>1.924.268.244,00</b>

Beban Luar Biasa yang terdapat pada Pos Luar biasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Wajo untuk masyarakat Korban Bencana Alam serta pemberian Bantuan Tak terduga tanggap Darurat 2018 pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satpol-PP Kab. Wajo Tahun Anggaran 2018.

#### Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2018 defisit sebesar Rp3.983.787.378,37.

#### 4.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu priode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Rincian realisasi Arus Kas Tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut.

No	Uraian	2018	2017
<b>1</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
	Aktivitas Operasi	1.407.603.616.014,33	1.469.725.300.064,13
	Aktivitas Investasi	0,00	0,00
	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
	Aktivitas Transitoris	80.386.208.510,00	96.561.028.155,00
<b>2</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
	Aktivitas Operasi	1.215.216.167.026,34	1.111.855.449.953,97
	Aktivitas Investasi	221.067.399.448,22	370.850.927.060,90
	Aktivitas Pendanaan	25.000.000,00	7.184.500.451,00
	Aktivitas Transitoris	80.385.993.964,00	96.561.028.155,00
	<b>Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas</b>	<b>-28.704.735.914,23</b>	<b>-20.182.017.160,68</b>



#### 4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber Pembiayaan dari luar. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 sebesar Rp192.387.448.987,99 dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp357.853.410.351,22 mengalami penurunan sebesar Rp-165.465.961.363,23 atau -46,24%.

##### 4.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2018.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 sebesar Rp1.407.603.616.014,33 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.469.725.300.064,13 mengalami penurunan sebesar Rp-62.121.684.049,80 atau -4,23%.

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.407.603.616.014,33. realisasi arus kas masuk pada tahun 2018 sudah termasuk Pendapatan dari Dana BOS, JKN Kapitasi dan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Dana BOS	Rp	40.973.426.756,00
- Pendapatan JKN Kapitasi	Rp	11.699.483.271,00
- Pendapatan BLUD	Rp	<u>55.026.394.047,00</u>
Jumlah	Rp	107.699.304.074,00

##### 4.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2018.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 sebesar Rp1.215.216.167.026,34 dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp1.111.871.889.712,91 mengalami kenaikan sebesar Rp103.344.277.313,43 atau 9,29%.

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi merupakan Belanja Operasi, Belanja Tak Teduga dan Transfer dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.215.216.167.026,34 realisasi arus kas keluar pada tahun 2017 sudah termasuk belanja Operasi dari Dana BOS, JKN Kapitasi dan BLUD.

#### 4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih aktivitas investasi pada Tahun 2018 sebesar Rp-221.067.399.448,22. Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

##### 4.5.2.1 Arus Kas Masuk

Pada Tahun 2018 tidak terdapat Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi pada Pemerintah Kabupaten Wajo.

##### 4.5.2.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2018 sebesar Rp221.067.399.448,22 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp370.850.927.060,90 mengalami penurunan sebesar Rp-149.783.527.612,68 atau -40,39%.



Realisasi arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan realisasi dari belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp213.370.399.448,22, realisasi arus kas keluar pada tahun 2017 sudah termasuk belanja Modal dari Dana BOS, JKN Kapitasi dan BLUD.

#### **Arus Kas Bersih**

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan investasi aset non keuangan dalam periode TA 2018, yaitu sebesar (Rp221.067.399.448,22).

#### **4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Arus Kas bersih dari Aktivitas pendanaan tahun 2018 sebesar Rp-25.000.000,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp-7.184.500.451,00 mengalami kenaikan atau sebesar Rp7.159.500.451,00 atau -99,65%. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih lebih kurang penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan Pembiayaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

##### **4.5.3.1 Arus Kas Masuk**

Pada Tahun 2018 tidak terdapat Arus kas masuk dari Aktivitas pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Wajo.

##### **4.5.3.2 Arus Kas Keluar**

Arus kas keluar dari aktivitas Pendanaan tahun 2018 sebesar Rp25.000.000,00 sedangkan di tahun 2017 sebesar Rp7.184.500.451,00, mengalami penurunan sebesar Rp-7.159.500.451,00 atau -99,65%, merupakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran di luar Penyertaan Modal dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.

#### **Arus Kas Bersih**

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan pendanaan dalam periode TA 2018, yaitu sebesar

#### **4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

Arus kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang, PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran terdiri dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2018 sebesar Rp214.546,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp214.546,00.

##### **4.5.4.1 Arus Kas Masuk**

Arus Kas Masuk dari aktivitas non anggaran tahun 2018 sebesar Rp80.386.208.510,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp96.561.028.155,00 mengalami penurunan sebesar Rp-16.174.819.645,00 atau-16,75%.

##### **4.5.4.2 Arus Kas Keluar**

Arus Kas Keluar dari aktivitas non anggaran tahun 2018 sebesar Rp80.385.993.964,00



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp96.561.028.155,00 mengalami penurunan sebesar Rp-16.175.034.191,00 atau -16,75%.

#### Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan transitoris dalam periode TA 2018, yaitu sebesar Rp214.546,00 berupa PPN, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

#### Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun 2018

Penurunan Kas berasal dari:

No	Uraian	2018	2017
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	192.387.448.987,99	357.869.850.110,16
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-221.067.399.448,22	-370.850.927.060,90
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-25.000.000,00	-7.184.500.451,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	214.546,00	0,00
<b>Kenaikan Bersih Kas Periode TA</b>		<b>-28.704.735.914,23</b>	<b>-20.182.017.160,68</b>

#### 4.5.5

#### Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas terdiri dari:

No	Uraian	2018	2017
1	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun 2018	-28.704.735.914,23	-20.182.017.160,68
2	Saldo Awal Kas di BUD dan Setara Kas, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana	34.938.194.350,50	55.258.330.732,18
3	Saldo Akhir Kas	6.233.458.436,27	35.076.313.571,50
Terdiri dari:			
a.	Saldo Akhir Kas di BUD dan Setara Kas	1.386.168.632,12	31.135.812.094,40
b.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	138.119.221,00
c.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	214.546,00	0,00
d.	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	4.306.619.927,45	3.430.315.297,98
e.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	580.159.583,70	205.355.119,12
f.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	103.121.567,00	166.711.839,00
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5	Saldo Akhir Kas Lainnya	230.369.319,00	64.409.951,00
<b>Saldo Akhir Kas TA</b>		<b>6.463.827.755,27</b>	<b>35.140.723.522,50</b>

Perbandingan saldo akhir kas di BUD antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai	
Saldo Akhir Kas BUD di Neraca	6.606.653.572,27
Saldo Akhir Kas BUD di LAK	6.463.827.755,27
Selisih	<u>142.825.817,00</u>

Selisih sebesar Rp142.825.817,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan Tahun 2017 yang tidak dicatat sebagai Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan di LAK, namun di catat pada mutasi Arus Kas Masuk di LAK (Aktivitas Operasi) Tahun 2017 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp127.623.221,00 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp10.496.000,00. Serta koreksi SiLPA atas saldo Kas di Bendahara Dana BOS Tahun 2017 yang terdiri dari saldo Dana BOS pada SD Negeri sebesar Rp4.471.134,00 dan SMP Negeri sebesar Rp235.465,00.

#### 4.6

#### Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan



dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:

**4.6.1 Ekuitas Awal**

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp2.885.148.022.930,11

**4.6.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)**

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp-3.983.787.378,37.

**4.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

**4.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Pada tahun 2018 terdapat Koreksi nilai persediaan per 31 des 2018 sebesar Rp99.217.513,16 yang merupakan koreksi ekuitas atas adanya penambahan Persediaan alat kesehatan dan persediaan obat pada Dinas Kesehatan yang tidak di catat di tahun sebelumnya dan adanya Koreksi nilai persediaan awal alat kontrasepsi yang tidak di catat di tahun sebelumnya, serta adanya koreksi kurang nilai Persediaan amunisi senjata api akibat adanya peralihan polisi kehutanan ke pemerintah provinsi, Persediaan tersebut bukan merupakan beban persediaan tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Jumlah</b>
Koreksi Tambah Persediaan awal alat kesehatan yang tidak dicatat tahun seblumnya (Dinas Kesehatan)	19.908.382,16	0,00	19.908.382,16
Koreksi Tambah Persediaan awal Obat yang tidak dicatat tahun seblumnya (Dinas Kesehatan)	77.203.171,00	0,00	77.203.171,00
Koreksi Tambah Persediaan awal alat kontrasepsi yang tidak dicatat tahun seblumnya (Dinas KB)	1.793.855,00	0,00	1.793.855,00
Koreksi Kurang Persediaan amunisi senjata api akibat adanya peralihan polisi kehutanan ke pemerintah provinsi (Dinas Perkebunan)	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
koreksi tambah persediaan cetak benda berharga atas kurang catat pada badan pendapapatan daerah serta mengoreksi ekuitas atas kurang catat persediaan tahun sebelumnya di tahun 2018	3.812.105,00	0,00	3.812.105,00
<b>Jumlah</b>	<b>102.717.513,16</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>99.217.513,16</b>

**4.6.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya**

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp43.350.127.242,31, dengan rincian sebagai berikut.

<b>Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Jumlah</b>
Koreksi Nilai Aset Tetap	45.262.052.453,00	500.000.000,00	44.762.052.453,00
Penyesuaian Utang Jangka Pendek	85.143.058,00	0,00	85.143.058,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	72.935.499,31	0,00	72.935.499,31



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyesuaian Kas dan Pengembalian Sisa Dana BOS	4.706.599,00	0,00	4.706.599,00
Koreksi Nilai Investasi	0,00	2.416.700.048,00	-2.416.700.048,00
Koreksi Nilai Pendapatan	841.989.681,00	0,00	841.989.681,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.266.827.290,31</b>	<b>2.916.700.048,00</b>	<b>43.350.127.242,31</b>

#### 1). Koreksi Nilai Aset Tetap

pada tahun 2018 terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp44.762.052.453,00 yang merupakan koreksi atas adanya penyesuaian aset tetap baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun sebelumnya, sehingga dilakukan penyesuaian ditahun 2018 seperti adanya kurang bayar atas utang retensi dan utang pengadaan tahun sebelumnya namun tidak lagi dituntut oleh pihak ketiga untuk dibayarkan sehingga dibuatkan surat pernyataan atas utang tersebut dan adanya double pencatatan aset tanah yang dicatat oleh pemerintah kabupaten wajo dan dicatat pula oleh pemerintah provinsi sehingga dilakukan koreksi atas aset tetap tersebut untuk dikeluarkan ke dari aset tetap, selain itu terdapat juga aset berupa penilaian aset tanah dibawah jalan, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Koreksi Nilai Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1 Utang Retensi (Surat Pernyataan)	750,00		750,00
2 Double Pencatatan Aset Tetap Tanah		500.000.000,00	(500.000.000,00)
3 Kesalahan Pengakuan Utang Tahun sebelumnya (Surat Pernyataan)	2.355.000,00		2.355.000,00
4 Penilaian Aset Tanah dibawah Jalan	45.259.696.703,00		45.259.696.703,00
<b>Jumlah</b>	<b>45.262.052.453,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>44.762.052.453,00</b>

#### 2). Penyesuaian Utang Jangka Pendek

Pada tahun 2018 terdapat Penyesuaian Utang Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp85.143.058,00 yang merupakan utang atas jasa layanan BPJS BLUD RSUD Siwa yang dikoreksi akibat adanya kesalahan pengakuan pencatatan utang tahun sebelumnya dan telah dibuatkan surat pernyataan dan berita acara rekonsiliasi utang dengan pihak BPJS, yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Penyesuaian Utang Jangka Pendek	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1 RSUD Siwa	85.143.058,00	0,00	85.143.058,00
<b>Jumlah</b>	<b>85.143.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.143.058,00</b>

#### 3). Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

Pada tahun 2018 terdapat Koreksi nilai penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp72.935.499,31 yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng, Rumah Sakit Umum Siwa karna adanya koreksi tambah beban penyisihan piutang pajak daerah dan piutang lainnya serta mengoreksi ekuitas atas piutang yang sebelumnya dicatat sebagai pengurang beban penyisihan piutang yang seharusnya dicatat sebagai koreksi ekuitas atas piutang tahun sebelumnya.

#### 4). Penyesuaian Kas dan Pengembalian Sisa Dana BOS

Pada tahun 2018 terdapat Penyesuaian kas dan pengembalian sisa dana bos sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.706.599,00 yang merupakan koreksi saldo awal kas dana BOS Tahun 2018 atas kesalahan pengakuan pencatatan kas dana BOS Tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan dengan Sekolah namun di tahun 2018 menjadi koreksi penambah kas yang terdiri dari koreksi saldo awal Dana BOS pada SD Negeri sebesar Rp4.471.134,00 dan



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pada SMP Negeri sebesar Rp235.465,00. Koreksi Nilai Investasi, dengan rincian sebagai berikut:

Penyesuaian Kas Dana BOS	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1 Koreksi Saldo Awal SD	4.471.134,00	0,00	4.471.134,00
2 Koreksi Saldo Awal SMP	235.465,00	0,00	235.465,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.706.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706.599,00</b>

**5). Koreksi Nilai Investasi**

Pada tahun 2018 terdapat koreksi nilai investasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp-2.416.700.048,00 yang merupakan koreksi kurang nilai investasi disebabkan karena laporan laba rugi sampai dengan 31 Desember 2018 pada Laporan Keuangan PDAM mengalami kerugian sehingga perhitungan nilai investasi pemerintah kabupaten wajo pada PDAM dikurangi dengan kerugian sampai dengan tanggal pelaporan.

**6). Koreksi Nilai Pendapatan**

Pada tahun 2018 terdapat koreksi nilai pendapatan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp841.989.681,00 yang merupakan koreksi akibat adanya penyesuaian pendapatan - LO di tahun 2018 atas Pendapatan JKN Kapitasi dan JKN Non Kapitasi yang sebelumnya tidak dicatat sebagai Piutang, namun terdapat penerimaan pendapatan yang mempengaruhi pendapatan - LO tahun 2018 sehingga dilakukan koreksi ekuitas atas pendapatan tersebut, yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Koreksi Nilai Pendapatan	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1 Dinas Kesehatan	841.989.681,00	0,00	841.989.681,00
<b>Jumlah</b>	<b>841.989.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.989.681,00</b>

**4.6.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir Tahun 2018 sebesar Rp2.924.613.580.307,20 atau naik 1,37% yaitu sebesar Rp39.465.557.377,10 dari tahun 2017.



## BAB V PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

### 5.1 Pengungkapan Lainnya

#### 5.1.1 Domisili

Kabupaten Wajo adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang berada ditengah-tengah Propinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk dan ditetapkan sebagai salah satu kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, sehingga baik secara *defacto* maupun secara *de jure*, Kabupaten Wajo telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara otonom. Namun secara historis nama Kabupaten Wajo berasal dari nama “Bajo” yang merupakan asal mula Kerajaan Wajo, sehingga menurut beberapa lontara’ yang di dalamnya disertai dengan Nordduyn (1955) terdapat beberapa perbedaan cerita tentang asal mula Wajo.

Secara geografis Kabupaten Wajo berada pada posisi 3°39’ sampai dengan 4°16’ lintang selatan (LS) dan 119°53’ sampai dengan 120°27’ bujur timur (BT). Secara administrasi, Kabupaten Wajo berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah utara, dengan teluk Bone di sebelah timur, dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah barat dan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng di sebelah selatan.

Kabupaten Wajo memiliki luas wilayah sebesar 2.506,19 km<sup>2</sup> atau lebih kurang 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 kecamatan dan terdiri 190 Desa/Kelurahan (48 kelurahan dan 142 desa), sebagaimana dapat dilihat pada 14 kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari 10 kecamatan. Kecamatan Pitumpanua dimekarkan menjadi Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Keera, sedangkan Kecamatan Takkalalla terbagi menjadi Kecamatan Takkalalla dan Bola. Kecamatan Sajoanging dan Penrang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sajoanging, sedangkan Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Maniangpajo berasal dari kecamatan induk Maniangpajo. Kecamatan Keera merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 36,36<sup>2</sup> (14,70% dari luas wilayah Kabupaten Wajo) dan Kecamatan Tempe merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu hanya 38,27<sup>2</sup> (1,35% dari luas wilayah Kabupaten Wajo). Kecamatan Tempe ini juga merupakan ibukota Kabupaten Wajo.

#### 5.1.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017;
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017

#### 5.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah dijabarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah meliputi:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD





- c. Inspektorat Daerah
- d. Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Dinas :
  - 1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
  - 2 Dinas Kesehatan
  - 3 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang
  - 4 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
  - 5 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
  - 6 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
  - 7 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
  - 8 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
  - 9 Dinas Perkebunan
  - 10 Dinas Perikanan
  - 11 Dinas Perdagangan
  - 12 Dinas Sosial
  - 13 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
  - 14 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  - 15 Dinas Ketahanan Pangan
  - 16 Dinas Lingkungan Hidup Daerah
  - 17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
  - 19 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
  - 20 Dinas Perhubungan
  - 21 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
  - 22 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 23 Dinas Pemuda Dan Olahraga
  - 24 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
  - 25 Dinas Pariwisata
  - 26 Dinas Perindustrian
- f. Badan :
  - 1 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
  - 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 3 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
  - 4 Badan Pendapatan Daerah
  - 5 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - 7 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Siwa



## 5.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Pada TA 2014, Pemerintah Kabupaten Wajo masih menerapkan akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual. Pada TA 2015 s.d sekarang, Pemerintah Kabupaten Wajo menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

## 5.3 Penjelasan atas Dana-dana Non APBD Kabupaten Wajo

Pada Tahun 2018 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan konsolidasi atas Dana Non APBD yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan, Dana Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan dan Dana BLUD pada RSUD Lamadukkelleng dan RSUD Siwa.

### 5.3.1 Dana Tugas Pembantuan

Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan tahun 2018, masing-masing Satuan Kerja dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Satuan Kerja	Anggaran 2018	Realiasi 2018	Sisa	%
1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.062.659.000	1.053.997.000	8.662.000	0
2 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.622.414.000	18.913.192.000	709.222.000	96,39
3 Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	5.995.200.000	5.902.010.340	93.189.660	98,45
<b>Jumlah</b>	<b>26.680.273.000</b>	<b>25.869.199.340</b>	<b>811.073.660</b>	<b>96,96</b>

Total Aset Dana Tugas Pembantuan Tahun 2018 sebesar Rp101.544.083.380,00 dan tahun 2017 sebesar Rp87.844.027.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017	%
1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	544.993.940,00	697.466.082,00	(21,86)
2 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	63.212.883.090,00	54.386.595.108,00	16,23
3 Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	37.786.206.350,00	32.759.966.650,00	15,34
<b>Jumlah</b>	<b>101.544.083.380,00</b>	<b>87.844.027.840,00</b>	<b>15,60</b>

### 5.3.2 Dana BOS

Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memperoleh Dana BOS dari Kementerian Pendidikan yang diberikan kepada SD dan SMP Negeri, dengan rincian sebagai berikut:

Tingkat	Pendapatan	Belanja
1 SD / 384 Sekolah	28.443.276.756,00	28.469.596.944,00
2 SMP / 71 Sekolah	12.530.150.000,00	12.567.420.084,00
<b>Jumlah</b>	<b>40.973.426.756,00</b>	<b>41.037.017.028,00</b>

### 5.3.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng mengungkapkan total aset per 31 Des 2018 sebesar Rp99.541.359.756,22,



total pendapatan sebesar Rp76.789.215.345,00 dan total beban sebesar Rp80.285.363.781,52 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh KAP AF Rachman & Soetjipto WS dengan Nomor Izin KAP: Kep-216/KM.6/2002.

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Siwa mengungkapkan total aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp54.200.640.250,51, total pendapatan sebesar Rp32.025.349.932,06 dan total beban sebesar Rp17.405.570.505,13 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh KAP AF Rachman & Soetjipto WS dengan Nomor Izin KAP: Kep-216/KM.6/2002

#### 5.4 Kewajiban Kontijensi

Terdapat sengketa Tanah SDN 80 Kae Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu dengan luas tanah 2.324 m<sup>2</sup> senilai Rp149.175.000,00. Tanah tersebut yang digugat oleh H.Mas'ud Bin Mekka atas gugatan di Pengadilan Negeri Sengkang sesuai dengan Perkara Perdata nomor 03/PDT.G/2011/PN.SKG.

Atas sengketa Tanah tersebut diatas telah keluar Putusan Hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1745K/PDT/2012 antara Usman Marala, SPd. dkk melawan H.Mas'ud bin Mekka sesuai dengan Perkara Kasasi Perdata. Permohonan Kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi Usman Marala, S.Pd dkk tersebut ditolak.

Untuk laporan lalu lintas kredit kuperwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan PT.Bank Sulselbar Cabang Sengkang Nomor 28/PK/XI/2003 dan Nomor SR/2252a/B/WO/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penyelenggaraan Penyaluran Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Wajo (KUPERWA) tahun 2003, dengan ini dijelaskan laporan lalu lintas kredit posisi Per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Pokok	Bunga	Jumlah
Plafon Pinjaman	3.930.000.000	1.252.510.000	5.182.510.000
Realisasi Penerimaan Kumulatif	1.395.296.000	423.000.000	1.818.296.000
<b>Sisa Kewajiban</b>	<b>2.534.704.000</b>	<b>829.510.000</b>	<b>3.364.214.000</b>

#### 5.5 Pengungkapan atas pengalihan Urusan dari Pemerintah Kabupaten Wajo ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai dampak dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengalihan urusan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Kementerian, Oleh karena itu seluruh Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo melaksanakan penyerahan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) yang juga diatur dalam surat edaran menteri dalam negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2016 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya UU No 23 tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota). Salah satu penyerahan tersebut adalah pengalihan PNS ke Kementerian dan Provinsi.

Pengalihan PNS atau personil tersebut hanya bagi PNS atau jabatan Fungsional yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dialihkan dari Kabupaten/Kota kepada kementerian ataupun ke provinsi. PNS yang memiliki tugas Pengawas Tenaga Kerja, Guru SMA dan SMK,



*Pemerintah Kabupaten Wajo*

*Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018*

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017*

*(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

Penyuluh Kehutanan dan Polisi Kehutanan dialihkan ke provinsi. Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Perikanan, Serta Inspektur Tambang dialihkan ke Pemerintah Pusat. Penyerahan urusan tersebut juga didalamnya pengalihan aset tetap yang terkait dengan kewenangan yang diserahkan untuk Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal pengalihan Personil, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan Dokumen ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang memiliki tugas sebagai Guru SMA dan SMK, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan serta Pengawas Tenaga Kerja. Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Perikanan serta Inspektur Tambang belum dialihkan ke Pemerintah Pusat.



Pemerintah Kabupaten Wajo  
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember  
Tahun Anggaran 2018  
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017  
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2018 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Wajo Tahun 2018 secara keseluruhan.

Sengkang, 24 Mei 2019

  
BUPATI WAJO,  
DR. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si